



RENCANA TENAGA KERJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 - 2027



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tenaga Kerja merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional, regional dan sektoral. Kalimantan Utara dengan penduduknya yang cukup banyak, memiliki potensi yang besar baik sebagai pelaku pembangunan maupun potensi pasar. Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut diperlukan perencanaan tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang – undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan sampai saat ini masih cukup besar, kompleks dan multidimensional antara lain berupa tingkat pengangguran terbuka dan setengah penganggur yang cukup tinggi. Selain itu kualitas tenaga kerja yang relative masih rendah, serta informasi pasar kerja yang relative masih terbatas, permasalahan itu menyangkut pengupahan pekerja yang masih rendah baik yang

diakibatkan produktivitas pekerja maupun akibat perusahaan yang belum mengatur struktur dan skala upah. Demikian juga menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja yang belum standar, lingkungan kerja yang kurang sesuai dengan kompetensi dan kasus-kasus yang mempengaruhi para pekerja dan pengusaha yang berakibat tidak kondusifnya aktivitas perusahaan. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui penciptaan kesempatan kerja dan remunerative dengan mendayagunakan semua potensi sumber daya manusia yang melibatkan semua komponen masyarakat.

Kami mengharapkan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 yang telah tersusun ini dapat dijadikan acuan oleh setiap Perangkat Daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, strategi dan programnya, sehingga selaras dengan pembangunan ketenagakerjaan. Pada gilirannya akan dapat mewujudkan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan berupa perluasan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan remunerative, peningkatan kualitas angkatan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas terbitnya Buku Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027.

Tanjung Selor, Desember 2022

GUBERNUR

Drs. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H, M.Hum

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Buku Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran perencanaan ketenagakerjaan daerah selama lima tahun mendatang. Penyusunan RTKD ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yang mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi melakukan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

Buku RTKD 2022-2027 memuat data dan informasi trend pertumbuhan selama 2018-2021 berikut proyeksi tahun 2022-2027 dari penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja menurut sektoral, produktivitas tenaga kerja, penganggur terbuka, latihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Angka-angka dalam buku ini telah disesuaikan dengan data dan informasi mutakhir, dengan menggunakan berbagai asumsi termasuk perkiraan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. RTKD 2022-2027 ini merupakan rencana indikatif yang digunakan untuk pembinaan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi serta unit teknis ketenagakerjaan. Oleh karena itu, variabel, koefisien, dan angka-angka yang terdapat di dalamnya dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan nyata yang terjadi.

RTKD Tahun 2022-2027 diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan di seluruh sektor ekonomi daerah. Bahkan RTKD ini dapat menjembatani kerja sama antar sektor perekonomian daerah untuk menanggulangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Buku ini juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ketenagakerjaan pada umumnya serta bidang pelatihan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam buku ini, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu kami mengharapkan saran konstruktif dari seluruh pihak terkait penyempurnaan buku ini di masa datang. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada anggota Tim RTKD serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RTKD Tahun 2022-2027 ini.

Tanjung Selor, Desember 2022

Kepala Dinas,

HAERUMUDDIN, SH.,M.AP

Pembina Utama Madya/IV d

NIP. 19641231 199402 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa Tahun 2018 penduduk yang bekerja mencapai 314.776 orang dan naik pada Tahun 2019 menjadi 320.046 orang dan naik kembali pada Tahun 2020 menjadi 330.441 orang serta naik kembali tahun 2021 menjadi 338.152 orang. Dari jumlah Angkatan kerja pada Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 331.729 orang dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 335.108 orang dan naik kembali pada Tahun 2020 menjadi 347.731 orang serta pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 354.376 orang. Sementara penganggur terbuka di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 mencapai 16.953 orang atau 5,11 persen, tahun 2019 mencapai 15.062 orang atau 4,49 persen, tahun 2020 mencapai 17.290 orang atau 4,97 persen dan tahun 2021 mencapai 16.224 orang atau 4,58 persen.

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan masih akan diwarnai oleh berbagai isu ketenagakerjaan yang menyangkut penganggur terbuka, setengah penganggur, pekerja tidak dibayar, kualitas keterampilan angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, penegakan hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja. Kondisi lingkungan strategis, baik dari dalam maupun luar wilayah, diperkirakan akan ikut mempengaruhi secara signifikan berbagai isu ketenagakerjaan tersebut di atas.

Agar isu dan tantangan ketenagakerjaan tersebut di atas

tidak berkembang menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks, maka diperlukan konsep pembangunan ketenagakerjaan yang holistik dan komprehensif. Adapun pedoman yang dibutuhkan adalah Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Tahun 2022-2027. Hal ini telah diamanatkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Keberhasilan untuk mengatasi pengangguran terbuka perlu dipertahankan, dengan berbagai kebijakan dan program baik di bidang perekonomian maupun ketenagakerjaan perlu dilaksanakan secara konsisten. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara akan menggerakkan keterkaitan antara pembangunan perekonomian dengan pembangunan ketenagakerjaan. Dari hasil penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022-2027 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 mencapai 4,18 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 diperkirakan PDRB Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,28 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif turut mempengaruhi kesempatan kerja pada tahun 2022-2027 yang diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mencapai 353.005 orang dan terus meningkat hingga tahun 2027 mencapai 401.928 orang. Secara

keseluruhan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 kesempatan kerja akan bertambah sebanyak 48.923 orang. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja ini akan berdampak positif terhadap tingkat pengangguran terbuka yang diperkirakan mengalami penurunan. Pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 13.716 orang dengan TPT sebesar 3,74 persen dan diperkirakan akan mengalami penurunan hingga tahun 2027 menjadi 12.479 orang dengan TPT sebesar 3,01 persen.

Untuk mencapai usaha tersebut, kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan akan dilaksanakan secara konsisten menyangkut pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan tersebut akan mengarah pada Kebijakan dan Program Umum, Daerah dan Sektoral. Selain itu, dilaksanakan pula kebijakan dan program Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial yang harmonis dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMBUTAN GUBERNUR | i |
| KATA PENGANTAR KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 3 |
| C. Tujuan | 4 |
| D. Metodologi | 5 |
| E. Sumber Data | 8 |
| F. Pengertian | 8 |
| G. Sistematika | 11 |
| BAB II KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 12 |
| A. Kondisi Ekonomi | 12 |
| B. Potensi Daerah | 22 |
| C. Penduduk Usia Kerja | 33 |
| D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 40 |
| E. Angkatan Kerja | 47 |
| F. Penduduk Yang Bekerja | 52 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| | G. Penganggur Terbuka | 68 |
| | H. Produktivitas Tenaga Kerja..... | 76 |
| | I. Pelatihan Tenaga Kerja | 78 |
| | J. Penempatan Tenaga Kerja..... | 79 |
| | K. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 81 |
| | L. Pengawasan Ketenagakerjaan..... | 83 |
| BAB III | PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA | 85 |
| | A. Perkiraan Penduduk Usia Kerja..... | 85 |
| | B. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... | 92 |
| | C. Perkiraan Angkatan Kerja..... | 99 |
| BAB IV | PERKIRAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA | 105 |
| | A. Perkiraan Perekonomian | 106 |
| | B. Rencana Pengembangan Potensi Daerah . | 114 |
| | C. Perkiraan Kesempatan Kerja..... | 116 |
| | D. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja | 129 |
| | E. Perkiraan Pelatihan Tenaga Kerja | 132 |
| | F. Perkiraan Penempatan Tenaga Kerja | 134 |
| | G. Perkiraan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 137 |
| | H. Perkiraan Pengawasan Ketenagakerjaan .. | 139 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| BAB V | PERKIRAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA | 141 |
| | A. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur | 141 |
| | B. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan | 145 |
| | C. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin..... | 147 |
| | D. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota | 149 |
| | | |
| BAB VI | KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN | 151 |
| | A. Kebijakan Umum..... | 151 |
| | B. Kebijakan Pengendalian Tambahan Angkatan Kerja | 156 |
| | C. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan | 158 |
| | D. Kebijakan Sektoral..... | 159 |
| | E. Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja | 172 |
| | F. Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 175 |
| | G. Kebijakan Pengawasan | 178 |
| | H. Kebijakan Lainnya..... | 179 |
| | | |
| BAB VII | PENUTUP | 182 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-------------|---|
| Tabel 2.A.1 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%).... 14 |
| Tabel 2.A.2 | Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)..... 17 |
| Tabel 2.B.1 | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Sederajat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021..... 24 |
| Tabel 2.B.2 | Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha, Nilai Investasi, Jumlah Proyek dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021..... 33 |
| Tabel 2.C.1 | Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) 35 |
| Tabel 2.C.2 | Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... 37 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.C.3 | Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 38 |
| Tabel 2.C.4 | Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 40 |
| Tabel 2.D.1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)... | 42 |
| Tabel 2.D.2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)... | 44 |
| Tabel 2.D.3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)... | 45 |
| Tabel 2.D.4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)... | 46 |
| Tabel 2.E.1 | Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 48 |
| Tabel 2.E.2 | Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 50 |
| Tabel 2.E.3 | Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 51 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.E.4 | Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 52 |
| Tabel 2.F.1 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 55 |
| Tabel 2.F.2 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 57 |
| Tabel 2.F.3 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 59 |
| Tabel 2.F.4 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 60 |
| Tabel 2.F.5 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 63 |
| Tabel 2.F.6 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 65 |
| Tabel 2.F.7 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 66 |
| Tabel 2.F.8 | Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 67 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.G.1 | Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 69 |
| Tabel 2.G.2 | Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)..... | 70 |
| Tabel 2.G.3 | Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 71 |
| Tabel 2.G.4 | Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)..... | 72 |
| Tabel 2.G.5 | Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang) | 73 |
| Tabel 2.G.6 | Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)..... | 73 |
| Tabel 2.G.7 | Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)..... | 75 |
| Tabel 2.G.8 | Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)..... | 75 |
| Tabel 2.H.1 | Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Juta Rp/Tenaga Kerja) | 77 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.I.1 | Kapasitas Terpasang, Jumlah Instruktur dan Lulusan Pelatihan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021..... | 79 |
| Tabel 2.J.1 | Jumlah Pencari Kerja, Bursa Kerja dan Pengantar Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021..... | 80 |
| Tabel 2.K.1 | Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021..... | 82 |
| Tabel 2.K.2 | Perkembangan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2018-2021..... | 83 |
| Tabel 2.L.1 | Jumlah Perusahaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021..... | 84 |
| Tabel 3.A.1 | Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 87 |
| Tabel 3.A.2 | Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 89 |
| Tabel 3.A.3 | Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 90 |
| Tabel 3.A.4 | Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 92 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 3.B.1 | Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 94 |
| Tabel 3.B.2 | Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 96 |
| Tabel 3.B.3 | Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 97 |
| Tabel 3.B.4 | Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 98 |
| Tabel 3.C.1 | Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 100 |
| Tabel 3.C.2 | Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 102 |
| Tabel 3.C.3 | Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 103 |
| Tabel 3.C.4 | Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 104 |
| Tabel 4.A.1 | Perkiraan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan | |

| | | |
|-------------|--|-----|
| | Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%) | 109 |
| Tabel 4.A.2 | Perkiraan Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%).... | 113 |
| Tabel 4.B.1 | Recana Investasi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 | 115 |
| Tabel 4.C.1 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 118 |
| Tabel 4.C.2 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 120 |
| Tabel 4.C.3 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 122 |
| Tabel 4.C.4 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 123 |
| Tabel 4.C.5 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 124 |
| Tabel 4.C.6 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 126 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 4.C.7 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 128 |
| Tabel 4.C.8 | Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 129 |
| Tabel 4.D.1 | Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Juta Rp/Tenaga Kerja)..... | 131 |
| Tabel 4.E.1 | Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 133 |
| Tabel 4.E.2 | Target Kapasitas Terpasang, Jumlah Instruktur dan Lulusan Pelatihan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027..... | 134 |
| Tabel 4.F.1 | Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 135 |
| Tabel 4.F.2 | Target Jumlah Lowongan Kerja, Pencari Kerja Terdaftar, Pencari Kerja Ditempatkan, Bursa Kerja Swasta dan Pengantar Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 | 137 |
| Tabel 4.G.1 | Target Jumlah Mediator, PP, PKB, SP/SB, LKS Bipartit, Perusahaan dan Tenaga | |

| | | |
|-------------|--|-----|
| | Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027..... | 138 |
| Tabel 4.G.2 | Target Perkembangan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Utara,Tahun 2022-2023 | 139 |
| Tabel 4.G.3 | Jumlah Perusahaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027..... | 140 |
| Tabel 5.A.1 | Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 142 |
| Tabel 5.A.2 | Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 144 |
| Tabel 5.B.1 | Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 146 |
| Tabel 5.B.2 | Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 146 |
| Tabel 5.C.1 | Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang) | 148 |
| Tabel 5.C.2 | Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 148 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 5.D.1 | Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)..... | 149 |
| Tabel 5.D.2 | Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)... | 150 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Tenaga Kerja Makro (PTK) merupakan urusan wajib bagi pemerintah pusat, daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Instansi sektoral dan non sektoral pusat dan daerah. Hal ini tercermin dari Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi bahwa setiap penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan harus berdasarkan perencanaan tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan semakin banyak dan kompleks, seperti tingginya tingkat penganggur terbuka (TPT), kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah, kecelakaan tenaga kerja yang tinggi dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

Berdasarkan Sakernas Agustus 2021 jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 16.224 orang (4,58%) mengalami penurunan sebanyak 1.066 orang (0,38%) dari Tahun 2020. Isu pengangguran merupakan isu ketenagakerjaan utama yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk penyelesaian itu diperlukan langkah strategis dan komprehensif, untuk itu perlu perencanaan tenaga kerja.

Tantangan ketenagakerjaan ke depan juga semakin kompleks, seperti bonus demografi, era globalisasi serta

tuntutan teknologi. Bonus demografi dimana kondisi penduduk Kalimantan Utara yang produktif jumlahnya sangat banyak, agar penduduk yang produktif dapat didayagunakan diperlukan suatu rencana yang komprehensif, baik dari pendidikan formal, latihan kerja sampai dengan penempatan. Untuk menjawab tantangan kedepan pemerintah perlu mempersiapkan tenaga kerja agar siap pakai di dunia kerja. Berdasarkan data sakernas agustus 2021, kualitas PUK di Provinsi Kalimantan Utara 52,54 persen berpendidikan SMP kebawah. Dari jumlah tersebut 58,74 persen aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya era globalisasi, batasan antar wilayah dan negara semakin berkurang, seperti di berlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Diberlakukannya MEA merupakan peluang dan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Utara, peluang karena Provinsi Kalimantan Utara surplus akan angkatan kerja, sehingga bila dipersiapkan pendidikan dan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan pasar Asean, maka tenaga kerja Provinsi Kalimantan Utara bisa bekerja di kawasan Asean. MEA juga tantangan, bila kita lengah dalam mempersiapkan tenaga kerja, maka peluang kesempatan kerja di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga akan direbut tenaga kerja dari provinsi/negara lain. Teknologi dunia industri berkembang sangat cepat, guna menuntut kualitas dan persaingan usaha, untuk itu diperlukan tenaga kerja yang siap mengoperasikan teknologi tersebut.

Masalah ketenagakerjaan dan harapan pembangunan ketenagakerjaan yang ingin dicapai, bukan merupakan tanggung jawab instansi yang bertanggungjawab

ketenagakerjaan sendiri, melainkan tanggung jawab seluruh instansi, baik instansi pendidikan, Perindustrian, perdagangan, perhubungan, konstruksi, BKPM dan instansi lainnya. Untuk itu perlunya koordinasi antar instansi dan lembaga guna penyelesaian masalah tersebut. Agar tugas dan kewajiban setiap instansi/lembaga jelas, maka diperlukan rencana tenaga kerja.

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 ini adalah memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Memotret situasi ketenagakerjaan saat ini dan dampak Perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja dengan berbagai karakteristiknya.
2. Memperkirakan persediaan tenaga kerja tahun 2022-2027

- dengan berbagai karakteristiknya;
3. Memperkirakan kesempatan kerja yang akan datang dengan berbagai karakteristik, baik yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun faktor lainnya.
 4. Memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap (penganggur terbuka) tahun 2022-2027 .
 5. Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenagakerjaan.

D. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkirakan persediaan tenaga kerja, baik Penduduk Usia Kerja (PUK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angkatan Kerja (AK) dengan menggunakan rumus pertumbuhan Geometri yaitu:
 - a. Menghitung laju pertumbuhan Penduduk Usia Kerja (PUK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Penduduk Yang Bekerja (PYB) sebelumnya (historis), dengan rumus:

$$r = \left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) * 100$$

- b. Memproyeksikan PUK, TPAK dan PYB ke depan, dengan rumus:

$$P_q = P_t(1 + r)^m$$

Keterangan:

P_0 : Data Dasar PUK, TPAK dan PYB pada tahun awal

P_t : Data Dasar PUK, TPAK dan PYB pada tahun akhir

P_q : PUK, TPAK dan PYB tahun proyeksi

r : Angka pertumbuhan penduduk

n : Periode waktu antara data dasar tahun awal dan tahun akhir

m : Periode waktu antara data dasar tahun akhir dengan tahun proyeksi

- c. Menghitung/memproyeksi kebutuhan tenaga kerja menggunakan pendekatan elastisitas yang merupakan rasio antara perubahan atau pertumbuhan PYB dengan pertumbuhan PDRB, dengan rumus sebagai berikut:

$$E_i = \frac{rl_i}{ry_i}$$

Keterangan:

E_i : Elastisitas tenaga kerja sektor i

rl_i : Laju pertumbuhan PYB sektor i pertahun (%)

ry_i : Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) sektor i per tahun (%)

Sedangkan menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi, menggunakan rumus:

$$rl_{ai} = E_{ai} \times ry_{ai}$$

Keterangan:

E_{ai} : Elastisitas perubahan i

rl_{ai} : Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor (%)

ry_{ai} : Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor - i
(%)

sementara untuk menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampai dengan tahun proyeksi, menggunakan rumus:

$$KK_{ti} = KK_{oi}(1 + rl_{ai})^m$$

Keterangan:

P_0 = Data Dasar PUK, TPAK dan PYB pada tahun awal

P_t = Data Dasar PUK, TPAK dan PYB pada tahun akhir

P_q = PUK, TPAK dan PYB tahun proyeksi

r = Angka pertumbuhan penduduk

KK_{ti} = Proyeksi kesempatan kerja sektor - i

KK_{oi} = Data dasar PYB pada tahun akhir sektor - i

rl_{ai} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor - i

m = Jarak (selisih) tahun proyeksi (t_n) dengan tahun data dasar (t_0)

- d. Data dasar yang digunakan dalam penyusunan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja tersebut adalah data ketenagakerjaan dan data ekonomi tahun 2018 s.d 2021.

- e. Perkiraan persediaan tenaga kerja selanjutnya ditabulasikan menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, dan Tingkat Pendidikan.
- f. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja ditabulasikan menurut Jenis Kelamin, Golongan Umur, Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Jam Kerja, dan Jabatan/Jenis Pekerjaan Utama.

E. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penyusunan rencana tenaga kerja ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Instansi sektoral dan Instansi penyedia data dan informasi lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

F. Pengertian

1. Penduduk Usia Kerja (PUK)
Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
2. Angkatan Kerja (AK)
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. Bekerja
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan

tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

4. Penganggur Terbuka (PT)

Penganggur Terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

5. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

6. Pekerja Tidak Penuh

Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

- a. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia

menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.

8. Jenis Kegiatan/Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

b. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari

tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

10. **Persediaan Tenaga Kerja**

Persediaan tenaga kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.

11. **Kebutuhan Tenaga Kerja**

Kebutuhan akan tenaga kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.

G. Sistematika

Penulisan RTK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI KETENAGAKERJAAN

BAB III : PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

BAB IV : PERKIRAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

BAB V : PERKIRAAN KESEIMBANGAN TENAGA KERJA

BAB VI : KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II

KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Kondisi Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi (bersifat multidimensional) adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*disparity*), dan pengangguran. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sektor swasta (*privat sektor*) dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya.

Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan baik di dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah. Berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan (ketimpangan) wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tidak akan bermanfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan. Beberapa perbedaan antara wilayah dapat dilihat dari beberapa persoalan seperti, potensi wilayah,

pertumbuhan ekonomi, investasi (domestik dan asing), luas wilayah, konsentrasi industri, transportasi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis perkembangan wilayah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) disusun berdasarkan harga yang berlaku

pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.A.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 5,50 | 5,38 | 4,30 | 3,44 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 3,52 | 5,10 | -6,77 | 6,68 |
| 3. Industri Pengolahan | 1,19 | 4,82 | -3,84 | 2,50 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 11,14 | 5,47 | 11,57 | 5,55 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 6,71 | 2,84 | 5,74 | 1,99 |
| 6. Konstruksi | 7,14 | 12,03 | 0,24 | -0,60 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,31 | 8,95 | 0,45 | 7,11 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 8,15 | 6,98 | -3,60 | 0,14 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 11,38 | 7,91 | -4,33 | 2,75 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 8,52 | 8,20 | 6,60 | 7,87 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 8,09 | 5,36 | 0,51 | 7,17 |
| 12. Real Estate | 5,71 | 5,44 | 0,76 | 2,14 |
| 13. Jasa Perusahaan | 3,26 | 2,30 | -0,78 | 2,15 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,53 | 6,68 | 1,07 | 0,25 |
| 15. Jasa Pendidikan | 4,99 | 9,67 | 6,20 | 4,61 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,69 | 9,05 | 10,05 | 8,55 |
| 17. Jasa Lainnya | 5,99 | 8,49 | 9,97 | 6,68 |
| Laju Pertumbuhan | 5,36 | 6,89 | -1,09 | 3,98 |

Sumber : BPS, data diolah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada setiap tahunnya. Analisis pertumbuhan PDRB ADHK (riil) dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan tabel 2.A.1 perekonomian Kalimantan Utara yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Tahun 2018-2021 mengalami perubahan yang fluktuatif. Tahun 2018 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,36 persen dan mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 6,89 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi pada sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 4,89 persen. Hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang masih dalam proses pembangunan, sehingga mendorong peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor konstruksi.

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2019 terendah yaitu pada sector lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dari 11,17 persen pada Tahun 2018 menjadi 5,55 persen pada Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan.

Pertumbuhan rata-rata per tahun di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung bahkan menunjukkan perkembangan negatif. Penurunan ini dipengaruhi oleh kerusakan yang terjadi pada Pembangkit Energi Baru Terbarukan, baik PLTMH, PLTS Terpusat, maupun LTSHE (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Tahun 2020 mengalami minus 1,09 persen. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemic covid 19 yang berdampak terhadap perekonomian di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Dampak yang paling besar PDRB pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami penurunan dari 11,38 persen pada Tahun 2018 menjadi 2,75 persen pada Tahun 2021. Melemahnya daya beli masyarakat secara luas dan PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi sehingga mengurangi laju pertumbuhan pada lapangan usaha tersebut. Namun pada Tahun 2021 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari minus 1,09 persen menjadi 3,98 persen pada tahun 2021. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan langkah strategis dalam menangani pandemic covid-19 sehingga mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan dalam rangka pemulihan ekonomi

dampak pandemic covid-19 secara nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.A.1.

Tabel 2.A.2

Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 17,30 | 17,06 | 17,99 | 17,89 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 27,82 | 27,36 | 25,79 | 26,46 |
| 3. Industri Pengolahan | 9,35 | 9,17 | 8,91 | 8,78 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6. Konstruksi | 12,25 | 12,84 | 13,01 | 12,44 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,81 | 11,02 | 11,19 | 11,53 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 6,45 | 6,45 | 6,29 | 6,06 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,45 | 1,46 | 1,41 | 1,40 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 2,92 | 2,96 | 3,19 | 3,31 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
| 12. Real Estate | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,11 | 5,10 | 5,21 | 5,02 |
| 15. Jasa Pendidikan | 2,39 | 2,45 | 2,63 | 2,65 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,09 | 1,11 | 1,24 | 1,29 |
| 17. Jasa Lainnya | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 0,68 |
| Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PDRB (miliar) | 57.459,31 | 61.417,79 | 60.746,21 | 63.162,97 |

Sumber : BPS, data diolah

Jika dilihat dari Struktur Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi setiap tahunnya dengan kisaran 25,79 persen hingga 27,82. Sumbangan PDRB sektor ESDM di Kalimantan Utara oleh produksi sumber daya pertambangan, minyak, gas dan panas bumi dikelompokkan pada sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Pertumbuhan PDRB Pertambangan dan Galian cenderung berfluktuasi, volatilitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan lifting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian litostratigrafi, struktur geologi, dan karakteristiknya, maka potensi kandungan sumberdaya geologi di Provinsi Kalimantan Utara yang utama adalah: 1) batubara; 2) minyak dan gas bumi; 3) emas, tembaga, timbal dan besi dan potensi tambahan seperti tambang mineral/batuan antara lain: 4) batuan beku andesit, diorit, granit, trakit; 5) batugamping; 6) pasir kuarsa, 7) lempung/batulempung. Batubara banyak tersebar di daerah Tanjung Redep, dengan sekitar 70 horizon atau lapisan batubara dengan nilai panas 6.000-7.000 kalori/gram dan sebagian kecil di daerah Malinau dan Tarakan, sedangkan minyak dan gas bumi banyak ditemukan di lepas pantai (*offshore*) sekitar Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. Kegiatan eksplorasi pada tambang emas diharapkan dapat dikembangkan di daerah Busang, Long Lai, di lembar peta Napaku, serta di daerah Bengara dan Sekatak Buji di lembar

peta Tarakan sebagai endapan plaser (endapan sungai) yang sumber emasnya berasal dari mineral hidrotermal oleh adanya intrusi diorit di daerah tersebut. Potensi tambahan seperti batuan beku andesit, diorit, granit, trakit banyak ditemukan di lembar peta Napaku, Malinau, Lumbis, dan Tanjung Redeb sedangkan batugamping penyebarannya terbatas di daerah lembar peta Tanjung Redeb. Pasir kuarsa dan batulempung banyak tersebar di lembar peta Tanjung Redeb, Tarakan dan Malinau (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Posisi tertinggi kedua penyumbang Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Lapangan usaha tersebut menyumbang sekitar 17,06 persen hingga 17,99 persen.

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Luas wilayah yang sampai saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas mencapai 110.751 hektare.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pertanian di Indonesia, terutama untuk komoditas perkebunan (sawit) dan hasil hutannya. Sehingga lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian. Komoditas pangan yang terdapat di Kalimantan Utara terdiri atas padi, palawija, hortikultura

tanaman dan sayuran, serta perkebunan. Total Produktivitas Tanaman Bahan Komoditas Makanan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 25,79 Kw/Ha pada Tahun 2016 menjadi 34,66 Kw/Ha dengan Total Luas Tanaman Menghasilkan (Panen) Komoditas Padi (Sawah dan Ladang) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 seluas 11.605 Hektar. Di samping budidaya padi, Provinsi Kalimantan Utara juga membudidayakan beberapa jenis palawija berupa jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi komoditas palawija terbesar di Kalimantan Utara adalah Ubi Kayu dengan produksi rata-rata lebih dari 37.000 ton dalam setahun. Produksi sayuran melimpah pada jenis komoditas sawi, kacang panjang, tomat, terong, ketimun dan kangkung dengan produksi rata-rata lebih dari 3000 ton. Produksi Buah-buahan di Kalimantan Utara mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019, yaitu dari total produksi 124.143 Ton menjadi 90.658 Ton (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Perkebunan merupakan salah satu komoditas dalam pertanian arti luas. Di Kalimantan Utara, Meskipun produksi perkebunan tergolong rendah, tetapi sangat potensial untuk dikembangkan. Produktivitas pertanian terbesar adalah komoditi Kelapa Sawit Rakyat yaitu 1900 kg/ha. Luas perusahaan kebun di Kalimantan Utara secara keseluruhan meliputi 156.610 hektare dimana luas kebun kelapa sawit 137.389 hektare dan kakao menempati urutan kedua seluas

11.645 hektare. Tanaman kelapa sawit sebagai lahan perkebunan paling luas di provinsi terdapat di Kabupaten Nunukan dan Bulungan dengan masing-masing luasan di tiap Kabupaten sebesar 33.306 dan 1.268,8 hektar. Namun, luas keseluruhan Kelapa Sawit Rakyat hanya 16 persen dari total luas tanam PBS Kelapa Sawit yang memiliki luas tanam 194.422 hektar (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Selain pertanian dan perkebunan, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar sebagai salah satu provinsi yang memiliki wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta perairan umum lainnya yang sangat luas. Secara keseluruhan, produksi ikan tangkap selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan pertumbuhan rata-rata 17 persen per tahun. Kalimantan Utara memiliki wilayah laut yang luas. Sekitar 94 persen dari produksi perikanan tangkap berasal dari tangkapan laut. Pengembangan budidaya ikan di Kalimantan Utara meliputi budidaya tambak, kolam serta rumput laut. Produksi terbesar dari perikanan budidaya di Kalimantan utara berasal dari rumput laut yang mencapai 523 ribu ton lebih pada tahun 2020 (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Posisi tertinggi ketiga penyumbang Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 yaitu lapangan usaha konstruksi yang berkisar antara 12,25 persen hingga 13,01 persen. Hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang masih dalam proses pembangunan, sehingga

mendorong peningkatan PDRB sektor konstruksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.A.2.

B. Potensi Daerah

1. Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas $\pm 75.467,70$ km² dan berdasarkan batas kewenangan provinsi memiliki luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total). Terletak pada posisi antara 114035'22" – 118003'00" Bujur Timur dan antara 1021'36" - 4024'55" Lintang Utara. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara dengan Sabah dan sebelah Barat dengan Sarawak. Sedangkan sebelah Timur Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuat Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan juga bahwa provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (>56% dari total luasan), sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil

adalah Kota Tarakan (<1% dari total luasan Provinsi Kalimantan Utara).

Pembagian wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Bulungan sebagai Ibukota Provinsi, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Tarakan. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

2. Infrastruktur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama bagi roda pembangunan suatu wilayah. Pendidikan merupakan indikator penting yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah mencerminkan tingginya kualitas sumberdaya manusia, demikian pula sebaliknya. Sumberdaya manusia merupakan penggerak utama bagi roda pembangunan suatu wilayah.

Salah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur pendidikan. Secara

keseluruhan Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Pada periode tersebut Sekolah Dasar terjadi penambahan sebanyak 1 unit, SMTP sebanyak 3 unit, SMTA Umum 1 unit dan SMTA Kejuruan 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Dengan meningkatnya fasilitas Pendidikan maka diharapkan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat, hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat tidak cukup adanya peningkatan lokal sekolah tetapi juga bantuan dalam bentuk dukungan bagi siswa khususnya yang tidak mampu untuk terus menempuh di bangku sekolah khususnya sampai usia 19 tahun.

Tabel 2.B.1

Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Sederajat
di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021

| Tingkat Sekolah | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|------|------|
| SD | 481 | 481 | 482 |
| SMTP | 184 | 184 | 187 |
| SMTA Umum | 66 | 66 | 67 |
| SMTA Kejuruan | 29 | 29 | 32 |
| Diploma | | | |
| Universitas | | | 11 |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

3. Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah diantaranya sumber daya kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian serta pertambangan dan energi.

Kalimantan utara memiliki Kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 persen dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara ± 75.467,70 km². Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan.

Pemanfaatan hutan di Provinsi Kalimantan Utara berupa pemanfaatan hasil kayu dan non kayu. Hasil non kayu berupa tanaman obat, madu, ekstrak tanaman dan lain-lain. Hasil non kayu terus dikembangkan guna mengurangi pemanfaatan hasil kayu. Hal ini disebabkan oleh besarnya potensi hutan Kalimantan Utara yang sangat luas untuk menghasilkan karbon sebagai penyerap CO₂ dan dapat menstabilkan iklim dunia. Hal tersebut akan untuk mendapatkan funding dana.

Hasil hutan kayu dalam skala besar dapat diusahakan lewat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di hutan alam (IUPHHK-HA) maupun hutan tanaman (IUPHHK-HT) oleh perusahaan swasta dan negara. Namun, agar hasil hutan dapat dimanfaatkan dalam jangka

panjang dalam aspek ekonomi maupun ekologi maka hutan harus dikelola dalam praktek pengelolaan secara lestari. Pemerintah mewajibkan (*mandatory*) pengelolaan hutan lestari lewat sertifikasi PHPL/SVLK (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari-Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

Pada tahun 2018 total luas IUPHHK-HA berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah seluas 752.088 Ha dan untuk luas IUPHHK-HT seluas 604.760 Ha. Sehingga total keseluruhannya mencapai 1.356.848 m².

Kalimantan Utara memiliki Vegetasi yang beragam, Tiga vegetasi yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) yang merupakan vegetasi yang memiliki luas lahan terbesar yaitu 14.559.512,04Ha (37,58%). Dilanjutkan vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) memiliki luas wilayah 7.997.258,19 Ha (20,64 %) dan vegetasi hutan pegunungan bawah memiliki luas wilayah 5.258.358,83 Ha (13,57%) (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Selain memiliki sumber daya kehutanan, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan laut. Hal ini menyebabkan melimpahnya hasil laut di wilayah Kalimantan Utara. Hasil produksi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara didominasi dengan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah pesisir yang panjang, hal ini diperjelas dengan panjang garis pantai yang mencapai 3.995 km. Panjang garis pantai tersebut kurang lebih 0,5% dari panjang garis pantai Indonesia, yaitu sepanjang 81.000 km. Selain memiliki pesisir yang cukup panjang, Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki wilayah perairan laut yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar berdasarkan data WPP 716.

Produksi perikanan tangkap perairan umum didominasi oleh Kabupaten Tana Tidung yakni 190,76 Ton, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara jumlah ini cukup berbeda jauh atau signifikan. Tiga kabupaten lainnya yakni Malinau, Bulungan dan Nunukan memiliki jumlah produksi yang tidak terlalu besar, secara berurutan memiliki jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum sebesar 47,79, 177,87 dan 110,05 Ton. Sedangkan Kota Tarakan tidak memiliki produksi perikanan tangkap di perairan umum.

Provinsi Kalimantan Utara sendiri sudah mengembangkan budidaya ikan sejak dekade yang lalu, meskipun tidak terjadi secara merata. Pengembangan budidaya ikan di provinsi ini meliputi budidaya di tambak (kolam air payau), kolam air tawar maupun kegiatan budidaya rumput laut. Perikanan budidaya tambak didominasi oleh empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan,

dan Kota Tarakan. Tahun 2020 produksi perikanan budidaya pada kolam air tenang di dominasi oleh Kabupaten Bulungan yakni sebanyak 119,4 ton. Produksi perikanan budidaya pada tambak sederhana tertinggi tercatat berada di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 7.610,6 ton. Kemudian produksi perikanan budidaya rumput laut terbesar berada di Kabupaten Nunukan dengan jumlah produksi hingga lebih dari 300 ribu ton.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara garis pantai dan wilayah laut 12 mil di Provinsi Kalimantan Utara dengan panjang garis pantai 3.519,19 Km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 Km² atau setara dengan 731.642,77 Ha. Area tambak dengan luas 1.499,58 Km² atau 149.957,88 Ha, yang di bagi dalam 3 area tambak dalam status kawasan hutan terdiri dari tambak dalam APL (Area Penggunaan Lain) dengan luas 78.591,74 Ha, tambak dalam HP (Hutan Produksi) dengan luas 70.706,76 Ha, dan tambak dalam HPK (Hutan Produksi Konversi) dengan luas 659,39 Ha. Area tambak di provinsi Kalimantan Utara tersebar di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, luasan area terluas berada di Kabupaten Tana Tidung (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

Selain sector kehutanan dan perikanan, Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan

menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Luas wilayah yang sampai saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas mencapai 110.751 hektare. Pertanian tanaman pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, hortikultura (sayuran dan buahan).

Kota Tarakan memiliki produktivitas padi paling tinggi yakni sebanyak 39,47 Kw per Ha dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan produktivitas padi di Kabupaten Tana Tidung sebesar 25,91 Kw per Ha masih jauh di bawah rata-rata produktivitas padi Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2019 yaitu sebesar 32,40 Kw per Ha.

Produksi padi pada tahun 2019 secara keseluruhan di 5 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara mencapai 33.357,19 ton sehingga produktivitas berkisar 32,40 kw per hektar. Sedangkan untuk produksi beras secara keseluruhan tahun 2019 di provinsi ini sebesar 19.673,52 ton, hal ini mengalami penurunan yang cukup signifikan apabila dibanding tahun 2018 mencapai 26.577,74 ton.

Luas lahan panen paling besar terdapat di Kabupaten Nunukan dengan total luasan mencapai 3.875 ha pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2018 mencapai >5.000 ha. Jika dibanding kabupaten/kota lainnya Kabupaten Nunukan menjadi penyumbang lahan panen terbesar di Provinsi Kalimantan Utara.

Lahan panen untuk pemanfaatan pertanian dengan komoditas palawija di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi jenis tanaman jagung dan kedelai. Di Provinsi Kalimantan Utara jumlah komoditas palawija yang paling banyak ditanami adalah jagung dan ubi kayu. Ditinjau dari kontribusi tiap daerahnya, Kabupaten Bulungan memberikan kontribusi produksi jagung yang paling besar diikuti dengan Kabupaten Nunukan yang juga berkontribusi cukup tinggi dalam memproduksi jagung. Tingginya kontribusi areal penanaman palawija di Kabupaten Nunukan terbesar ditanami oleh komoditas ubi kayu, dengan total produksi mencapai 27.088 ton pada tahun 2019.

Namun selain tanaman palawija, Provinsi Kalimantan Utara juga memanfaatkan lahannya untuk memproduksi tanaman cabai. Produksi cabai tertinggi berada di Kota Tarakan yang mencapai total produksi sebesar 29.961 ton di tahun 2019 dan 20.241 ton di tahun 2020.

Komoditas perkebunan meliputi kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi yang belum diusahakan secara intensif, kecuali kelapa sawit, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat petani dan sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Komoditas perkebunan tersebut ada yang diusahakan dalam bentuk perkebunan swasta besar khususnya kelapa sawit dan lainnya sebagai kebun rakyat. Luas perusahaan kebun di Kalimantan Utara secara keseluruhan meliputi 156.610 hektare dimana luas kebun kelapa sawit 137.389 hektare

dan kakao menempati urutan kedua seluas 11.645 hektare. Luas perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara khususnya karet dan kelapa sawit pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan. Pada saat ini kebun karet pada umumnya Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Luas perkebunan terluas terdapat di kabupaten Nunukan seluas 77.847 hektare diikuti di kabupaten Bulungan seluas 41.567 hektare, dan terkecil di Tarakan seluas 637 hektare.

Selama tahun 2020 menunjukkan komoditas perkebunan kelapa sawit dan kakao mendominasi produksi hasil perkebunan di Provinsi Kalimantan Utara. Pada jenis tanaman kelapa sawit mencapai total produksi hingga 62.475,8 ton sedangkan untuk tanaman kakao mencapai total produksi 1.039,26 ton. Namun selain kelapa sawit dan kakao, hasil perkebunan lainnya seperti karet, kopi, kelapa dan tebu tidak merata di setiap wilayah provinsi ini. Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara dapat mengalami kenaikan dikarenakan peningkatan luas tanam kelapa sawit dan karet yang akan memberikan kontribusi positif.

Kalimantan Utara juga memiliki potensi yang baik dalam bidang pertambangan, menurut nilai Bruto hasil tambang, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan daerah dari sector pertambangan. Kalimantan utara juga memiliki lahan yang cukup luas, yang dapat dilakukannya kegiatan pertambangan.

Potensi energi yang tersedia di Provinsi Kalimantan Utara cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Kalimantan Utara. Energi listrik dan air tersedia di Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah pelanggan listrik pada periode 2015 – 2018 juga mengalami kenaikan dari 107.402 pada Tahun 2015 menjadi 141.489 pada Tahun 2018.

Di Provinsi Kalimantan Utara ini air menjadi bagian dari kekayaan alam dan sebagai sumber mata pencaharian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Air tentunya memiliki banyak manfaat atau kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dan tentunya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA). Pembangunan PLTA telah di Provinsi Kalimantan Utara telah direncanakan dalam agenda prioritas pembangunan daerah meliputi PLTA Sungai Kayan dan Mentarang (RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026).

4. Kawasan Ekonomi

a. Realisasi Investasi

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Indikator nilai investasi berskala nasional merupakan indikator yang menggambarkan besaran nilai penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal berskala nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Utara baik yang berstatus PMDN maupun PMA.

Berdasarkan Tabel 2.B.2 diketahui nilai investasi meningkat dari sebanyak Rp. 2.265.911.028.500 (494 proyek) pada tahun 2018 menjadi 5.741.032.240.000 (951 proyek) di tahun 2021. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 15.078 orang pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 3.054 orang.

Tabel 2.B.2

Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha, Nilai Investasi, Jumlah Proyek dan Kebutuhan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021

| Tahun | Sektor Usaha | | | Investasi | | Kebutuhan Tenaga Kerja | Penyerapan Tenaga Kerja | | |
|-------|--------------|----------|---------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----|-------|
| | Primer | Sekunder | Tersier | Nilai | Jumlah Proyek | | TKI | TKA | TOTAL |
| 2018 | 122 | 196 | 176 | Rp 2.265.911.028.500 | 494 | | 14614 | 262 | 15078 |
| 2019 | 107 | 98 | 156 | Rp 5.625.959.800.000 | 361 | | 4608 | 209 | 4817 |
| 2020 | 130 | 97 | 211 | Rp 3.220.577.840.000 | 438 | | 2842 | 103 | 2945 |
| 2021 | 196 | 116 | 639 | Rp 5.741.032.240.000 | 951 | | 3047 | 7 | 3054 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara

C. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 Tahun keatas. Kuantitas dan tren PUK ini tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi. Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 mengalami tren meningkat. Tahun 2018 Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara mencapai 496.074 orang mengalami peningkatan setiap

tahunnya hingga tahun 2021 mencapai 535.007 orang hal ini disebabkan adanya perpindahan penduduk (migrasi) mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonomi Baru. Untuk lebih jelasnya berikut bahasan mengenai PUK menurut karakteristik yang mencakup jenis usia, Pendidikan, jenis kelamin dan kabupaten/kota.

1. Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Selama periode 2018-2021 hampir di semua golongan umur mengalami peningkatan kecuali golongan umur 25-29 tahun yang berfluktuasi. Golongan umur 15-19 tahun yang tidak melihat peningkatan cukup signifikan bisa dikarenakan penambahan penduduk secara alami dikarenakan program KB antara 15-20 tahun yang lalu. Golongan umur lainnya yang mengalami peningkatan tertinggi golongan umur 55-59 tahun dan 60 tahun keatas masing-masing sebesar 20,97 persen dan 18,48 persen. Peningkatan pada golongan umur tua ini tentu saja sangat dipengaruhi semakin meningkatnya layanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara di bidang kesehatan diantaranya upaya pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan penyakit, cedera serta gangguan fisik dan mental lainnya.

Sementara Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru juga kedatangan (migrasi masuk) penduduk dari luar Kalimantan Utara melalui penempatan dalam pekerjaan atau transmigrasi. Pada tahun 2018 Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara terbanyak terdapat pada golongan

umur 25-29 Tahun sebanyak 61.878 orang atau 12,47 persen namun pada tahun 2019 proporsi PUK terbanyak pada golongan umur 20-24 tahun sebanyak 60.503 orang atau 11,84 persen dan secara proporsi PUK kelompok umur 20-24 pada Tahun 2020 (11,69%) masih yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada Tahun 2021, bergeser PUK kelompok umur 25-29 tahun (11,56%) menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.C.1.

Tabel 2.C.1

Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Golongan Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15-19 | 56.904 | 60.316 | 60.569 | 61.155 |
| 20-24 | 56.864 | 60.503 | 61.104 | 61.281 |
| 25-29 | 61.878 | 59.878 | 60.707 | 61.872 |
| 30-34 | 54.866 | 56.304 | 57.174 | 58.088 |
| 35-39 | 53.616 | 53.642 | 54.541 | 55.389 |
| 40-44 | 49.838 | 50.102 | 51.255 | 52.312 |
| 45-49 | 44.260 | 45.224 | 46.145 | 47.178 |
| 50-54 | 37.704 | 39.198 | 40.905 | 42.085 |
| 55-59 | 27.739 | 30.359 | 31.784 | 33.555 |
| 60-64 | 21.250 | 21.827 | 22.914 | 24.511 |
| 65+ | 31.155 | 33.594 | 35.734 | 37.581 |
| Jumlah | 496.074 | 510.947 | 522.832 | 535.007 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

Pada periode Tahun 2018-2019, PUK kelompok 25-29 tahun mengalami penurunan yang cukup besar sebanyak 2.000 orang. Hal ini disebabkan adanya migrasi keluar penduduk Provinsi Kalimantan Utara dalam kelompok umur tersebut untuk melanjutkan studi maupun bekerja di luar Provinsi Kalimantan Utara.

2. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara menurut tingkat pendidikan menunjukkan jumlah terbesar terdapat pada PUK berpendidikan Maksimum Sekolah Dasar. Proporsi penduduk yang berpendidikan maksimum Sekolah Dasar Tahun 2018 mencapai 174.417 orang atau 35,16 persen meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 185.771 orang atau 36,36 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebanyak 182.760 orang atau 34,96 persen dan kembali mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 173.954 orang. Penurunan proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini mendorong peningkatan proporsi PUK yang berpendidikan di atasnya (SMTA s/d Universitas). Dengan masih besarnya proporsi PUK yang berpendidikan maksimum SD ini menunjukkan tingkat kualitas penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara masih relatif rendah.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara yang berpendidikan Diploma mengalami penurunan dari sebanyak 16.387 orang (3,30%) pada Tahun 2018 menjadi 14.215 orang (2,66%) pada Tahun 2021. Hal ini

menunjukkan berkurangnya minat masyarakat untuk menempuh Pendidikan Diploma.

Sementara PUK yang berpendidikan Universitas mengalami kenaikan setiap tahunnya, Tahun 2018 mencapai 41.081 orang meningkat pada Tahun 2019 menjadi 44.599 orang, kemudian mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2020 menjadi 46.569 orang serta pada Tahun 2021 meningkat menjadi 57.126 orang. Dengan semakin meningkatnya PUK berpendidikan universitas maka diharapkan kualitas tenaga kerja semakin meningkat. Seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.C.2

Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimum SD | 174.417 | 185.771 | 182.760 | 173.954 |
| SMTP | 93.009 | 111.325 | 107.285 | 107.172 |
| SMTA Umum | 124.231 | 113.169 | 122.624 | 128.036 |
| SMTA Kejuruan | 46.949 | 42.490 | 48.055 | 54.504 |
| Diploma | 16.387 | 13.593 | 15.539 | 14.215 |
| Universitas | 41.081 | 44.599 | 46.569 | 57.126 |
| Jumlah | 496.074 | 510.947 | 522.832 | 535.007 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

3. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Selama periode Tahun 2018-2021 jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara lebih besar dibandingkan PUK perempuan. Selama periode tersebut jumlah PUK laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan, namun proporsi PUK laki-laki mengalami penurunan sebaliknya PUK perempuan mengalami peningkatan. Apabila dilihat peningkatannya dari Tahun 2018-2021 PUK laki-laki bertambah sebanyak 18.733 orang dan PUK perempuan bertambah sebanyak 20.200 orang (8,7%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.C.3.

Tabel 2.C.3

Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Jenis Kelamin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laki-laki | 267.075 | 273.936 | 279.888 | 285.808 |
| Perempuan | 228.999 | 237.011 | 242.944 | 249.199 |
| Jumlah | 496.074 | 510.947 | 522.832 | 535.007 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

4. Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara menurut Kabupaten/Kota didominasi oleh Kota Tarakan. Tahun 2018 PUK Kota Tarakan menempati urutan tertinggi sebanyak 186.794 orang atau 37,65 persen dan mengalami peningkatan secara jumlahnya menjadi

199.688 orang, namun secara proporsi mengalami penurunan menjadi 37,32 persen pada Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Kota Tarakan lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan didukung oleh tingginya kegiatan perekonomian di Kota Tarakan serta banyak Perguruan Tinggi yang menjadikan Kota Tarakan sebagai pusat study di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Kabupaten Nunukan menempati urutan kedua tahun 2018 sebanyak 135.270 orang (27,27%) meningkat menjadi 149.958 orang (28,03%) pada tahun 2021.

Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten dengan jumlah PUK terendah pada tahun 2018. Hal ini disebabkan Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling rendah sehingga kegiatan perekonomian masih terbatas serta Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah pemekaran termuda diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Bertambahnya PUK di masing-masing kabupaten menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk menyiapkan lapangan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.C.4.

Tabel 2.C.4

Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malinau | 58.761 | 60.874 | 62.162 | 63.864 |
| Bulungan | 96.422 | 97.471 | 98.485 | 99.451 |
| Tana Tidung | 18.827 | 19.837 | 20.914 | 22.046 |
| Nunukan | 135.270 | 141.696 | 145.828 | 149.958 |
| Kota Tarakan | 186.794 | 191.069 | 195.443 | 199.688 |
| Jumlah | 496.074 | 510.947 | 522.832 | 535.007 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya jumlahnya besar. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi maupun faktor demografis. Beberapa faktor demografis yang dianggap penting pengaruhnya terhadap TPAK adalah jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 sebesar 66,87 persen dan menurun pada Tahun 2019 menjadi 65,59 persen dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 66,81 persen serta mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 66,24 persen.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Secara Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara menurut berbagai golongan umur dari Tahun 2018-2021 mengalami pola yang berbeda-beda. Pada periode tersebut TPAK usia 15-39 tahun mengalami fluktuasi cenderung menurun. TPAK golongan umur 15-19 tahun pada tahun 2018 sebesar 26,29 persen berfluktuasi cenderung menurun menjadi 24,81 persen pada tahun 2021. Demikian juga TPAK golongan umur 20-24 tahun juga mengalami fluktuasi cenderung menurun pada periode tersebut. Penurunan TPAK golongan umur 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun pada periode tersebut menunjukkan bahwa semakin baiknya pemanfaatan program wajib belajar 9 tahun sehingga kelompok usia tersebut masuk ke dalam kelompok bukan Angkatan kerja dengan kegiatan sekolah/pendidikan.

Sementara TPAK golongan umur 50 tahun keatas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut masih aktif dalam kegiatan ekonomi. Meningkatnya TPAK usia lanjut dapat disebabkan karena meningkatnya tingkat harapan hidup atau karena profesionalisme kerja.

Tabel 2.D.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021 (%)

| Golongan Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15-19 | 26,29 | 21,44 | 28,48 | 24,81 |
| 20-24 | 63,89 | 68,80 | 61,46 | 63,76 |
| 25-29 | 76,81 | 73,36 | 71,59 | 72,85 |
| 30-34 | 79,44 | 73,92 | 74,62 | 72,22 |
| 35-39 | 80,40 | 77,14 | 80,06 | 77,78 |
| 40-44 | 79,77 | 80,52 | 83,74 | 84,16 |
| 45-49 | 81,11 | 81,51 | 80,52 | 82,50 |
| 50-54 | 76,74 | 77,89 | 78,48 | 80,10 |
| 55-59 | 67,18 | 70,88 | 71,92 | 72,51 |
| 60-64 | 43,88 | 43,98 | 52,70 | 53,92 |
| TPAK | 66,87 | 65,59 | 66,51 | 66,24 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Secara Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara menurut pendidikan dari Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada periode 2018-2021 tingkat pendidikan SMTA kejuruan lebih tinggi dibandingkan tingkat Pendidikan SMTA umum. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki lulusan SMTA Kejuruan menjadi alasan mereka lebih aktif dalam kegiatan ekonomi dibanding SMTA Umum, selain itu lulusan SMTA

Umum mempunyai kecenderungan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

TPAK lulusan universitas menempati urutan tertinggi. Tingginya TPAK ini dapat dimaklumi karena dengan tingkat pendidikan tinggi karena orang akan terus berusaha untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan agar status sosial di masyarakat lebih baik. TPAK pendidikan maksimum SD masih cukup tinggi dengan kecenderungan fluktuatif. Tahun 2018 TPAK Pendidikan ini sebesar 60,52 persen meningkat menjadi 62,17 persen ditahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 63,29 persen serta pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 62,54 persen. Besarnya TPAK berpendidikan maksimal SD karena pada umumnya angkatan kerja yang berpendidikan maksimal SD terdapat pada golongan umur tua.

Berdasarkan data TPAK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 menggambarkan kondisi angkatan kerja yang tersedia memiliki kualitas yang tinggi dengan ditandai oleh tingginya persentase TPAK yang berasal dari tamatan Universitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.D.2.

Tabel 2.D.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021 (%)

| Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maksimum SD | 60,52 | 62,17 | 63,29 | 62,54 |
| SMTp | 51,43 | 47,29 | 50,33 | 52,60 |
| SMTA Umum | 72,42 | 72,95 | 71,08 | 66,37 |
| SMTA Kejuruan | 75,09 | 75,32 | 73,78 | 75,45 |
| Diploma | 87,18 | 89,36 | 85,91 | 83,79 |
| Universitas | 94,50 | 90,29 | 90,42 | 89,65 |
| TPAK | 66,87 | 65,59 | 66,51 | 66,24 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Secara Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara menurut jenis kelamin dari Tahun 2018-2021 didominasi oleh TPAK laki-laki yang mengalami fluktuasi cenderung menurun. TPAK laki-laki Tahun 2018 mencapai 81,82 persen meningkat pada Tahun 2019 menjadi 83,26 persen dan menurun menjadi 82,91 persen pada tahun 2020 serta menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 81,75 persen. Sedangkan TPAK perempuan mengalami besaran yang cukup berfluktuasi setiap tahunnya, Tahun 2018 mencapai 49,44 persen menurun pada Tahun 2019 menjadi 45,16 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2020 menjadi 47,62 persen

serta meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 48,44 persen.

Pada tahun 2020-2021 TPAK laki-laki mengalami penurunan, sementara TPAK perempuan mengalami peningkatan. Tahun 2020 kondisi pandemic covid-19 diberlakukan pembatasan, sehingga terjadi sedikit penurunan aktifitas ekonomi yang pada akhirnya banyak penduduk yang bekerja kehilangan pekerjaan khususnya untuk laki-laki. Pada masa pandemic perempuan aktif dalam pasar kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Peran ganda mereka dalam rumah tangga dan komitmen mereka untuk aktif di dalam pasar kerja. Perempuan cenderung keluar dari pasar kerja ketika masa perkawinan, melahirkan dan membesarkan anak dan kemudian kembali ke dunia kerja ketika anak-anak sudah besar. Selain itu semakin terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan di berbagai sektor akan diikuti oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.D.3.

Tabel 2.D.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021 (%)

| JenisKelamin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Laki-laki | 81,82 | 83,26 | 82,91 | 81,75 |
| Perempuan | 49,44 | 45,16 | 47,62 | 48,44 |
| TPAK | 66,87 | 65,59 | 66,51 | 66,24 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Secara Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara menurut Kabupaten/Kota dari Tahun 2018-2021 didominasi oleh TPAK Kabupaten Malinau pada Tahun 2018 mencapai 75,04 persen, menurun pada Tahun 2019 menjadi 68,29 persen dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 66,44 persen serta meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 71,49 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Nunukan dan Bulungan. Berdasarkan data TPAK setiap Kabupaten/kota menunjukkan TPAK Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi dari Tahun 2018 ke Tahun 2021 seperti yang terlihat pada Tabel 2.D.4.

Tabel 2.D.4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021 (%)

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Malinau | 75,04 | 68,29 | 66,44 | 71,49 |
| Bulungan | 68,58 | 66,21 | 67,38 | 68,62 |
| Tana Tidung | 62,18 | 64,50 | 67,81 | 67,35 |
| Nunukan | 71,83 | 67,14 | 66,91 | 66,11 |
| Kota Tarakan | 60,30 | 63,37 | 65,65 | 63,34 |
| TPAK | 66,87 | 65,59 | 66,51 | 66,24 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

E. Angkatan Kerja

Secara struktur angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja berumur 15 Tahun keatas, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 331.729 orang dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi **335.108** orang dan naik kembali pada Tahun 2020 menjadi **347.731** orang serta pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi **354.376 orang**. Secara umum struktur angkatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik yang secara rinci dipaparkan pada uraian berikut.

1. Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Bila dilihat dari sisi golongan umur angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya mengalami peningkatan kecuali golongan umur 25-39 tahun yang berfluktuasi cenderung menurun. Berfluktuasinya Angkatan kerja pada golongan umur tersebut bukan dipengaruhi oleh penduduk usia kerja, namun semata-mata dari minat PUK. PUK golongan umur 25-39 tahun merupakan usia produktif sehingga mereka aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tanggungjawab ekonomi terhadap keluarga. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jumlah PUK yang selalu meningkat pada golongan umur 25-39 tahun. Sementara golongan umur 15-24 tahun jumlah angkatan kerja berfluktuasi cenderung meningkat. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari

pemerintah karena golongan umur tersebut merupakan usia sekolah. Untuk mendorong golongan umur 15-24 tahun tetap bertahan dalam kelompok bukan usia kerja maka pemerintah perlu mempertahankan di bangku sekolah.

Golongan umur 55 tahun keatas proporsinya meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 41.628 orang (12,55%) meningkat menjadi 53.366 orang (15,06%) pada tahun 2021. Angkatan kerja golongan umur 55 Tahun ke atas cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin membaiknya pelayanan kesehatan menjadikan golongan umur tersebut lebih produktif sehingga mereka tetap berada di kelompok angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.E.1.

Tabel 2.E.1
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Golongan Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15-19 | 14.958 | 12.931 | 17.252 | 15.174 |
| 20-24 | 36.332 | 41.626 | 37.552 | 39.070 |
| 25-29 | 47.529 | 43.925 | 43.463 | 45.071 |
| 30-34 | 43.584 | 41.621 | 42.666 | 41.950 |
| 35-39 | 43.108 | 41.379 | 43.665 | 43.084 |
| 40-44 | 39.756 | 40.343 | 42.919 | 44.025 |
| 45-49 | 35.899 | 36.860 | 37.155 | 38.924 |
| 50-54 | 28.935 | 30.532 | 32.102 | 33.712 |
| 55-59 | 18.634 | 21.518 | 22.860 | 24.332 |
| 60-64 | 22.994 | 24.373 | 13.099 | 14.267 |
| 65+ | 0 | 0 | 14.998 | 14.767 |
| Jumlah | 331.729 | 335.108 | 347.731 | 354.376 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

2. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari sisi tingkat pendidikan angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 didominasi oleh yang berpendidikan maksimum Sekolah Dasar (SD), selama periode tersebut jumlahnya mengalami fluktuasi cenderung meningkat sedangkan proporsinya mengalami fluktuasi cenderung menurun. Peningkatan Angkatan kerja berpendidikan maksimal SD sangat terkait dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang berusia lanjut karena pada umumnya PUK berpendidikan maksimal SD adalah PUK berusia lanjut yang tidak mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di bangku sekolah. Pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 105.564 orang (31,82%) naik pada tahun 2019 menjadi 115.489 orang (34,46%) dan secara jumlah naik kembali pada tahun 2020 menjadi 115.663 orang (33,26%) dan menurun pada tahun 2021 menjadi 108.790 (30,70%). Tingginya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD disebabkan karena masih banyaknya usia lanjut (55 tahun keatas) yang berpendidikan rendah dan masih aktif secara ekonomi.

Angkatan kerja dari tingkat pendidikan SMTP sampai dengan Diploma cenderung fluktuatif. Peningkatan angkatan kerja terjadi pada tingkat pendidikan sarjana, dari semula sebanyak 38.822 orang (11,70%) pada tahun 2018 menjadi 51.214 orang (14,45%) pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas angkatan kerja dan kebutuhan pendidikan tinggi untuk pasar kerja di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.E.2

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimum SD | 105.564 | 115.489 | 115.663 | 108.790 |
| SMTA | 47.834 | 52.649 | 53.999 | 56.368 |
| SMTA Umum | 89.969 | 82.554 | 87.156 | 84.972 |
| SMTA Kejuruan | 35.253 | 32.002 | 35.454 | 41.121 |
| Diploma | 14.287 | 12.147 | 13.350 | 11.911 |
| Universitas | 38.822 | 40.267 | 42.109 | 51.214 |
| Jumlah | 331.729 | 335.108 | 347.731 | 354.376 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

3. Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Selama periode 2018-2021 angkatan kerja laki-laki secara jumlah mengalami peningkatan setiap tahunnya namun secara proporsi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai 218.517 orang (65,87%) mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 menjadi 233.657 orang (65,93%). Sedangkan Angkatan kerja perempuan mengalami fluktuasi selama periode tersebut pada tahun 2018 mencapai 113.212 orang (34,13%) berfluktuasi hingga pada tahun 2021 menjadi 120.719 orang (34,07%). Secara jumlah angkatan kerja perempuan pada periode tersebut mengalami peningkatan sebanyak 7.507 orang. Kenaikan angkatan kerja perempuan tersebut secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

meningkatnya tingkat pendidikan perempuan dan berkembangnya teknologi peralatan rumah tangga yang mendorong perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dipasar kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.E.3.

Tabel 2.E.3

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Jenis Kelamin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laki-Laki | 218.517 | 228.075 | 232.049 | 233.657 |
| Perempuan | 113.212 | 107.033 | 115.682 | 120.719 |
| Jumlah | 331.729 | 335.108 | 347.731 | 354.376 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

4. Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Bila dilihat dari Kabupaten/Kota angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 didominasi oleh Kota Tarakan yang diikuti oleh Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Angkatan kerja kota Tarkan pada tahun 2018 mencapai 112.638 orang (33,95%) dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2021 mencapai 126.491 orang (35,69%). Data tahun 2020 hampir semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan angkatan kerja dari tahun sebelumnya, seperti kota Tarakan mengalami kenaikan sebanyak 7.239 orang, Kabupaten Nunukan 2.441 orang, Kabupaten Tana Tidung 1.386 orang dan Kabupaten Bulungan sebanyak 1.830 orang. Kenaikan angkatan kerja

beberapa kabupaten/kota pada tahun 2020 mengindikasinya adanya perpindahan kelompok bukan angkatan kerja menjadi aktif dalam kegiatan ekonomi (angkatan kerja). Penambahan angkatan tersebut disebabkan bertambahnya lulusan sekolah/ pendidikan dan orang yang tadinya mengurus rumah tangga menambah perannya ikut kegiatan berwirausaha/ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.E.3.

Tabel 2.E.4

Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malinau | 44.097 | 41.573 | 41.300 | 45.659 |
| Bulungan | 66.125 | 64.532 | 66.362 | 68.246 |
| Tana Tidung | 11.707 | 12.795 | 14.181 | 14.848 |
| Nunukan | 97.162 | 95.129 | 97.570 | 99.132 |
| Kota Tarakan | 112.638 | 121.079 | 128.318 | 126.491 |
| Jumlah | 331.729 | 335.108 | 347.731 | 354.376 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

F. Penduduk Yang Bekerja

Secara konsep bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2018 penduduk yang bekerja mencapai 314.776 orang dan naik pada Tahun 2019 menjadi 320.046 orang dan naik kembali pada Tahun 2020 menjadi 330.441 orang serta naik kembali tahun 2021 menjadi 338.152 orang.

1. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Jika dilihat dari segi lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 didominasi oleh lapangan usaha pertanian dan diikuti oleh jasa serta lapangan usaha perdagangan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2018 sebanyak 84.752 orang (26,92%) dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 102 999 orang (30,46%). Hal ini disebabkan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Luas wilayah yang sampai saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas mencapai 110.751 hektare sehingga dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas membuka lapangan usaha pada sector tersebut.

Penduduk yang bekerja pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan terbesar kedua yang secara jumlah mengalami peningkatan sebanyak 53.400 orang tahun 2018 menjadi 55.490 orang pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan adanya pelabuhan yang terdapat di Kabupaten

Nunukan sebagai pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan antar Negara.

Penduduk yang bekerja di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menempati urutan terbesar ketiga, hal ini disebabkan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Daerah Otonomi Baru sehingga banyak penempatan PNS maupun tenaga honorer yang meningkatkan lapangan usaha sektor tersebut.

Penduduk yang bekerja di sektor real estate penempatan urutan terendah, hal ini disebabkan karena sektor tersebut belum berkembang di Provinsi Kalimantan Utara dan salah satu dampak pandemic covid-19 yang menghambat kemajuan pada sector real estate seperti yang terlihat pada periode tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 377 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.F.1

Tabel 2.F.1

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 84.752 | 99.597 | 103.368 | 102.999 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 10.319 | 10.991 | 10.811 | 10.603 |
| 3. Industri Pengolahan | 26.415 | 25.487 | 25.883 | 27.472 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 1.649 | 1.331 | 791 | 1.682 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 805 | 777 | 462 | 689 |
| 6. Konstruksi | 16.683 | 17.513 | 19.666 | 17.166 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 53.400 | 49.700 | 58.482 | 55.490 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 16.048 | 14.768 | 16.119 | 17.810 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 14.775 | 16.799 | 13.152 | 14.707 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 3.586 | 2.122 | 2.995 | 3.517 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 8.459 | 4.693 | 3.453 | 4.450 |
| 12. Real Estate | 0 | 480 | 763 | 386 |
| 13. Jasa Perusahaan | 3.299 | 4.589 | 3.163 | 4.564 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 36.966 | 32.313 | 32.033 | 34.111 |
| 15. Jasa Pendidikan | 21.044 | 21.469 | 19.670 | 21.539 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7.729 | 7.368 | 8.602 | 9.394 |
| 17. Jasa Lainnya | 8.847 | 10.049 | 11.028 | 11.573 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur

Jika dilihat dari golongan umur, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 tertinggi pada golongan umur 25-29 tahun diikuti oleh 35-39 Tahun serta golongan umur 30-34 Tahun. Selama periode tahun 2018-2021 penduduk yang bekerja kelompok umur 25-49 tahun berfluktuasi. Penduduk yang bekerja golongan umur 25-29 tahun mengalami perubahan yang cukup fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2018 golongan umur 25-29 tahun mencapai 44.601 orang (14,17%), menurun tahun 2019 menjadi 40.776 (12,74%) dan menurun kembali tahun 2020 menjadi 40.735 (12,33%) dan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 41.266 orang (12,20%).

Jumlah penduduk yang bekerja usia 20-24 mengalami penurunan cukup besar dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2.512 orang. Hal ini disebabkan berkurangnya kesempatan kerja akibat dampak covid 19 sehingga banyaknya penduduk usia tersebut yang tidak terserap dalam pasar kerja.

Tabel 2.F.2

Penduduk Yang Bekerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| GolonganUmur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15-19 | 13.070 | 10.672 | 14.976 | 12.401 |
| 20-24 | 31.795 | 35.301 | 32.789 | 33.902 |
| 25-29 | 44.601 | 40.776 | 40.735 | 41.266 |
| 30-34 | 41.243 | 40.641 | 41.025 | 41.180 |
| 35-39 | 41.640 | 39.858 | 42.122 | 42.087 |
| 40-44 | 38.029 | 40.141 | 41.757 | 42.997 |
| 45-49 | 35.749 | 36.784 | 36.385 | 37.955 |
| 50-54 | 27.743 | 30.150 | 31.175 | 33.248 |
| 55-59 | 18.066 | 21.479 | 22.167 | 24.082 |
| 60-64 | 22.840 | 24.244 | 27.310 | 14.267 |
| 65+ | 0 | 0 | 14.616 | 14.767 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

3. Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia selain dapat dilihat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, juga dapat dilihat dari Human Development Index. Sejalan dengan membaiknya perekonomian memberikan dampak positif terhadap tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Kondisi tersebut disatu sisi tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja lulusan universitas yang diharapkan terus meningkat

dan dalam periode empat tahun terakhir telah menunjukkan hal tersebut, dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja lulusan universitas mencapai 36.459 orang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 mencapai 49.002 orang.

Jika dilihat dari secara keseluruhan penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) menempati urutan pertama di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018-2021. Meskipun masih menduduki peringkat pertama dari segi kuantitas namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan sentimen positif yaitu terjadi penurunan setiap tahunnya. Tahun 2019 penduduk yang bekerja maksimum SD sebesar 35,15 persen menurun pada Tahun 2020 menjadi 34,02 persen dan menurun kembali pada Tahun 2021 menjadi 31,63 persen. Ini sangat berarti bagi dunia pendidikan karena Program Pendidikan Dasar 9 Tahun telah menunjukkan hasil yang baik meskipun mungkin masih jauh dari target, tapi telah dapat dikategorikan sebagai momentum yang tepat untuk hasil yang lebih dimasa datang. Pada tingkat pendidikan SMTP Tahun 2018 mencapai 14,39 persen dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2021 mencapai 15,86 persen. Penduduk yang bekerja berpendidikan SMTA sampai dengan lulusan diploma masih tetap berfluktuasi selama periode tahun 2018-2021.

Kondisi tersebut disebabkan semakin meningkatnya jumlah pencari kerja lulusan perguruan tinggi, sementara

lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sangat terbatas, maka mereka menerima jenis pekerjaan pada tingkatan yang lebih rendah. Demikian juga bagi mereka yang berpendidikan dibawahnya seperti diploma, SMTA umum/kejuruan dan SMTP menerima jenis pekerjaan pada level bawahnya demi memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia yaitu bekerja.

Tabel 2.F.3

Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimum SD | 102.297 | 112.484 | 112.414 | 106.947 |
| SMTP | 45.300 | 49.413 | 51.291 | 53.621 |
| SMTA Umum | 83.481 | 77.488 | 82.085 | 79.786 |
| SMTA Kejuruan | 33.826 | 30.227 | 31.966 | 37.891 |
| Diploma | 13.413 | 11.723 | 13.127 | 10.905 |
| Universitas | 36.459 | 38.711 | 39.558 | 49.002 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.F.4 menyajikan informasi jumlah pekerja menurut jenis kelamin. Selama periode tahun 2018-2021 jumlah penduduk yang bekerja jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki mencapai

207.381 orang sedangkan perempuan mencapai 107.395 orang. Hal ini disebabkan karena laki-laki bertanggungjawab untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya sehingga lebih banyak penduduk laki-laki yang bekerja. Selama periode tahun 2018-2021 jumlah penduduk yang bekerja jenis kelamin laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Secara persentase proporsi pekerja laki-laki untuk periode 2018-2021 cenderung meningkat sementara untuk pekerja perempuan cenderung menurun. Pada tahun 2018 terdapat 65,88 persen pekerja laki-laki dan meningkat menjadi 66,04 persen pada tahun 2021. Sementara untuk pekerja perempuan persentase menurun menjadi 33,96 persen di tahun 2021 dari 34,12 persen di tahun 2018.

Tabel 2.F.4

Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Jenis Kelamin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laki-Laki | 207.381 | 219.536 | 220.228 | 223.308 |
| Perempuan | 107.395 | 100.510 | 110.213 | 114.844 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

5. Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Secara umum status pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) besaran utama yakni sektor formal (kegiatan ekonomi formal) dan sektor informal (kegiatan ekonomi informal). Sektor formal terdiri dari mereka yang berusaha dengan buruh tetap dan pekerja/buruh/karyawan. Sedangkan sektor informal terdiri atas mereka yang berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu buruh tetap, pekerja bebas di sektor non pertanian, dan pekerja tak dibayar.

Adanya kecenderungan perubahan perekonomian ternyata ikut mendorong peningkatan proporsi penduduk yang bekerja dengan status formal. Penduduk yang bekerja sebagai pekerja/buruh/karyawan menempati urutan pertama pada tahun 2018 mencapai 167.640 orang atau 53,26 persen diikuti oleh Berusaha Sendiri tanpa bantuan sebanyak sementara 63.412 orang atau 20,15 persen kemudian disusul oleh pekerja keluarga/pekerja tak dibayar sebesar 29.673 orang atau 9,43 persen. Namun pada periode tahun 2019-2021 proporsi pekerja/buruh/karyawan mengalami fluktuasi, dimana tahun 2019 mencapai 48,80 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 44,80 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 mencapai 46,11 persen. Salah satu penyebab penurunan jumlah pekerja/buruh/karyawan dampak pandemic covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam

kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Penduduk yang terdampak Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebanyak 71.455 orang, 62.887 orang diantaranya mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Sedangkan 1.141 orang merupakan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Utara, Agustus 2020).

Penduduk yang bekerja di Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 dalam sektor formal lebih tinggi persentasinya dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor informal. Tahun 2018 penduduk yang bekerja dalam sektor formal sebesar 57,05 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 53,31 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 49,07 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 49,26 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor informal cukup berfluktuasi, tahun 2018 mencapai 42,95 persen dan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 46,69 persen serta mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2020 menjadi 50,93 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 50,74 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.F.5

Tabel 2.F.5

Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Status PekerjaanUtama | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Brsh Sendiri tanpa bantuan | 63.412 | 62.605 | 69.090 | 65.446 |
| 2. Brsh dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 27.797 | 36.714 | 38.803 | 40.932 |
| 3. Brsh dibantu Buruh tetap/buruh dibayar | 11.946 | 14.423 | 14.000 | 10.648 |
| 4. Pekerja/Buruh/ Karyawan | 167.640 | 156.182 | 148.138 | 155.933 |
| 5. Pkj. Bebas di Pertanian | 7.365 | 8.867 | 9.941 | 11.142 |
| 6. Pkj. Bebas di Non Pertanian | 6.943 | 10.410 | 13.556 | 12.691 |
| 7. Pekerja keluarga/tak dibayar | 29.673 | 30.845 | 36.913 | 41.360 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

6. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan

Tabel 2.F.6 menampilkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jabatan di Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2018-2021. Pada tahun 2018-2021 proporsi terbesar terdapat pada jabatan Tenaga Usaha Jasa dan tenaga Penjualan sebesar 74.580 orang (23,69%) di tahun 2018 menurun pada tahun 2019 menjadi 63.779 orang (19,93%) dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 73.418 orang (22,22%) kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 72.931 orang (21,57%).

Besarnya tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan menunjukkan berkembangnya usaha jasa yang berhubungan dengan perjalanan, kerumahtanggaan, katering, perawatan perorangan, perlindungan keamanan dan hak milik perorangan, dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan, atau menjual barang di toko atau di pasar. Hal ini juga didukung oleh berkembangnya usaha kecil menengah diantaranya pengolahan produk makanan khas daerah, pembuatan kerajinan tas tradisional, pengolahan usaha batik tradisional dan lainnya. Pada periode tahun 2018-2021, penduduk yang bekerja pada jabatan Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menempati urutan terbesar kedua, pada tahun 2018 mencapai 63.416 orang (20,15%) berfluktuasi hingga tahun 2021 mencapai 70.110 orang (20,73%). Hal ini didukung oleh sumber daya pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara yang besar. Sedangkan jabatan tenaga Teknisi dan Asisten Profesional menempati urutan terendah pada periode tersebut dengan jumlah 13.757 orang (4,37%) pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 mencapai 14.603 orang (4,32%). Hal ini disebabkan karena formasi untuk tenaga Teknisi dan Asisten Profesional di Provinsi Kalimantan Utara jumlahnya sedikit. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.F.6.

Tabel 2.F.6

Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021
(Orang)

| Jabatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Manajer | 18.988 | 23.435 | 15.375 | 14.452 |
| 2 Profesional | 23.597 | 25.753 | 23.802 | 27.105 |
| 3 Teknisi dan Asisten Profesional | 13.757 | 11.056 | 11.931 | 14.603 |
| 4 Tenaga Tata Usaha | 29.627 | 26.494 | 24.723 | 25.309 |
| 5 Tenaga Usaha Jasa dan tenaga Penjualan | 74.580 | 63.779 | 73.418 | 72.931 |
| 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 63.416 | 72.516 | 77.479 | 70.110 |
| 7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi | 23.910 | 21.858 | 25.225 | 27.061 |
| 8 Operator dan Perakit Mesin | 19.678 | 19.623 | 17.731 | 18.721 |
| 9 Pekerja Kasar | 47.223 | 55.532 | 60.757 | 67.860 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

7. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja

Perekonomian yang membaik dari suatu daerah biasanya dapat terlihat dari meningkatnya berbagai kegiatan produksi barang/jasa di berbagai sektor lapangan usaha. Peningkatan tersebut dapat dicapai jika penduduk yang bekerja melaksanakannya diatas jam kerja normal yaitu lebih dari 35 jam seminggu.

Jika dilihat dari jam kerja, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 menggambarkan bahwa penduduk yang bekerja dengan jam kerja diatas 35 jam seminggu jumlahnya terbesar pada tahun 2018 mencapai 208.627 orang (66,28%) menjadi 212.680 orang (62,89%) pada tahun 2021. Sementara penduduk yang bekerja selama 1-34 jam pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 106.149 orang (33,72%) menjadi 125.472 orang (37,11%) ditahun 2021.

Secara proporsi terjadi penurunan pekerja dengan jam kerja diatas 35 jam seminggu salah satunya disebabkan adanya dampak pandemic covid-19. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.F.7 terdapat penurunan sebanyak 10.363 orang pekerja dengan jam kerja diatas 35 jam seminggu dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Tabel 2.F.7
Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Jam Kerja | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0* | 7.789 | 10.653 | 14.880 | 11.779 |
| 1-14 | 24.894 | 22.596 | 30.238 | 31.908 |
| 15-34 | 73.466 | 74.611 | 83.500 | 81.785 |
| 35-40 | 49.674 | 53.008 | 52.015 | 53.533 |
| 41-48 | 60.166 | 58.047 | 57.461 | 58.185 |
| >48 | 98.787 | 101.131 | 92.347 | 100.962 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

*Sementara tidak bekerja

8. Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota

Penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018-2021 jumlah terbesar terdapat di Kota Tarakan. Pada Tahun 2018 jumlahnya mencapai 106.007 orang (33,68%) menjadi 120.241 orang (35,56%) di tahun 2021. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan merupakan daerah aktivitas perekonomian yang paling tinggi dibanding Kabupaten lainnya. Namun jika dilihat dari perkembangan tahun 2020 ke tahun 2021 baik jumlah maupun proporsinya penduduk yang bekerja di Kota Tarakan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten lainnya antara lain Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

Penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara urutan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah pemekaran termuda sehingga aktivitas perekonomiannya masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.F.8.

Tabel 2.F.8
Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (Orang)

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malinau | 42.229 | 39.915 | 39.203 | 43.770 |
| Bulungan | 62.911 | 61.702 | 63.406 | 65.146 |
| Tana Tidung | 11.101 | 12.214 | 13.496 | 14.067 |
| Nunukan | 92.528 | 91.550 | 93.532 | 94.928 |
| Kota Tarakan | 106.007 | 114.665 | 120.804 | 120.241 |
| Jumlah | 314.776 | 320.046 | 330.441 | 338.152 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

G. Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka terdiri atas mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Penganggur terbuka di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 mencapai **16.953** orang atau 5,11 persen, tahun 2019 mencapai 15.062 orang atau 4,49 persen, tahun 2020 mencapai 17.290 orang atau 4,97 persen dan tahun 2021 mencapai 16.224 orang atau 4,58 persen. Berikut pengangguran dilihat dari berbagai karakteristik.

1. Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Selama tahun 2018-2021 penganggur terbuka golongan umur 20-24 tahun merupakan jumlah terbesar diantara golongan umur lainnya. Pada tahun 2018 sebanyak 4.537 orang, pada tahun 2019 meningkat menjadi 6.325 orang dan tahun 2020 menurun menjadi 4.763 orang serta tahun 2021 meningkat menjadi 5.168 orang. Fakta ini menunjukkan pada golongan umur 20-24 tahun banyak terdapat lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan karena minimnya pengalaman kerja maupun tidak sesuainya kualifikasi pendidikan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Sementara jumlah penganggur terendah terdapat pada golongan umur 65 tahun keatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.G.1.

Tabel 2.G.1

Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Golongan Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15-19 | 1.888 | 2.259 | 2.276 | 2.773 |
| 20-24 | 4.537 | 6.325 | 4.763 | 5.168 |
| 25-29 | 2.928 | 3.149 | 2.728 | 3.805 |
| 30-34 | 2.341 | 980 | 1.641 | 770 |
| 35-39 | 1.468 | 1.521 | 1.543 | 997 |
| 40-44 | 1.727 | 202 | 1.162 | 1.028 |
| 45-49 | 150 | 76 | 770 | 969 |
| 50-54 | 1.192 | 382 | 927 | 464 |
| 55-59 | 568 | 39 | 693 | 250 |
| 60-64 | 154 | 129 | 405 | - |
| 65+ | 0 | 0 | 382 | 0 |
| Jumlah | 16.953 | 15.062 | 17.290 | 16.224 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

Ditinjau dari tingkat pengangguran terbuka untuk golongan umur 15-19 tahun merupakan yang tertinggi. Tingginya angka TPT pada golongan umur ini dapat dipahami karena keahlian dan keterampilan yang rendah serta pengalaman kerja yang masih kurang. Begitu juga yang berumur 20-24 tahun TPT nya tertinggi kedua, kelompok umur ini sebagian besar merupakan lulusan sekolah menengah tinggi yang masih memilih pekerjaan sehingga lebih rela menunggu pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.G.2

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)

| Golongan Umur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15-19 | 12,62 | 17,47 | 13,19 | 18,27 |
| 20-24 | 12,49 | 15,19 | 12,68 | 13,23 |
| 25-29 | 6,16 | 7,17 | 6,28 | 8,44 |
| 30-34 | 5,37 | 2,35 | 3,85 | 1,84 |
| 35-39 | 3,41 | 3,68 | 3,53 | 2,31 |
| 40-44 | 4,34 | 0,50 | 2,71 | 2,34 |
| 45-49 | 0,42 | 0,21 | 2,07 | 2,49 |
| 50-54 | 4,12 | 1,25 | 2,89 | 1,38 |
| 55-59 | 3,05 | 0,18 | 3,03 | 1,03 |
| 60-64 | 0,67 | 0,53 | 3,09 | 0,00 |
| 65+ | | | 2,55 | 0,00 |
| TPT | 5,11 | 4,49 | 4,97 | 4,58 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

2. Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, peranan sektor pendidikan menjadi sangat strategis dan menentukan dalam upaya memenuhi tuntutan dunia kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sektor pendidikan dituntut agar keluarannya memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi sehingga mampu bersaing di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masyarakat telah berupaya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dalam perkembangannya jumlah penganggur berpendidikan tinggi dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin menurun. Namun kondisi yang terjadi selama tahun 2018-2021 pengangguran tertinggi pada SMTA

umum dengan jumlah sebanyak 6.488 orang (2018) menjadi 5.186 orang (2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.G.3

Tabel 2.G.3

Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maksimum SD | 3.267 | 3.005 | 3.249 | 1.843 |
| SMTP | 2.534 | 3.236 | 2.708 | 2.747 |
| SMTA Umum | 6.488 | 5.066 | 5.071 | 5.186 |
| SMTA Kejuruan | 1.427 | 1.775 | 3.488 | 3.230 |
| Diploma | 874 | 424 | 223 | 1.006 |
| Universitas | 2.363 | 1.556 | 2.551 | 2.212 |
| Jumlah | 16.953 | 15.062 | 17.290 | 16.224 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tertinggi terdapat pada SMTA umum sebesar 7,21 persen (2018) menjadi 6,10 persen (2021). Tingginya TPT SMTA umum menunjukkan bahwa dengan keterampilan yang mereka miliki tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk tingkat pendidikan SD TPTnya paling rendah pada tahun 2018 sebesar 3,09 persen menurun pada tahun 2019 menjadi 2,60 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 2,81 persen serta menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 1,69 persen. Rendahnya TPT yang berpendidikan maksimum SD

dikarenakan angkatan kerja maksimum SD tidak mempunyai *bargaining position* dalam hal mendapatkan pekerjaan sehingga cenderung menerima pekerjaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 2.G.4

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(%)

| Tingkat Pendidikan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maksimum SD | 3,09 | 2,60 | 2,81 | 1,69 |
| SMTp | 5,30 | 6,15 | 5,01 | 4,87 |
| SMTA Umum | 7,21 | 6,14 | 5,82 | 6,10 |
| SMTA Kejuruan | 4,05 | 5,55 | 9,84 | 7,85 |
| Diploma | 6,12 | 3,49 | 1,67 | 8,45 |
| Universitas | 6,09 | 3,86 | 6,06 | 4,32 |
| TPT | 5,11 | 4,49 | 4,97 | 4,58 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

3. Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Komposisi penganggur terbuka menurut jenis kelamin didominasi oleh penganggur laki-laki dengan jumlah cenderung menurun pada tahun 2018 sebanyak 11.810 orang menjadi 10.349 orang pada tahun 2021. Sedangkan penganggur perempuan memiliki pola yang sama dengan penganggur laki-laki yakni cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018 sebanyak 5.987 orang menjadi 5.875 orang pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.G.5

Tabel 2.G.5

Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Jenis Kelamin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Laki-Laki | 11.810 | 8.539 | 11.821 | 10.349 |
| Perempuan | 5.987 | 6.523 | 5.469 | 5.875 |
| Jumlah | 17.797 | 15.062 | 17.290 | 16.224 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

Secara kuantitatif jumlah penganggur terbuka laki-laki memiliki jumlah lebih besar daripada penganggur perempuan namun dilihat dari TPT nya baik penganggur perempuan maupun laki-laki mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2021 penganggur laki-laki lebih rendah dibandingkan penganggur perempuan sementara tahun 2018 dan 2020 penganggur perempuan lebih rendah dibandingkan penganggur laki-laki.

Tabel 2.G.6

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(%)

| Jenis Kelamin | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laki-Laki | 5,40 | 3,74 | 5,09 | 4,43 |
| Perempuan | 5,29 | 6,09 | 4,73 | 4,87 |
| TPT | 5,36 | 4,49 | 4,97 | 4,58 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

4. Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Penganggur Terbuka di Provinsi Kalimantan Utara menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2018-2021 jumlah terbesar terdapat di Kota Tarakan. Pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 6.631 orang menjadi 6.250 orang ditahun 2021. Hal ini dikarenakan lowongan kerja yang tersedia masih dalam jumlah terbatas dan tak sedikit dari pencari kerja ketika telah diterima perusahaan menolak untuk ditugaskan ke daerah-daerah pengembangan perusahaan.

Penganggur terbuka menurut Kabupaten/ Kota yang menempati urutan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 606 orang (2018) dan 781 rang (2021). Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung paling sedikit dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya sehingga jumlah penganggurnya pun mampu terserap oleh aktivitas perekonomian yang berada di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.G.7 dan 2.G.8.

Tabel 2.G.7

Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Orang)

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Malinau | 1.868 | 1.658 | 2.097 | 1.889 |
| Bulungan | 3.214 | 2.830 | 2.956 | 3.100 |
| Tana Tidung | 606 | 581 | 685 | 781 |
| Nunukan | 4.634 | 3.579 | 4.038 | 4.204 |
| Kota Tarakan | 6.631 | 6.414 | 7.514 | 6.250 |
| Jumlah | 17.797 | 15.062 | 17.290 | 16.224 |

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2018-2021

Selama periode tahun 2018-2020 ditinjau dari tingkat penganggur terbuka menurut Kabupaten/Kota, TPT tertinggi terdapat pada Kota Tarakan. Pada tahun 2018 mencapai 5,89 persen menjadi 5,86 persen pada tahun 2020 sementara pada tahun 2021 TPT tertinggi ada di Kabupaten Tana Tidung. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

Tabel 2.G.8

Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 (%)

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Malinau | 4,24 | 3,99 | 5,08 | 4,14 |
| Bulungan | 4,86 | 4,39 | 4,45 | 4,54 |
| Tana Tidung | 5,18 | 4,54 | 4,83 | 5,26 |
| Nunukan | 4,77 | 3,76 | 4,14 | 4,24 |
| Kota Tarakan | 5,89 | 5,30 | 5,86 | 4,94 |
| TPT | 5,36 | 4,49 | 4,97 | 4,58 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

H. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu ukuran perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategik dalam organisasi, harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia (Siagian, 2002, p.2). Oleh karena itu tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas. Hal ini disebabkan oleh dua hal, antara lain; pertama, karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa; kedua, karena masukan pada faktor-faktor lain seperti modal (Kussriyanto, 1993, p.1).

Produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian sementara produktivitas paling rendah adalah sector pengadaan listrik dan gas. Secara keseluruhan produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi, tahun 2018 mencapai 182,54 juta/tenaga kerja dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 191,90 juta/tenaga kerja, menurun pada tahun 2020 menjadi 183,83 juta/tenaga kerja dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 186,79 juta/tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.H.1

Tabel 2.H.1

Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021
(Juta Rp/Tenaga Kerja)

| Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 117,30 | 105,18 | 105,70 | 109,72 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1.549,33 | 1.528,74 | 1.448,91 | 1.576,04 |
| 3. Industri Pengolahan | 203,33 | 220,89 | 209,15 | 201,98 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 22,86 | 29,87 | 56,07 | 27,83 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 49,05 | 52,26 | 92,95 | 63,56 |
| 6. Konstruksi | 421,96 | 450,31 | 401,97 | 457,77 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 116,36 | 136,20 | 116,27 | 131,25 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 230,87 | 268,40 | 237,05 | 214,83 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 56,27 | 53,41 | 65,26 | 214,83 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 468,46 | 856,62 | 646,98 | 594,32 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 77,73 | 147,62 | 201,66 | 167,70 |
| 12. Real Estate | | 1.189,37 | 753,91 | 1.522,09 |
| 13. Jasa Perusahaan | 43,57 | 32,04 | 46,13 | 32,65 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 79,38 | 96,88 | 98,77 | 92,98 |
| 15. Jasa Pendidikan | 65,16 | 70,05 | 81,20 | 77,57 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 81,23 | 92,93 | 87,60 | 87,07 |
| 17. Jasa Lainnya | 38,07 | 36,36 | 36,44 | 37,04 |
| Produktivitas | 182,54 | 191,90 | 183,83 | 186,79 |

Sumber : BPS, Agustus, data diolah

I. Pelatihan Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai suatu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting perannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. BLK Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun Tahun 2009 Tanggal 1 April 2009 dengan luas area total 10.000 meter persegi dan dapat menampung sebanyak 126 orang. Kejuruan unggulan di BLK Kabupaten Nunukan adalah Garmen Apparel dan Teknik Otomotif. Sedangkan Lembaga Latihan Kerja (LLK) yang terletak di Kota Tarakan memiliki luas 2 hektar dengan kapasitas 176 orang. Kejuruan unggulan di LLK Tarakan adalah Teknik Manufaktur, Garmen Apparel, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Secara keseluruhan jumlah lulusan pelatihan di Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari BLK Nunukan dan LLK Tarakan berfluktuasi, tahun 2018 sebanyak 176 orang, tahun 2019 sebanyak 656 orang, tahun 2020 sebanyak 624 orang dan tahun 2021 mencapai 574 orang. Jumlah kapasitas yang dapat ditampung dari kedua balai latihan tersebut sebanyak 1.537 orang dengan total jumlah instruktur sebanyak 17 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.I.1.

Tabel 2.I.1

Kapasitas Terpasang, Jumlah Instruktur dan Lulusan Pelatihan
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|------|------|
| Jumlah kapasitas terpasang pemerintah | 1.536 | 1.536 | 688 | 302 |
| Jumlah kapasitas terpasang swasta | | | | |
| Jumlah instruktur pemerintah | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Jumlah instruktur swasta | | | | |
| Jumlah lulusan pelatihan pemerintah | 176 | 656 | 624 | 574 |
| Jumlah lulusan pelatihan swasta | 4 | 4 | 17 | 22 |
| Jumlah lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan pemerintah yang memiliki sertifikat kompetensi | | | 624 | 574 |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan swasta yang memiliki sertifikat kompetensi | | | | |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan pemerintah yang ditempatkan (bekerja dan atau berwirausaha) | | | | 155 |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan swasta yang ditempatkan (bekerja dan atau berwirausaha) | | | | |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

J. Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan

perlindungan hukum. Berdasarkan tabel 2.J.1 penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 mencapai 2.455 orang menjadi 2.109 orang pada tahun 2021. Jika melihat prosentasinya tahun 2018 penempatan tenaga kerja hanya mencapai 55,83 persen dari total pencari kerja terdaftar. Presentasinya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 45,56 persen, dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 43,73 persen kemudian di tahun 2021 naik menjadi 55,47 persen. Masih rendahnya angka penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara mengindikasinya banyaknya pencari kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja dan tentu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.J.1.

Tabel 2.J.1

Jumlah Pencari Kerja, Bursa Kerja dan Pengantar Kerja
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lowongan kerja terdaftar | | | | |
| Pencari kerja terdaftar | 4397 | 4023 | 2.584 | 3.802 |
| Pencari kerja ditempatkan | 2455 | 1.833 | 1.130 | 2.109 |
| Bursa kerja pemerintah | | | | |
| Bursa kerja swasta | | | | |
| Jumlah pengantar kerja | | | 1 | 1 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

K. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan pelaku utama sekaligus tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional ini semakin meningkat begitu pula dengan berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Karenanya kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas.

Perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan pengawasan norma ketenagakerjaan tetapi juga menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial ini yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi bila ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional perlu dibentuk Serikat Pekerja (SP) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat hubungan industrial yang paling utama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi jembatan utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan tabel 2.K.1 ditekahui data hubungan industrial di Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah peraturan perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan jumlah Serikat Pekerja (SP) di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan sejak tahun 2018 ke tahun 2021.

Tabel 2.K.1

Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Mediator | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) | | 152 | 193 | 236 |
| Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | | 73 | 82 | 102 |
| Jumlah SP / SB | | | | 4 |
| Jumlah Lembaga Bipartit | | 16 | 61 | 77 |
| Jumlah perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang | | 54 | | |
| Perusahaan peserta jamsostek aktif | | | 3.335 | 2.693 |
| Tenaga kerja peserta jamsostek aktif | | 104.349 | 102.972 | 89.579 |
| Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama | | | 91 | 90 |
| Jumlah kasus hubungan industrial | | 80 | 127 | 114 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Tabel 2.K.2 diketahui Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 2.559.903 dan naik pada Tahun 2021 menjadi Rp. 3.000.804.

Tabel 2.K.2

Perkembangan Upah Minimum
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2018-2021

| Tahun | UMP (Rp) | KHL (Rp) | Upah riil yang diterima pekerja (Rp) | Rata-rata jam kerja pekerja | Prosentase UMK/KHL (%) |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2018 | 2.559.903 | | | | |
| 2019 | 2.765.463 | | | 111 | |
| 2020 | 3.000.804 | | | 271 | |
| 2021 | 3.000.804 | | | 176 | |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

L. Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah meyakinkan para mitra sosial mengenai perlunya meninjau aturan ketenagakerjaan di tempat kerja dan kepentingan mereka dalam hal ini, melalui pencegahan, pendidikan dan apabila penting, tindakan penegakan hukum.

Di dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta

permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Dari tabel 2.L.1 diketahui bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan mengalami kenaikan sejak tahun 2019 ke tahun 2021, sementara jumlah pengawas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara hanya sebanyak 3 orang.

Tabel 2.L.1

Jumlah Perusahaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2021

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah perusahaan yang melapor ketenagakerjaan | | 775 | 919 | 1.150 |
| Jumlah tenaga kerja | | 20.492 | | |
| Jumlah kecelakaan kerja | | 212 | 130 | 251 |
| Jumlah perush. yang diaudit SMK3 | | | | |
| Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 | | 12 | | |
| Jumlah perusahaan yang wajib menerapkan SMK3* | | | 919 | 1.150 |
| Jumlah pengawas ketenagakerjaan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3 | | | | |
| Jumlah Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3 | | | 919 | 1.150 |

Keterangan :

* : Jumlah perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

BAB III

PERKIRAAN PERSEDIAAN TENAGA KERJA

Persediaan tenaga kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan tenaga kerja, karena pada hakekatnya persediaan tenaga kerja tersebut merupakan fokus perhatian utama dalam rangka mendayagunakan seluruh sumber daya manusia yang ada secara optimal.

Dalam konteks perencanaan tenaga kerja, persediaan tenaga kerja tersebut sering disebut sebagai angkatan kerja. Oleh karena itu maka perlu dilakukan perkiraan terhadap angkatan kerja yaitu tentang berapa dan bagaimana kuantitas dan kualitasnya di masa yang akan datang, sesuai dengan periode perencanaan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal itu, maka upaya memperkirakan persediaan tenaga kerja tersebut akan dilakukan dalam tiga langkah yaitu perkiraan penduduk usia kerja, perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan perkiraan angkatan kerja.

A. Perkiraan Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor demografi dan faktor ekonomi. Demografi memberikan pengaruh yang bersifat langsung misalnya terjadinya penambahan penduduk dari tahun ketahun. Pertambahan penduduk tersebut berdampak terhadap tingginya jumlah penduduk yang masuk kelompok Penduduk Usia Kerja. Disisi lain fenomena penambahan penduduk dipengaruhi oleh membaiknya berbagai kondisi ekonomi baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro individual.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut dapat berwujud menjadi peningkatan kemampuan untuk memenuhi konsumsi gizi dan nutrisi yang berkualitas, kemampuan untuk merawat dan memelihara kesehatan dan kemampuan-kemampuan lain yang berkaitan dengan peningkatan derajat hidup. Kesemuanya itu, baik faktor demografi maupun ekonomi, dapat saling terkait dan bermuara pada peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja. Seiring dengan itu maka Penduduk Usia Kerja (PUK) Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

1. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Golongan umur menjadi bagian penting dalam memperkirakan persediaan tenaga kerja, karena dari golongan umur dapat merefleksikan kondisi fisik dan psikis secara umum tenaga kerja. Secara umum struktur PUK di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan jumlah terbanyak terdapat pada golongan umur 25-29 tahun yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 PUK golongan umur tersebut diperkirakan sebanyak 62.633 orang (11,43%) mengalami peningkatan secara jumlah menjadi 66.335 orang namun secara proporsinya mengalami penurunan menjadi 10,48 persen pada tahun 2027.

Sedangkan PUK golongan umur 60 tahun keatas yang notabene merupakan usia yang cenderung sudah tidak produktif lagi diperkirakan mengalami peningkatan jumlah maupun proporsinya. Tahun 2022 PUK 60 tahun ke

atas diperkirakan sebanyak 65.741 orang (11,99%) mengalami peningkatan menjadi 83.482 orang (13,64%) pada tahun 2027. Terjadinya peningkatan PUK usia 60 tahun keatas tidak terlepas dari upaya perbaikan layanan dari sisi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga diperkirakan lima tahun ke depan jumlahnya akan terus meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.A.1.

Tabel 3.A.1

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027
(Orang)

| Golongan Umur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 – 19 | 61.854 | 62.531 | 63.208 | 63.891 | 64.568 | 65.256 |
| 20 – 24 | 61.995 | 62.686 | 63.378 | 64.074 | 64.766 | 65.468 |
| 25 – 29 | 62.633 | 63.369 | 64.106 | 64.849 | 65.586 | 66.335 |
| 30 – 34 | 58.816 | 59.519 | 60.224 | 60.934 | 61.638 | 62.354 |
| 35 – 39 | 56.438 | 57.452 | 58.468 | 59.491 | 60.506 | 61.538 |
| 40 – 44 | 53.444 | 54.539 | 55.634 | 56.739 | 57.834 | 58.947 |
| 45 – 49 | 48.269 | 49.324 | 50.380 | 51.444 | 52.500 | 53.572 |
| 50 – 54 | 43.702 | 45.265 | 46.831 | 48.408 | 49.973 | 51.563 |
| 55 – 59 | 35.249 | 36.887 | 38.527 | 40.180 | 41.820 | 43.485 |
| 60 – 64 | 26.194 | 27.822 | 29.451 | 31.093 | 32.722 | 34.377 |
| 65 + | 39.547 | 41.448 | 43.351 | 45.269 | 47.172 | 49.105 |
| Jumlah | 548.140 | 560.842 | 573.557 | 586.371 | 599.086 | 612.000 |

Sumber Data: Data Diolah

2. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari aspek pendidikan, diperkirakan masih terlihat suatu kesenjangan yang cukup tinggi, yaitu hampir sepertiga berpendidikan maksimum sekolah dasar dimana pada tahun 2022 mencapai 172.897 orang atau 31,54 persen mengalami penurunan hingga pada tahun 2027 diperkirakan menjadi sebesar 26,78 persen. Harapan ini akan dapat tercapai jika didukung upaya peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat diantaranya program wajib belajar 12 tahun. Program lainnya yang perlu didorong pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk mendapatkan akses melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas bagi usia dewasa melalui kegiatan paket baik A, B maupun C. Program-program tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam penyiapan SDM yang berkualitas agar dapat turut berpartisipasi dalam beragam pembangunan proyek strategis serta mampu bersaing di dunia usaha dan industri yang semakin kompetitif. PUK dengan latar belakang pendidikan SMTA Umum diperkirakan merupakan terbesar kedua yang diikuti oleh yang berpendidikan SMTP. Sedangkan PUK SMTA Kejuruan, Diploma dan Universitas diperkirakan jumlahnya akan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jika dilihat proporsinya akan berfluktuasi pada tahun 2022-2027. PUK berpendidikan SMTA Kejuruan diperkirakan pada tahun 2022 mencapai 59.106 orang (10,78%)

mengalami peningkatan menjadi 86.631 orang (14,16%) pada tahun 2027. Sementara PUK berpendidikan universitas diperkirakan mencapai 58.564 orang (10,68%) pada tahun 2022 meningkat secara jumlah menjadi 64.808 orang, namun secara proporsi diperkirakan mengalami penurunan menjadi 10,59 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.A.2.

Tabel 3.A.2

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimum SD | 172.897 | 171.483 | 169.861 | 168.066 | 166.047 | 163.896 |
| SMTB | 108.706 | 110.029 | 111.225 | 112.307 | 113.234 | 114.061 |
| SMTA Umum | 134.028 | 140.003 | 146.057 | 152.201 | 158.372 | 164.637 |
| SMTA Kejuruan | 59.106 | 63.961 | 69.126 | 74.624 | 80.442 | 86.631 |
| Diploma | 14.838 | 15.455 | 16.077 | 16.705 | 17.333 | 17.967 |
| Universitas | 58.564 | 59.911 | 61.210 | 62.467 | 63.657 | 64.808 |
| Jumlah | 548.140 | 560.842 | 586.371 | 586.371 | 599.086 | 612.000 |

Sumber Data: Data Diolah

3. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Selama lima tahun kedepan diperkirakan penduduk usia kerja untuk laki-laki akan mengalami lebih besar dibandingkan dengan perempuan. PUK laki-laki diperkirakan mencapai 292.274 orang atau 53,32 persen pada tahun 2022 dan akan terus mengalami kenaikan secara jumlah hingga

tahun 2027 menjadi 323.252 orang, namun secara proporsi diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 52,82 persen. Sedangkan PUK perempuan diperkirakan tahun 2022 mencapai 255.866 orang atau 46,68 persen dan tahun 2027 mencapai 288.748 orang atau 47,18 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.A.3.

Tabel 3.A.3

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027
(Orang)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laki-laki | 292.274 | 298.484 | 304.675 | 310.893 | 317.032 | 323.252 |
| Perempuan | 255.866 | 262.358 | 268.882 | 275.478 | 282.053 | 288.748 |
| Jumlah | 548.140 | 560.842 | 573.557 | 586.371 | 599.086 | 612.000 |

Sumber Data: Data Diolah

4. Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Selama lima tahun kedepan diperkirakan Penduduk Usia Kerja (PUK) terbesar terletak di Kota Tarakan. Pada Tahun 2022 mencapai 204.290 orang atau 37,27 persen dan diperkirakan akan mengalami kenaikan secara jumlah setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 226.218 orang, namun secara proporsi diperkirakan mengalami penurunan menjadi 36,96 persen. PUK terbesar kedua terletak di Kabupaten Nunukan yang tahun 2022 diperkirakan mencapai 154.454 orang atau 28,18 persen dan akan mengalami

kenaikan hingga tahun 2027 mencapai 176.913 orang atau 28,91 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Kota Tarakan merupakan daerah dengan jumlah PUK terbesar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan lebih besar serta didukung dengan jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan daerah lainnya. Penyebaran penduduk antar Kabupaten dan Kota melalui pengembangan wilayah sehingga bisa menarik minat untuk tinggal di Kabupaten/Kota lain.

PUK terendah diperkirakan terletak di Kabupaten Tana Tidung yang mencapai 23.232 orang atau 4,24 persen pada tahun 2022 dan akan mengalami peningkatan hingga tahun 2027 menjadi 28.991 orang atau 4,74 persen. Hal disebabkan Kabupaten Tana Tidung daerah pemekaran yang terdiri dari lima kecamatan sehingga diperkirakan jumlah PUKnya masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya sampai lima tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.A.4.

Tabel 3.A.4

Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027
(Orang)

| Kabupaten/Kota | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malinau | 65.492 | 67.073 | 68.641 | 70.223 | 71.796 | 73.394 |
| Bulungan | 100.671 | 101.770 | 102.959 | 104.149 | 105.297 | 106.484 |
| Tana Tidung | 23.232 | 24.404 | 25.566 | 26.724 | 27.863 | 28.991 |
| Nunukan | 154.454 | 158.875 | 163.301 | 167.796 | 172.307 | 176.913 |
| Kota Tarakan | 204.290 | 208.721 | 213.090 | 217.480 | 221.823 | 226.218 |
| Jumlah | 548.140 | 560.842 | 573.557 | 586.371 | 599.086 | 612.000 |

Sumber Data: Data Diolah

B. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini karena tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada umumnya yang menjadi fokus perhatian di bidang ketenagakerjaan adalah penduduk usia kerja termasuk didalamnya angkatan kerja. Angkatan kerja ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap pasar kerja. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi pada kelompok ini akan mempengaruhi persediaan tenaga kerja. Untuk mengetahui partisipasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Secara umum TPAK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022 diperkirakan mencapai 66,90 persen dan

akan mengalami kenaikan hingga tahun 2027 mencapai 67,71 persen.

1. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Semakin tinggi golongan umur, diperkirakan tingkat partisipasi angkatan kerja semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selama tahun 2022-2027 diperkirakan semua golongan umur mengalami peningkatan, kecuali pada golongan umur 15-19 tahun. Penurunan TPAK pada usia sekolah ini sejalan dengan kebijakan yang tengah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan pemberian layanan yang intensif terhadap program wajib belajar 12 tahun serta beasiswa bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih tinggi, hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga sudah semakin meningkat. TPAK dengan usia 25-29 peningkatannya mencapai 1,52 point selama periode 2022-2027. Meningkatnya golongan umur 25-29 tahun yang aktif dalam kegiatan ekonomi pada periode tersebut, maka pemerintah perlu mempersiapkan secara matang kualitas golongan umur tersebut agar dapat beraktifitas dengan bekerja.

Pada golongan umur lainnya, Perkiraan TPAK terbesar diperkirakan pada golongan umur 40-44 tahun yakni mencapai 84,94 persen pada Tahun 2022 dan akan

mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 85,70 persen. TPAK golongan umur 60-64 tahun diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2022 mencapai 58,71 persen hingga tahun 2027 mencapai 59,39 persen dan TPAK golongan umur 65 tahun ke atas diperkirakan mencapai 39,62 persen pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2027 menjadi 40,25 persen.

TPAK pada kelompok usia muda (15–19 tahun) diperkirakan masih cenderung rendah karena pada usia ini merupakan usia dimana secara umum masih banyak yang bersekolah, kemudian kelompok usia produktif (25-59 tahun) TPAK meningkat dan kemudian menurun pada kelompok usia 60 tahun keatas.

Tabel 3.B.1
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut
Golongan umur Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (%)

| Golongan Umur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 – 19 | 24,64 | 24,46 | 24,29 | 24,12 | 23,95 | 23,78 |
| 20 – 24 | 64,91 | 65,30 | 65,70 | 66,10 | 66,40 | 66,78 |
| 25 – 29 | 73,80 | 74,03 | 74,40 | 74,69 | 74,98 | 75,32 |
| 30 – 34 | 73,02 | 73,24 | 73,46 | 73,70 | 73,97 | 74,22 |
| 35 – 39 | 78,54 | 78,73 | 78,88 | 79,06 | 79,34 | 79,56 |
| 40 – 44 | 84,94 | 85,13 | 85,23 | 85,35 | 85,53 | 85,70 |
| 45 – 49 | 83,23 | 83,39 | 83,58 | 83,75 | 83,89 | 84,02 |
| 50 – 54 | 80,85 | 80,98 | 81,15 | 81,34 | 81,49 | 81,62 |
| 55 – 59 | 73,18 | 73,30 | 73,47 | 73,65 | 73,82 | 73,95 |
| 60 – 64 | 58,71 | 58,82 | 58,95 | 59,09 | 59,22 | 59,39 |
| 65 + | 39,62 | 39,72 | 39,82 | 39,96 | 40,09 | 40,25 |
| TPAK | 66,90 | 67,05 | 67,21 | 67,38 | 67,54 | 67,71 |

Sumber Data: Data Diolah

2. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan diperkirakan TPAK yang berpendidikan tamatan universitas merupakan yang tertinggi. Tahun 2022 diperkirakan mencapai 90,52 persen mengalami peningkatan hingga Tahun 2027 mencapai 90,91 persen. Kemudian diikuti oleh TPAK yang berpendidikan diploma tahun 2022 mencapai 84,67 persen dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 84,99 persen. Terbesar ketiga adalah TPAK berpendidikan SMTA kejuruan dan diikuti oleh TPAK SMTA umum yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan proporsi TPAK Maksimum SD diperkirakan mengalami penurunan setiap tahunnya sementara TPAK berpendidikan SMTP dengan proporsi paling rendah berfluktuasi cenderung menurun. Tahun 2022 TPAK yang berpendidikan maksimum SD diperkirakan sebesar 62,35 persen dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 61,02 persen.

Menurunnya Tingkat partisipasi Angkatan kerja yang berpendidikan maksimal SD dan meningkatnya tingkat partisipasi yang berpendidikan tinggi menunjukkan semakin meningkatnya kualitas penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, diperkirakan karena semakin berkurangnya golongan usia tua yang aktif di dunia kerja khususnya yang berpendidikan rendah. Selain itu

kesempatan kerja yang tersedia cenderung untuk yang berpendidikan menengah atas sehingga bagi yang berpendidikan menengah kebawah cenderung susah masuk kedunia kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.B.2.

Tabel 3.B.2

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maksimum SD | 62,35 | 62,13 | 61,93 | 61,55 | 61,28 | 61,02 |
| SMTP | 53,29 | 53,37 | 53,46 | 53,59 | 53,68 | 53,76 |
| SMTA Umum | 67,29 | 67,41 | 67,53 | 67,73 | 67,86 | 67,99 |
| SMTA Kejuruan | 76,53 | 76,68 | 76,80 | 77,01 | 77,15 | 77,29 |
| Diploma | 84,67 | 84,74 | 84,81 | 84,90 | 84,93 | 84,99 |
| Universitas | 90,52 | 90,58 | 90,65 | 90,79 | 90,85 | 90,91 |
| TPAK | 66,90 | 67,05 | 67,21 | 67,38 | 67,54 | 67,71 |

Sumber Data: Data Diolah

3. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan masih didominasi oleh TPAK laki-laki, tahun 2022 mencapai 82,41 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 82,99 persen. Sedangkan TPAK perempuan diperkirakan mencapai 49,19 persen pada tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 50,62 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.B.3

Peningkatan TPAK perempuan diperkirakan terdapat beberapa faktor antara lain, semakin terbukanya kesempatan kerja serta dipengaruhi oleh adanya pengakuan peranan perempuan yang berkiprah diluar rumah tangga, disamping adanya jaminan kerja, perlindungan, pelayanan dan hak perempuan makin meluas dan sangat diperhatikan. Meningkatnya TPAK perempuan juga akan memberikan dampak pada kesejahteraan keluarga dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingginya TPAK laki-laki masih secara normatif tanggungjawab dan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Tabel 3.B.3

Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Laki-laki | 82,41 | 82,57 | 82,74 | 82,77 | 82,88 | 82,99 |
| Perempuan | 49,19 | 49,40 | 49,62 | 50,00 | 50,31 | 50,62 |
| TPAK | 66,90 | 67,05 | 67,21 | 67,38 | 67,54 | 67,71 |

Sumber Data: Data Diolah

4. Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 terbesar diperkirakan terletak di Kabupaten Malinau yang mencapai 72,16 persen pada tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 72,75 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan yang mencapai 69,31 persen tahun 2022 dan diperkirakan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 70,16 persen. Kabupaten Tana Tidung menempati urutan ketiga yang diperkirakan mencapai 68,04 persen tahun 2022 hingga tahun 2027 mencapai 68,94 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Secara keseluruhan TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.B.4.

TPAK Kota Tarakan terendah karena saat ini dari 5 Kab/Kota tersebut Kota Tarakan mempunyai sarana pendidikan dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi paling banyak, sehingga sebagian penduduk di kota tersebut mempunyai kegiatan sekolah. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung sampai lima tahun kedepan.

Tabel 3.B.4
Perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (%)

| Kabupaten/Kota | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Malinau | 72,16 | 72,26 | 72,38 | 72,50 | 72,62 | 72,75 |
| Bulungan | 69,31 | 69,47 | 69,64 | 69,81 | 69,98 | 70,16 |
| Tana Tidung | 68,04 | 68,21 | 68,39 | 68,57 | 68,75 | 68,94 |
| Nunukan | 66,76 | 66,90 | 67,05 | 67,20 | 67,36 | 67,52 |
| Kota Tarakan | 64,01 | 64,18 | 64,36 | 64,55 | 64,74 | 64,93 |
| TPAK | 66,90 | 67,05 | 67,21 | 67,38 | 67,54 | 67,71 |

Sumber Data: Data Diolah

C. Perkiraan Angkatan Kerja

Angkatan Kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja. Pada Tahun 2022 angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mencapai 366.722 orang dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 414.407 orang. Sehingga selama 2022-2027 diperkirakan akan ada kenaikan sebanyak 47.685 orang.

1. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur

Kondisi angkatan kerja menurut golongan umur di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022-2027 diperkirakan golongan umur 25-29 tahun mempunyai jumlah terbanyak yaitu sebanyak 46.222 orang tahun 2022 dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 49.961 orang. Kemudian diikuti oleh angkatan kerja golongan umur 40-44 tahun sebanyak 45.397 orang tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 50.519 orang. Golongan umur 35-39 tahun menempati urutan ketiga sebanyak 44.329 orang tahun 2022 diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 48.962 orang. Besarnya angkatan kerja pada ketiga golongan umur tersebut, diperkirakan karena usia tersebut merupakan usia produktif sehingga mereka aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tanggungjawab ekonomi terhadap keluarga.

Golongan umur 60-64 tahun keatas diperkirakan merupakan angkatan kerja yang menempati urutan terendah dibandingkan dengan golongan umur lainnya.

Secara keseluruhan angkatan kerja setiap golongan umur diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.C.1.

Tabel 3.C.1

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Golongan Umur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 – 19 | 15.240 | 15.298 | 15.355 | 15.412 | 15.465 | 15.520 |
| 20 – 24 | 40.239 | 40.936 | 41.639 | 42.352 | 43.005 | 43.722 |
| 25 – 29 | 46.222 | 46.910 | 47.697 | 48.437 | 49.177 | 49.961 |
| 30 – 34 | 42.946 | 43.594 | 44.238 | 44.906 | 45.592 | 46.282 |
| 35 – 39 | 44.329 | 45.234 | 46.120 | 47.034 | 48.008 | 48.962 |
| 40 – 44 | 45.397 | 46.427 | 47.418 | 48.429 | 49.464 | 50.519 |
| 45 – 49 | 40.172 | 41.130 | 42.109 | 43.082 | 44.043 | 45.012 |
| 50 – 54 | 35.335 | 36.657 | 38.003 | 39.375 | 40.723 | 42.087 |
| 55 – 59 | 25.795 | 27.037 | 28.306 | 29.591 | 30.872 | 32.159 |
| 60 – 64 | 15.377 | 16.365 | 17.363 | 18.372 | 19.379 | 20.417 |
| 65 + | 15.669 | 16.464 | 17.261 | 18.091 | 18.912 | 19.766 |
| Jumlah | 366.722 | 376.052 | 385.509 | 395.080 | 404.641 | 414.407 |

Sumber Data: Data Diolah

2. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Kondisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD. Angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD diperkirakan akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2022 angkatan kerja maksimum SD diperkirakan mencapai

29,40 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 24,13 persen. Penurunan angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD ini diperkirakan karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih tinggi.

Sedangkan perkiraan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan terbesar kedua adalah angkatan kerja yang berpendidikan SMTA Umum, tahun 2022 mencapai 90.184 orang dan tahun 2027 mencapai 111.934 orang dengan kata lain pada periode tersebut terjadi peningkatan sebanyak 21.750 orang. Tinggi perkiraan angkatan kerja berpendidikan SMTA Umum tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan pelatihan vokasi atau memberikan beasiswa kepada lulusan tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga lebih mudah terserap dalam dunia kerja.

Angkatan kerja yang berpendidikan universitas secara kuantitas diperkirakan mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2022 mencapai 53.013 orang dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2027 mencapai 58.918 orang.

Tabel 3.C.2

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maksimum SD | 107.803 | 106.547 | 105.202 | 103.450 | 101.760 | 100.009 |
| SMTM | 57.928 | 58.721 | 59.457 | 60.185 | 60.790 | 61.322 |
| SMTA Umum | 90.184 | 94.374 | 98.639 | 103.086 | 107.479 | 111.934 |
| SMTA Kejuruan | 45.232 | 49.047 | 53.092 | 57.465 | 62.058 | 66.954 |
| Diploma | 12.563 | 13.096 | 13.635 | 14.183 | 14.722 | 15.270 |
| Universitas | 53.013 | 54.268 | 55.484 | 56.711 | 57.834 | 58.918 |
| Jumlah | 366.722 | 376.052 | 385.509 | 395.080 | 404.641 | 414.407 |

Sumber Data: Data Diolah

3. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Kondisi angkatan kerja menurut jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan didominasi oleh angkatan kerja laki-laki. Tahun 2022 mencapai 240.871 orang atau 65,68 persen dan tahun 2027 mencapai 268.256 orang atau 64,73 persen diperkirakan proporsinya sedikit menurun walaupun jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat. Sedangkan perkiraan angkatan kerja perempuan tahun 2022 mencapai 125.851 orang atau 34,32 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 146.151 orang atau 35,27 persen. Terjadinya peningkatan angkatan kerja perempuan diperkirakan dalam lima tahun ke depan kesadaran perempuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi semakin besar. Hal ini diperkirakan tidak terlepas juga dari semakin berkembangnya teknologi digital sehingga banyak pekerjaan yang bisa dilakukan walaupun

tetap berada di rumah sehingga mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi. Munculnya peluang usaha terkait teknologi digital ini berpengaruh besar terhadap peralihan perempuan yang semula hanya fokus mengurus rumah tangga untuk mulai aktif di dunia kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.C.3.

Tabel 3.C.3

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027
(Orang)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laki-laki | 240.871 | 246.450 | 252.084 | 257.337 | 262.750 | 268.256 |
| Perempuan | 125.851 | 129.602 | 133.425 | 137.743 | 141.891 | 146.151 |
| Jumlah | 366.722 | 376.052 | 385.509 | 395.080 | 404.641 | 414.407 |

Sumber Data: Data Diolah

4. Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Kondisi angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan didominasi oleh Kota Tarakan. Tahun 2022 angkatan kerja di Kota Tarakan diperkirakan mencapai 130.765 orang atau 35,66 persen dan secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 146.879 orang namun secara proporsi mengalami penurunan menjadi 35,44 persen. Besarnya jumlah angkatan kerja di Kota Tarakan dikarenakan Kota Tarakan sebagai pusat aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara sehingga menjadi tujuan orang dalam mencari kerja.

Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan, tahun 2022 diperkirakan mencapai 103.115 orang hingga tahun 2027 mencapai 119.447 orang. Kabupaten Tanah Tidung yang terdiri dari 5 kecamatan diperkirakan angkatan kerjanya terendah, pada tahun 2022 mencapai 15.808 orang hingga tahun 2027 mencapai 19.985 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.C.4.

Tabel 3.C.4

Perkiraan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027
(Orang)

| Kabupaten/ Kota | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malinau | 47.257 | 48.467 | 49.681 | 50.910 | 52.138 | 53.391 |
| Bulungan | 69.778 | 70.697 | 71.697 | 72.702 | 73.685 | 74.704 |
| Tana Tidung | 15.808 | 16.645 | 17.483 | 18.323 | 19.155 | 19.985 |
| Nunukan | 103.115 | 106.285 | 109.494 | 112.764 | 116.062 | 119.447 |
| Kota Tarakan | 130.765 | 133.957 | 137.153 | 140.381 | 143.600 | 146.879 |
| Jumlah | 366.722 | 376.052 | 385.509 | 395.080 | 404.641 | 414.407 |

Sumber Data: Data Diolah

BAB IV

PERKIRAAN KEBUTUHAN AKAN TENAGA KERJA

Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan pengangguran. Semakin banyak kesempatan yang tercipta menyebabkan rendahnya atau berkurangnya pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha sangat diharapkan sehingga memberikan peluang kepada penduduk untuk bekerja.

Kesempatan Kerja menginformasikan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di masa depan dan jumlah penduduk yang belanja berbagai kegiatan ekonomi diberbagai lapangan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang pada gilirannya memberikan kesempatan kepada penduduk untuk bekerja. Bila disadari bahwa tidak semua lapangan pekerjaan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh penduduk karena berbagai faktor maka kesempatan kerja diproyeksikan dari jumlah penduduk yang bekerja. Problema yang dihadapi terkait dengan kesempatan kerja adalah pertambahan yang cenderung masih kecil jumlahnya, sehingga penggunaan sumber daya manusia menjadi semakin terbatas. Sebagai konsekuensinya, maka pada setiap pekerjaan di berbagai lapangan usaha membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian/kompetensi dan professional di bidangnya masing – masing.

Sementara kompetensi yang ketat dalam berbagai bidang usaha menuntut pelaku usaha untuk mampu bersaing baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang pada gilirannya mengarah pada tindakan efisiensi dan rasionalisasi. Jumlah angkatan kerja

setiap tahunnya terus meningkat, yang sebagian besar masih berpendidikan rendah dan belum memiliki keahlian atau keterampilan yang memadai. Oleh karena itu segala upaya harus dilakukan pemerintah atau swasta agar penambahan angkatan kerja baru dan juga pengangguran yang ada dapat terserap.

Namun demikian sektor pertanian yang memiliki tingkat fleksibilitas cukup tinggi dalam penyerapan tenaga kerja kurang diminati oleh para pencari kerja khususnya usia muda. Para pencari kerja lebih tertarik untuk memasuki lapangan pekerjaan disektor non pertanian. Perkiraan kesempatan kerja memberikan indikasi besaran kebutuhan tenaga kerja pada berbagai sektor ekonomi, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitasnya. Perkiraan kesempatan kerja juga memiliki manfaat yang cukup luas sebagai masukan dan evaluasi bagi perencanaan pendidikan dan pelatihan, yang pada gilirannya keluaran sistem pendidikan dan pelatihan dapat diusahakan sedekat mungkin dengan tuntutan syarat pekerjaan.

A. Perkiraan Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah bahkan Negara. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu

daerah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian daerah tersebut berkembang dengan baik.

Dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat menentukan serangkaian sasaran ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022-2027 diperkirakan akan terus menunjukkan perbaikan yang nantinya diharapkan dapat membawa perubahan positif pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat pada perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 mencapai 4,18 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 diperkirakan PDRB Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,28 persen. Diperkirakan sector penyediaan akomodasi dan makan minum akan memiliki angka pertumbuhan tertinggi tetapi kecenderungannya menurun yakni dari sebesar 9,72 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,26 persen di tahun 2027. Hal ini dimungkinkan karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran baru yang menjadi daya tarik migrasi masuk penduduk sehingga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sedangkan untuk tujuh sector lapangan usaha yang terdiri dari sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sector Pertambangan dan Penggalian, sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sector jasa

perusahaan dan sector jasa Pendidikan diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam periode yang sama.

Khusus sector jasa Kesehatan dan kegiatan social merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja paling tinggi diperkirakan tumbuh sebesar 3,09 persen pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2027 menjadi sebesar 6,93 persen. Hal ini diperkirakan adanya peningkatan permintaan obat-obatan dan peralatan Kesehatan. Potensi sector jasa Kesehatan dan kegiatan social sangat menjanjikan mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk pemeliharaan kesehatan.

Tabel 4.A.1

Perkiraan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (%)

| Lapangan Usaha | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,45 | 4,63 | 4,81 | 5,04 | 5,23 | 5,51 |
| 2. Pertambangan dan Pengalihan | 0,77 | 2,60 | 2,89 | 3,22 | 3,49 | 3,86 |
| 3. Industri Pengolahan | 3,36 | 2,86 | 3,14 | 3,46 | 3,72 | 4,08 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 5,28 | 6,88 | 6,85 | 6,91 | 6,94 | 7,09 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,98 | 4,87 | 5,03 | 5,25 | 5,42 | 5,69 |
| 6. Konstruksi | 8,56 | 5,33 | 5,45 | 5,64 | 5,78 | 6,03 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,97 | 5,80 | 5,88 | 6,03 | 6,14 | 6,36 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 8,87 | 4,69 | 4,86 | 5,09 | 5,27 | 5,55 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9,72 | 5,66 | 5,75 | 5,91 | 6,03 | 6,26 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 4,55 | 6,63 | 6,63 | 6,71 | 6,76 | 6,92 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,73 | 4,76 | 4,93 | 5,15 | 5,33 | 5,61 |
| 12. Real Estate | 3,61 | 3,87 | 4,09 | 4,37 | 4,59 | 4,92 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,15 | 2,00 | 2,30 | 2,65 | 2,94 | 3,32 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,70 | 4,60 | 4,78 | 5,01 | 5,20 | 5,48 |
| 15. Jasa Pendidikan | 4,55 | 5,86 | 5,94 | 6,08 | 6,19 | 6,40 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3,09 | 6,64 | 6,64 | 6,72 | 6,76 | 6,93 |
| 17. Jasa Lainnya | 4,26 | 6,64 | 6,64 | 6,71 | 6,76 | 6,93 |
| Perkiraan Laju Pertumbuhan | 4,18 | 4,33 | 4,53 | 4,78 | 4,98 | 5,28 |

Sumber : Data Diolah

Merujuk pada tabel 4.A.2, secara keseluruhan nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mengalami kenaikan dari 65.802 Milyar pada Tahun 2022 menjadi 83.098 Milyar pada Tahun 2027. Jika melihat proporsinya, terlihat jelas bahwa dari tujuh belas sektor atau lapangan usaha yang memiliki proporsi PDRB tertinggi diperkirakan ada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang 25,59 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 23,73 persen. Sumbangan PDRB sektor ESDM di Kalimantan Utara oleh produksi sumber daya pertambangan, minyak, gas dan panas bumi dikelompokkan pada sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Pertumbuhan PDRB Pertambangan dan Galian cenderung berfluktuasi, volatilitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan lifting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian litostratigrafi, struktur geologi, dan karakteristiknya, maka potensi kandungan sumberdaya geologi di Provinsi Kalimantan Utara yang utama adalah: 1) batubara; 2) minyak dan gas bumi; 3) emas, tembaga, timbal dan besi dan potensi tambahan seperti tambang mineral/batuan antara lain: 4) batuan beku andesit, diorit, granit, trakit; 5) batugamping; 6) pasir kuarsa, 7) lempung/batulempung. Batubara banyak tersebar di daerah Tanjung Redep, dengan sekitar 70 horizon atau lapisan batubara dengan nilai panas 6.000-7.000 kalori/gram dan sebagian kecil di daerah Malinau dan Tarakan, sedangkan minyak dan gas bumi banyak ditemukan di lepas pantai

(*offshore*) sekitar Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. Kegiatan eksplorasi pada tambang emas diharapkan dapat dikembangkan di daerah Busang, Long Lai, di lembar peta Napaku, serta di daerah Bengara dan Sekatak Buji di lembar peta Tarakan sebagai endapan plaser (endapan sungai) yang sumber emasnya berasal dari mineral hidrotermal oleh adanya intrusi diorit di daerah tersebut. Potensi tambahan seperti batuan beku andesit, diorit, granit, trakit banyak ditemukan di lembar peta Napaku, Malinau, Lumbis, dan Tanjung Redeb sedangkan batugamping penyebarannya terbatas di daerah lembar peta Tanjung Redeb. Pasir kuarsa dan batulempung banyak tersebar di lembar peta Tanjung Redeb, Tarakan dan Malinau.

Uruta kedua diperkirakan ditempati oleh sector usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 17,77 persen pada tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 menjadi 17,99 persen. Jika melihat potensi sektor ini sangat menjanjikan, mengingat wilayah Kalimantan utara sebagian besar adalah sungai dan laut. Padi dan jagung merupakan produk yang dihasilkan dari sektor pertanian di Kalimantan Utara yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Disektor perkebunan Kalimantan Utara memiliki produk antara lain sawit, karet, kopi, lada dan kelapa. Selain itu terdapat hutan lindung yang terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pada sektor perikanan Kalimantan Utara menghasilkan sumber

daya perikanan antara lain perikanan laut di Kota Tarakan dan perikanan darat di Kabupaten Nunukan.

Urutan ketiga ditempa oleh sektor konstruksi yang diperkirakan mencapai 12,96 persen pada tahun 2022 dan meningkat hingga tahun 2027 mencapai 13,51 persen. Hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang masih dalam proses pembangunan, sehingga mendorong peningkatan PDRB sektor konstruksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.A.2.

Tabel 4.A.2

Perkiraan Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2022-2027 (%)

| Lapangan Usaha | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 17,77 | 17,82 | 17,87 | 17,91 | 17,95 | 17,99 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 25,59 | 25,17 | 24,77 | 24,40 | 24,06 | 23,73 |
| 3. Industri Pengolahan | 8,72 | 8,59 | 8,48 | 8,37 | 8,27 | 8,18 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6. Konstruksi | 12,96 | 13,09 | 13,21 | 13,31 | 13,42 | 13,51 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11,62 | 11,78 | 11,93 | 12,08 | 12,21 | 12,33 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 6,33 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,41 | 6,43 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 3,32 | 3,39 | 3,46 | 3,53 | 3,59 | 3,64 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,19 |
| 12. Real Estate | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,14 | 5,16 | 5,17 | 5,18 | 5,19 | 5,20 |
| 15. Jasa Pendidikan | 2,65 | 2,69 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | 2,83 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,41 |
| 17. Jasa Lainnya | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 |
| Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PDRB (miliar) | 65.802 | 68.650 | 71.759 | 75.188 | 78.931 | 83.098 |

Sumber : Data Diolah

B. Rencana Pengembangan Potensi Daerah

1. Rencana Investasi

Berdasarkan Tabel 4.B.1 diketahui rencana investasi di provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 mencapai Rp. 6.218.365.647.750 dan diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga Tahun 2027 mencapai Rp. 9.222.366.581.152. Jika melihat rencana investasi per Kabupaten/Kota diketahui bahwa rencana investasi terbesar terdapat di Kabupaten Bulungan. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning Kab. Bulungan. KIPI Tanah Kuning ditetapkan sebagai **Proyek Strategis Nasional (PSN)** dalam **Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional**. Sesuai Surat Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R-0256/Seskab/DKK/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan **Gubernur Kalimantan Utara Bersama Bupati Bulungan** agar segera menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi yang baik dengan estimasi kebutuhan hingga **300 ribu tenaga kerja** untuk keperluan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). **Pengelola Kawasan industry terdiri dari** PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT. KayanPatria Propertindo(KPP) dan PT. Indonesia Strategis Industri (ISI). Kawasan Industri Tanah Kuning menjadi *pilot project green industrial park* di indonesia. Produk yang dihasilkan berupa Petrochemical,

Electronic alumine, Steel, New energy battery, Industrial silicon, Polycrystalline silicon dan Solar panel.

Selain KIPI, salah prioritas pembangunan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Utara yaitu pembangunan PLTA Sungai Kayan. Sebagai Pemasok Energi Utama untuk Kawasan Industri Pelabuhan Internasional Tanah Kuning – Mangkupadi. Pada tahap pertama pembangunan PLTA, yaitu PLTA KAYAN I akan dikelola oleh PT. KAYAN Hydro Energy, dengan kapasitas 900 MW. Rencana Bisnis Pasokan Listrik 2018 – 2028.

Tabel 4.B.1

**Recana Investasi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027**

| No | Kab/Kota | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Investasi | Tenaga Kerja |
| 1 | Bulungan | Rp 1.949.498.865.100 | | Rp 2.019.083.994.429 | | Rp 2.088.669.123.757 | | Rp 2.158.254.253.086 | | Rp 2.227.839.382.414 | | Rp 2.297.424.511.743 | |
| 2 | Tarakan | Rp 685.173.602.050 | | Rp 757.532.382.126 | | Rp 829.891.162.201 | | Rp 902.249.942.277 | | Rp 974.608.722.352 | | Rp 1.046.967.502.428 | |
| 3 | Nunukan | Rp 1.743.605.771.950 | | Rp 1.891.853.744.263 | | Rp 2.040.101.716.576 | | Rp 2.188.349.688.888 | | Rp 2.336.597.661.201 | | Rp 2.484.845.633.514 | |
| 4 | Malinau | Rp 300.915.898.500 | | Rp 243.849.559.618 | | Rp 186.783.220.736 | | Rp 129.716.881.853 | | Rp 72.650.542.971 | | Rp 15.584.204.089 | |
| 5 | Tana Tidung | Rp 1.539.171.508.150 | | Rp 1.906.846.152.396 | | Rp 2.274.520.796.642 | | Rp 2.642.195.440.888 | | Rp 3.009.870.085.134 | | Rp 3.377.544.729.380 | |
| | Total | Rp 6.218.365.645.750 | | Rp 6.819.165.832.831 | | Rp 7.419.966.019.911 | | Rp 8.020.766.206.991 | | Rp 8.621.566.394.072 | | Rp 9.222.366.581.152 | |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara

C. Perkiraan Kesempatan Kerja

Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan pengangguran. Semakin banyak kesempatan yang tercipta menyebabkan rendahnya atau berkurangnya pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha sangat diharapkan sehingga memberikan peluang kepada penduduk untuk bekerja.

Kesempatan kerja pada tahun 2022-2027 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan mencapai 353.005 orang dan terus meningkat hingga tahun 2027 mencapai 401.928 orang. Secara keseluruhan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 kesempatan kerja akan bertambah sebanyak 48.923 orang.

1. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha

Untuk tahun 2022-2027 kesempatan kerja menurut lapangan usaha diperkirakan masih didominasi dua sektor lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja paling tinggi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Untuk sector pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan mencapai 107.912 orang (30,57%) pada tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 124.096 orang (30,88%). Hal ini tentu dipengaruhi besarnya potensi sector pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi

Kalimantan Utara sehingga semakin terbuka kesempatan kerja pada sector tersebut.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menempati urutan kedua setelah pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 57.774 orang (16,37%) pada tahun 2022 dan terus meningkat secara jumlahnya mencapai 65.281 orang pada tahun 2027, walaupun secara proporsi mengalami penurunan menjadi 16,24 persen pada tahun tersebut. Potensi perdagangan yang semakin membuka kesempatan kerja mengingat wilayah Kalimantan Utara memiliki jalur perdagangan laut (pelabuhan) baik didalam negeri maupun ke luar negeri.

Sementara sector yang diperkirakan menyerap tenaga kerja terendah pada tahun 2022-2027 adalah sector lapangan usaha real estate. Pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 399 orang (0,11%) menjadi 443 orang (0,11%) pada tahun 2027. Potensi real estate belum berkembang di Provinsi Kalimantan Utara sehingga kesempatan kerjanya belum terbuka secara luas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.C.1.

Tabel 4.C.1

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Lapangan Usaha | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 107.912 | 111.404 | 115.154 | 117.515 | 120.769 | 124.096 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 10.703 | 10.773 | 10.849 | 10.897 | 10.963 | 11.030 |
| 3. Industri Pengolahan | 29.859 | 31.556 | 33.378 | 34.525 | 36.106 | 37.703 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 1.898 | 2.052 | 2.217 | 2.321 | 2.465 | 2.610 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 716 | 735 | 755 | 768 | 786 | 804 |
| 6. Konstruksi | 17.466 | 17.679 | 17.907 | 18.051 | 18.250 | 18.450 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 57.774 | 59.398 | 61.142 | 62.239 | 63.752 | 65.281 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 19.610 | 20.889 | 22.263 | 23.128 | 24.320 | 25.525 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 15.838 | 16.642 | 17.505 | 18.048 | 18.797 | 19.624 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 3.709 | 3.845 | 3.992 | 4.084 | 4.211 | 4.339 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.676 | 4.837 | 5.010 | 5.118 | 5.268 | 5.420 |
| 12. Real Estate | 399 | 409 | 419 | 425 | 434 | 443 |
| 13. Jasa Perusahaan | 4.668 | 4.742 | 4.822 | 4.872 | 4.941 | 5.010 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 34.411 | 34.624 | 34.853 | 34.997 | 35.195 | 35.396 |
| 15. Jasa Pendidikan | 21.885 | 22.131 | 22.395 | 22.562 | 22.791 | 23.023 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9.657 | 9.843 | 10.044 | 10.170 | 10.344 | 10.519 |
| 17. Jasa Lainnya | 11.826 | 12.005 | 12.198 | 12.320 | 12.487 | 12.656 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

2. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur

Pada tabel 4.C.2 menunjukkan perkiraan kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara jika dilihat berdasarkan golongan umur. Secara keseluruhan semua golongan umur diperkirakan akan mengalami peningkatan. Jika dilihat lebih rinci terlihat bahwa kesempatan kerja terbesar di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2027 diperkirakan terdapat pada golongan umur 40-44 tahun sebanyak 44.908 orang (12,72%) pada tahun 2022 hingga tahun 2027 diperkirakan mencapai 50.058 orang (12,45%). Kesempatan kerja terbesar kedua diperkirakan ada pada kelompok usia 35-39 tahun diperkirakan sebesar 43564 (12,34%) pada tahun 2022 dan secara jumlah mengalami peningkatan namun secara proporsinya mengalami penurunan hingga tahun 2027 menjadi 48.200 orang (11,99%). Kesempatan kerja terbesar ketiga diperkirakan ada pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 42.943 orang (12,16%) pada tahun 2022 dan secara jumlah mengalami peningkatan namun secara proporsinya mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 47.197 orang (11,74%).

Sedangkan kesempatan kerja untuk golongan umur 60 tahun keatas diperkirakan merupakan yang paling kecil dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada tahun 2022 memberikan kesempatan kerja sebesar 15.177 orang (4,30%) hingga tahun 2027 mencapai 20.148 orang (5,01%). Kecilnya peningkatan kesempatan kerja untuk kelompok umur ini dimungkinkan karena pada golongan

umut tersebut sudah tidak aktif dalam dunia kerja untuk menikmati hari tua.

Tabel 4.C.2

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Golongan Umur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 – 19 | 12.979 | 13.323 | 13.726 | 13.606 | 13.723 | 13.829 |
| 20 – 24 | 35.636 | 36.523 | 37.601 | 38.109 | 38.819 | 39.607 |
| 25 – 29 | 42.943 | 43.846 | 44.896 | 45.572 | 46.376 | 47.197 |
| 30 – 34 | 42.226 | 42.936 | 43.616 | 43.878 | 44.589 | 45.314 |
| 35 – 39 | 43.564 | 44.569 | 45.587 | 46.205 | 47.210 | 48.200 |
| 40 – 44 | 44.908 | 46.039 | 47.337 | 47.953 | 48.993 | 50.058 |
| 45 – 49 | 39.628 | 40.677 | 41.856 | 42.678 | 43.649 | 44.627 |
| 50 – 54 | 34.930 | 36.336 | 37.767 | 38.891 | 40.250 | 41.623 |
| 55 – 59 | 25.595 | 26.861 | 28.189 | 29.320 | 30.605 | 31.900 |
| 60 – 64 | 15.177 | 16.193 | 17.216 | 18.089 | 19.102 | 20.148 |
| 65 + | 15.419 | 16.259 | 17.112 | 17.738 | 18.562 | 19.425 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

3. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas menjadi sebuah kebutuhan. Dengan demikian seleksi alam dengan sendirinya akan berjalan dimana yang berpendidikan rendah akan cenderung berkurang.

Kesempatan kerja bagi mereka yang berpendidikan maksimum SD diperkirakan masih mendominasi seluruh kesempatan kerja yang ada sampai tahun 2022 yakni sebesar 106.143 orang (30,07%) dan diperkirakan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 98.114 orang (24,41%). Besarnya kesempatan kerja lulusan SD dikarenakan lapangan kerja pada sektor perkebunan dan perikanan (tambak) yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan rendah pada lima tahun kedepan diperkirakan masih tinggi. Namun dengan perkiraan kondisi seperti ini perlu ada peningkatan kualitas tenaga kerja dengan memberikan pelatihan dan pembekalan keterampilan sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja.

Kesempatan kerja jenjang pendidikan SLTP diperkirakan secara proporsi mengalami penurunan mencapai 15,84 persen pada tahun 2022 hingga tahun 2027 mencapai 14,95 persen. Sedangkan perkiraan kesempatan kerja untuk jenjang pendidikan SLTA ke atas yang meliputi SLTA Umum, SLTA Kejuruan, Diploma dan Universitas secara jumlah diperkirakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kesempatan kerja untuk jenjang universitas tahun 2022 diperkirakan mencapai 51.258 orang (14,52%) hingga tahun 2027 mencapai 56.922 orang (14,16%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.C.3.

Tabel 4.C.3

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SD | 106.143 | 104.999 | 103.782 | 101.450 | 99.824 | 98.114 |
| SLTP | 55.914 | 57.158 | 58.452 | 58.844 | 59.488 | 60.082 |
| SLTA Umum | 85.766 | 90.380 | 95.365 | 99.271 | 103.718 | 108.259 |
| SLTA Kejuruan | 42.295 | 46.282 | 50.569 | 54.611 | 59.280 | 64.247 |
| Diploma | 11.629 | 12.182 | 12.764 | 13.194 | 13.742 | 14.305 |
| Universitas | 51.258 | 52.563 | 53.970 | 54.670 | 55.828 | 56.922 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

4. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Jumlah perkiraan kesempatan kerja menurut jenis kelamin masih di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Hal ini terlihat dari perkiraan kesempatan kerja laki – laki sebesar 232.247 orang (65,79%) tahun 2022 dan secara jumlah mengalami peningkatan namun secara proporsinya mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 260.227 orang (64,74%). Sedangkan kesempatan kerja perempuan tahun 2022 diperkirakan sebanyak 120.758 orang (34,21%) dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 141.701 orang (35,26%). Perkiraan kesempatan kerja laki-laki lebih banyak daripada

perempuan dikarenakan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sehingga harus mencari nafkah.

Tabel 4.C.4

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Laki-laki | 232.247 | 238.768 | 245.776 | 248.773 | 254.443 | 260.227 |
| Perempuan | 120.758 | 124.795 | 129.126 | 133.267 | 137.437 | 141.701 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

5. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan

Ditinjau menurut status, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi kategori yakni formal dan informal. Kesempatan kerja yang masuk kategori informal adalah mereka yang berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas disektor pertanian maupun non pertanian serta pekerja tanpa dibayar/pekerja keluarga. Sedangkan yang masuk kategori pekerja formal adalah pekerja/buruh/karyawan dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Kesempatan kerja di provinsi Kalimantan utara pada tahun 2022-2027 terbesar diperkirakan terdapat pada sector informal. Jumlah kesempatan kerja pada sektor informal tahun 2022 diperkirakan mencapai 181.189 orang (51,33%) dan terus meningkat hingga tahun 2027

sebanyak 217.473 orang (54,11%). Sedangkan untuk sektor formal diperkirakan mencapai 171.816 orang (48,67%) pada tahun 2022 dan secara jumlah mengalami peningkatan namun secara proporsinya mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 184.455 orang (45,89%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.C.5.

Tabel 4.C.5

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Status Pekerjaan Utama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Brsh Sendiri tanpa bantuan | 67.637 | 68.807 | 69.988 | 70.409 | 71.110 | 71.704 |
| 2. Brsh dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 45.219 | 49.173 | 53.465 | 55.417 | 59.279 | 63.309 |
| 3. Brsh dibantu Buruh tetap/buruh dibayar | 10.866 | 11.155 | 11.327 | 12.247 | 12.578 | 12.896 |
| 4. Pekerja/ Buruh/Karyawan | 160.950 | 163.527 | 166.125 | 168.227 | 170.020 | 171.559 |
| 5. Pkj. Bebas di Pertanian | 13.344 | 15.731 | 18.543 | 20.192 | 23.232 | 26.688 |
| 6. Pkj. Bebas di Non Pertanian | 13.920 | 15.028 | 16.223 | 16.690 | 17.724 | 18.792 |
| 7. Pekerja keluarga/tak dibayar | 41.070 | 40.143 | 39.232 | 38.858 | 37.937 | 36.980 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

6. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan

Komposisi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama pada tahun 2022-2027 terbesar adalah pekerja kasar yang diperkirakan tahun 2022 mencapai 74.142 orang (21,00%) dan akan terus meningkat hingga tahun 2027 mencapai 97.485 orang (24,25%). Perkiraan besarnya kesempatan pada pekerja kasar dimungkinkan karena besarnya potensi pertanian, kehutanan dan perikanan yang besar sehingga membuka kesempatan kerja untuk pekerja kasar/buruh perkebunan maupun perikanan (tambak).

Jenis pekerjaan utama terbesar kedua adalah tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan yang diperkirakan akan mencapai 74.138 orang (21%) pada tahun 2022 secara jumlah mengalami peningkatan namun secara proporsinya mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 76.575 orang (19,05%). Besarnya kesempatan kerja tenaga usaha jasa dan penjualan dimungkinkan karena semakin besarnya potensi sector jasa dan perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara. Sektor jasa dan perdagangan memegang peranan penting untuk pemulihan ekonomi seperti jasa telekomunikasi, computer, jasa infrastruktur, transportasi, distribusi dan logistic, Rumah Makan/ Restoran, Perbankan, Super Market/ Mini Market, Perhotelan, Fasilitas Hiburan, dan UMKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.C.6.

Tabel 4.C.6

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Jenis Pekerjaan Utama | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Manajer | 14.890 | 15.190 | 15.471 | 15.640 | 15.852 | 16.058 |
| 2 Profesional | 28.758 | 29.638 | 30.790 | 31.747 | 32.821 | 33.910 |
| 3 Teknisi dan Asisten Profesional | 15.683 | 16.677 | 17.707 | 18.659 | 19.714 | 20.816 |
| 4 Tenaga Tata Usaha | 25.926 | 26.297 | 26.632 | 26.767 | 26.976 | 27.169 |
| 5 Tenaga Usaha Jasa dan tenaga Penjualan | 74.138 | 74.624 | 74.996 | 76.002 | 76.311 | 76.575 |
| 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 71.810 | 72.827 | 73.744 | 74.110 | 74.675 | 75.201 |
| 7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi | 28.570 | 29.867 | 31.173 | 32.292 | 33.540 | 34.815 |
| 8 Operator dan Perakit Mesin | 19.089 | 19.273 | 19.428 | 19.669 | 19.789 | 19.898 |
| 9 Pekerja Kasar | 74.142 | 79.171 | 84.960 | 87.155 | 92.203 | 97.485 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

7. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja

Jam kerja menunjukkan pemakaian waktu yang digunakan oleh tenaga kerja selama mereka bekerja. Jam kerja dibagi dua kategori yaitu bekerja penuh dimana penduduk yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu (jam kerja normal) dan setengah penganggur adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Perkiraan kesempatan kerja pada kategori yang bekerja penuh pada tahun 2022-2027 diperkirakan mencapai 222.545 orang (63,04%) pada tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 256.824 orang (63,90%). Peningkatan jam kerja ini mungkin diakibatkan oleh semakin meningkatnya produksi perusahaan yang mengakibatkan para pekerja membutuhkan waktu kerja lebih lama dibandingkan waktu kerja normal.

Kondisi berbeda diperkirakan terjadi untuk sektor setengah penganggur atau bekerja kurang dari 34 jam seminggu, dimana pada tahun 2022 mencapai 130.460 orang (36,96%) secara jumlah mengalami peningkatan tetapi secara proporsi mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 145.104 orang (36,10%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.C.7.

Tabel 4.C.7

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Jam Kerja Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Jam Kerja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0**) | 12.803 | 13.725 | 14.727 | 15.054 | 15.913 | 16.814 |
| 1-14 | 33.719 | 35.143 | 36.662 | 37.840 | 39.259 | 40.714 |
| 15-34 | 83.938 | 84.964 | 86.082 | 86.291 | 86.949 | 87.576 |
| 35-40 | 54.926 | 55.580 | 56.294 | 56.414 | 56.826 | 57.218 |
| 41-48 | 60.168 | 61.364 | 62.641 | 63.268 | 64.231 | 65.183 |
| >48 | 107.451 | 112.786 | 118.495 | 123.175 | 128.702 | 134.423 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

8. Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Sebagaimana dipaparkan dalam tabel 4.C.8 secara umum kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara terkonsentrasi di dua wilayah yakni di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Kota Tarakan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 125.519 orang (35,56%) pada tahun 2022 dan secara jumlah mengalami peningkatan namun secara proporsinya mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 142.298 orang (35,40%). Hal ini disebabkan oleh Kota Tarakan merupakan daerah yang memiliki aktivitas perekonomian paling tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Nunukan merupakan daerah terbesar kedua yang dapat menyerap tenaga kerja, tahun 2022

diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 99.323 orang (28,14%) dan terus meningkat hingga tahun 2027 mencapai 115.758 orang (28,80%). Hal ini diperkirakan terjadi salah satunya dikarenakan adanya potensi perdagangan lintas Negara melalui jalur perairan (pelabuhan) yang dapat membuka kesempatan kerja yang besar.

Tabel 4.C.8

Perkiraan Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Kabupaten/ Kota | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malinau | 45.755 | 47.134 | 48.648 | 49.279 | 50.560 | 51.864 |
| Bulungan | 67.280 | 68.473 | 69.821 | 70.427 | 71.465 | 72.538 |
| Tana Tidung | 15.129 | 16.022 | 16.929 | 17.680 | 18.568 | 19.470 |
| Nunukan | 99.323 | 102.813 | 106.421 | 108.966 | 112.320 | 115.758 |
| Kota Tarakan | 125.519 | 129.122 | 133.084 | 135.688 | 138.967 | 142.298 |
| Jumlah | 353.005 | 363.563 | 374.902 | 382.041 | 391.880 | 401.928 |

Sumber : Data Diolah

D. Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja

Besarnya produktivitas tenaga kerja merupakan gambaran besarnya aktifitas tenaga kerja yang dapat dihasilkan. Tinggi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang dicapai setiap sektor lapangan usaha tergantung pada nilai pendapatan dan jumlahnya bergantung pada nilai pendapatan dan banyaknya jumlah pekerja yang bekerja di

sektor tersebut. Secara keseluruhan tahun 2022 produktivitas tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara akan mencapai 186,41 juta/tenaga kerja. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2027 diperkirakan mencapai 206,75 juta/tenaga kerja.

Bila dilihat dari sektor usaha pada tahun 2022 produktivitas tertinggi adalah sektor pertambangan yang diperkirakan akan mencapai 1.573,47 juta/tenaga kerja dan diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2027 mencapai 1.787,99 juta/tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena potensi sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar pada PDRB di Provinsi Kalimantan Utara sementara tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut masih rendah.

Sektor terbesar kedua adalah sektor real estate yang diperkirakan mencapai 1.524,83 juta/tenaga kerja tahun 2022 hingga tahun 2027 mencapai 1.703,04 juta/tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran yang masih berkembang sehingga banyak membangun infrastruktur yang mendorong kontribusi PDRB Kalimantan Utara namun tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut masih rendah.

Sektor paling rendah adalah sektor listrik, gas dan air, namun diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sektor tersebut diperkirakan menyumbang 25,96 Juta RP/tenaga kerja dan terus meningkat hingga tahun 2027 mencapai 26,40 Juta Rp/tenaga kerja. Hal ini dimungkinkan karena sektor tersebut sebagai sektor

penunjang kegiatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.D.1.

Tabel 4.D.1

Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Juta Rp/Tenaga Kerja)

| Lapangan Usaha | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 108,34 | 109,81 | 111,34 | 114,61 | 117,35 | 120,50 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1.573,47 | 1.603,76 | 1.638,49 | 1.683,76 | 1.732,04 | 1.787,99 |
| 3. Industri Pengolahan | 192,08 | 186,95 | 182,29 | 182,32 | 180,83 | 180,24 |
| 4. Pengadaan Listrik dan Gas | 25,96 | 25,67 | 25,38 | 25,92 | 26,10 | 26,40 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 64,22 | 65,61 | 67,04 | 69,37 | 71,48 | 73,86 |
| 6. Konstruksi | 488,45 | 508,29 | 529,17 | 554,55 | 580,22 | 608,50 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 132,32 | 136,16 | 140,06 | 145,89 | 151,16 | 157,01 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 212,41 | 208,75 | 205,39 | 207,77 | 208,00 | 209,19 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 61,10 | 61,44 | 61,77 | 63,45 | 64,60 | 65,75 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 589,22 | 606,00 | 622,48 | 649,24 | 672,19 | 697,47 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 163,94 | 166,04 | 168,22 | 173,13 | 177,16 | 181,87 |
| 12. Real Estate | 1.524,83 | 1.547,40 | 1.571,97 | 1.616,17 | 1.656,32 | 1.703,04 |
| 13. Jasa Perusahaan | 31,98 | 32,10 | 32,30 | 32,81 | 33,31 | 33,93 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 98,34 | 102,23 | 106,41 | 111,28 | 116,40 | 122,09 |
| 15. Jasa Pendidikan | 79,82 | 83,56 | 87,48 | 92,12 | 96,84 | 102,00 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 87,31 | 91,34 | 95,46 | 100,61 44,02 | 105,61 | 111,04 |
| 17. Jasa Lainnya | 37,79 | 39,70 | 41,67 | 55,62 | 46,37 | 48,92 |
| Produktivitas | 186,41 | 188,83 | 191,41 | 196,81 | 201,42 | 206,75 |

Sumber : Data Diolah

E. Perkiraan Pelatihan Tenaga Kerja

Kebijakan pelatihan memerlukan dukungan data tentang seberapa besar sebenarnya tenaga kerja kita yang perlu dilatih. Data ini dapat diperoleh dari tambahan kesempatan kerja. Secara lebih spesifik data yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang perlu mendapatkan pelatihan adalah data penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Mengacu pada hasil perkiraan kesempatan kerja tahun 2022-2027 di Provinsi Kalimantan Utara prioritas penguatan SDM dengan fokus pekerja/buruh/karyawan diarahkan bagi mereka yang berpendidikan menengah atas atau SMTA keatas. Sedangkan untuk dikewirausahaan perlu juga mendapat perhatian serius khususnya pekerja bebas di non pertanian dimana pada kelompok ini difokuskan kepada mereka yang secara keterampilan maupun pendidikan berada pada tingkatan pendidikan menengah atas atau SMTA keatas. Pada periode tahun 2022-2027, ditargetkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah sebanyak 63.776 orang. Dari jumlah itu sebanyak 17.874 orang diarahkan untuk dilatih menjadi pekerja/buruh/karyawan dan berusaha dengan buruh atau pada sektor formal, dimana diperkirakan sebanyak 7.980 orang berpendidikan menengah keatas (SMTA keatas). Sedangkan sebanyak 20.493 orang diarahkan untuk dilatih menjadi pekerja pada sektor informal.

Untuk melatih tenaga kerja dengan jumlah sebagaimana tersebut diatas keberadaan instruktur yang berkualitas mutlak diperlukan. Selain itu kualitas instruktur yang tersedia secara

proporsional juga sangat menentukan berhasilnya upaya peningkatan kualitas SDM menghadapi pasar bebas tenaga kerja dimasa yang akan datang demikian juga menambahkan jumlah dan kapasitas BLK milik pemerintah untuk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih menjadii lebih banyak lagi. Juga harus tersedia peralatan dan kurikulum pelatihan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja dimasa yang akan datang.

Tabel 4.E.1

Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (Orang)

| STATUS PEKERJAAN | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | JUMLAH |
|---|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | ≤ SD | SMP | SMTA UMUM | SMTA KEJURUAN | DIPLOMA | UNIV | |
| 1. Brsh Sendiri tanpa bantuan | (867) | 634 | 2.794 | 2.586 | 334 | 777 | 6.258 |
| 2. Brsh dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | (3.099) | 2.267 | 9.990 | 9.248 | 1.193 | 2.779 | 22.377 |
| 3. Brsh dibantu Buruh tetap/buruh dibayar | (311) | 228 | 1.004 | 929 | 120 | 279 | 2.248 |
| 4. Pekerja/Buruh/ Karyawan | (2.164) | 1.583 | 6.976 | 6.458 | 833 | 1.940 | 15.626 |
| 5. Pkj. Bebas di Pertanian | (2.153) | 1.575 | 6.941 | 6.425 | 829 | 1.931 | 15.546 |
| 6. Pkj. Bebas di Non Pertanian | (845) | 618 | 2.724 | 2.521 | 325 | 758 | 6.101 |
| 7. Pekerja keluarga/tak dibayar | 607 | (444) | (1.955) | (1.810) | (233) | (544) | (4.380) |
| JUMLAH | (8.833) | 6.461 | 28.473 | 26.356 | 3.400 | 7.920 | 63.776 |

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.E.2

Target Kapasitas Terpasang, Jumlah Instruktur dan Lulusan
Pelatihan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah kapasitas terpasang pemerintah | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jumlah kapasitas terpasang swasta | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 |
| Jumlah instruktur pemerintah | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Jumlah instruktur swasta | | | | | | |
| Jumlah lulusan pelatihan pemerintah | 3.775 | 4.379 | 4.983 | 5.587 | 6.191 | 6.795 |
| Jumlah lulusan pelatihan swasta | | | | | | |
| Jumlah lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jumlah lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan pemerintah yang memiliki sertifikat kompetensi | 3.775 | 4.379 | 4.983 | 5.587 | 6.191 | 6.795 |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan swasta yang memiliki sertifikat kompetensi | | | | | | |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan pemerintah yang ditempatkan (bekerja dan atau berwirausaha) | 3.775 | 4.379 | 4.983 | 5.587 | 6.191 | 6.795 |
| Jumlah alumni di lembaga pelatihan swasta yang ditempatkan (bekerja dan atau berwirausaha) | | | | | | |

Sumber : Data Diolah

F. Perkiraan Penempatan Tenaga Kerja

Berdasarkan lapangan usaha, perkiraan tambahan kesempatan kerja terbesar pada kurun waktu tahun 2022-2027 terdapat pada sektor jasa pertanian, kehutanan dan perikanan yang diperkirakan sebanyak 21.097 orang. Dimana perkiraan penempatan terbesarnya untuk status

jabatan pekerja bebas di pertanian diperkirakan sebanyak 15.546 orang.

Industri pengolahan merupakan sektor yang menempati urutan terbesar kedua yang diperkirakan dapat menambah kesempatan kerja sebanyak 10.231 orang, dimana perkiraan penempatan terbesarnya untuk status jabatan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar diperkirakan sebanyak 4.658 orang. Industri pengolahan meliputi pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil.

Tabel 4.F.1

Tambahan Kesempatan Kerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| STATUS PEKERJAAN | LAPANGAN USAHA | | | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|---|----------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. Bish Sendiri tanpa bantuan | 824 | 54 | 1.302 | 118 | 15 | 163 | 1.246 | 982 | 626 | 105 | 123 | 7 | 57 | 164 | 189 | 143 | 138 | 6.258 |
| 2. Bish dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 2.948 | 194 | 4.658 | 422 | 52 | 585 | 4.457 | 3.512 | 2.238 | 374 | 441 | 26 | 203 | 585 | 675 | 512 | 493 | 22.377 |
| 3. Bish dibantu Buruh tetap/buruh dibayar | 296 | 20 | 468 | 42 | 5 | 59 | 448 | 353 | 225 | 38 | 44 | 3 | 20 | 59 | 68 | 51 | 50 | 2.248 |
| 4. Pekerja/Buruh/Karyawan | 2.059 | 136 | 3.252 | 295 | 37 | 408 | 3.112 | 2.452 | 1.563 | 261 | 308 | 18 | 142 | 409 | 472 | 358 | 344 | 15.626 |
| 5. Pkji. Bebas di Pertanian | 15.546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.546 |
| 6. Pkji. Bebas di Non Pertanian | - | 61 | 1.463 | 133 | 16 | 184 | 1.400 | 1.103 | 703 | 118 | 139 | 8 | 64 | 184 | 212 | 161 | 155 | 6.101 |
| 7. Pekerja keluarga tak dibayar | (577) | (38) | (912) | (83) | (10) | (114) | (872) | (687) | (438) | (73) | (86) | (5) | (40) | (115) | (132) | (100) | (96) | (4.380) |
| JUMLAH | 21.097 | 427 | 10.231 | 928 | 115 | 1.284 | 9.791 | 7.715 | 4.917 | 822 | 970 | 57 | 446 | 1.285 | 1.484 | 1.125 | 1.083 | 63.776 |

Keterangan Lapangan Usaha :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Tabel 4.F.2

Target Jumlah Lowongan Kerja, Pencari Kerja Terdaftar, Pencari Kerja Ditempatkan, Bursa Kerja Swasta dan Pengantar Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lowongan kerja terdaftar | 5.020 | 6.238 | 7.456 | 8.674 | 9.892 | 11.110 |
| Pencari kerja terdaftar | 5.020 | 6.238 | 7.456 | 8.674 | 9.892 | 11.110 |
| Pencari kerja ditempatkan | 5.020 | 6.238 | 7.456 | 8.674 | 9.892 | 11.110 |
| Bursa kerja pemerintah | 1 Kali |
| Bursa kerja swasta | | | | | | |
| Jumlah pengantar kerja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Sumber : Data Diolah

G. Perkiraan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan pengawasan norma ketenagakerjaan tetapi juga menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial ini yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi bila ada Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional perlu dibentuk Serikat Pekerja (SP) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat hubungan industrial yang paling utama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi jembatan utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Tabel 4.G.1

Target Jumlah Mediator, PP, PKB, SP/SB, LKS Bipartit, Perusahaan dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Mediator | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 |
| Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 189 | 289 | 389 | 489 | 589 | 689 |
| Jumlah SP / SB | | | | | | |
| Jumlah Lembaga Bipartit | 189 | 289 | 389 | 489 | 589 | 689 |
| Jumlah perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang | 189 | 289 | 389 | 489 | 589 | 689 |
| Perusahaan peserta jamsostek aktif | 3.577 | 4.461 | 5.345 | 6.229 | 7.113 | 7.997 |
| Tenaga kerja peserta jamsostek aktif | 110.289 | 130.999 | 151.709 | 172.419 | 193.129 | 213.839 |
| Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama | | | | | | |
| Jumlah kasus hubungan industrial | | | | | | |

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.G.2

Target Perkembangan Upah Minimum Provinsi Kalimantan
Utara, Tahun 2022-2023

| Tahun | UMP (Rp) | KHL (Rp) | Upah riil yang diterima pekerja (Rp) | Rata-rata jam kerja pekerja | Prosentase UMK/KHL (%) |
|-------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2022 | 3.016.738 | | | | |
| 2023 | 3.251.702 | | | | |

Sumber : Data Diolah

H. Perkiraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama mereka terkait dengan hal ini, melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum.

Layanan pengawasan ketenagakerjaan mempromosikan dan memastikan kepatuhan kepada perundang-undangan nasional, seperti dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi kerja dan aspek-aspek lain dari hubungan kerja. Layanan-layanan ini juga membantu meningkatkan keefektifan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat perusahaan, mencegah konflik dan

mempromosikan kedamaian sosial. Pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 diperkirakan mengalami peningkatan.

Tabel 4.G.3

Jumlah Perusahaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah perusahaan yang melapor ketenagakerjaan | 7405 | 7505 | 7605 | 7705 | 7805 | 7905 |
| Jumlah tenaga kerja | 353.984 | 369.816 | 385.648 | 401.480 | 417.312 | 433.144 |
| Jumlah kecelakaan kerja | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah perush. yang diaudit SMK3 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Jumlah perusahaan yang wajib menerapkan SMK3* | 2325 | 2805 | 3285 | 3765 | 4245 | 4725 |
| Jumlah pengawas ketenagakerjaan | 8 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
| Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3 | 2325 | 2805 | 3285 | 3765 | 4245 | 4725 |
| Jumlah Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3 | 2325 | 2805 | 3285 | 3765 | 4245 | 4725 |

Sumber : Data Diolah

BAB V

PERKIRAAN KESEIMBANGAN ANTARA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Penganggur terbuka dimaksudkan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Terdapatnya pengangguran menunjukkan bahwa perekonomian belum sepenuhnya dapat menyerap angkatan kerja yang ada. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 13.716 orang dengan TPT sebesar 3,74 persen dan diperkirakan akan mengalami penurunan hingga tahun 2027 menjadi 12.479 orang dengan TPT sebesar 3,01 persen.

A. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur

Secara keseluruhan perkiraan pengangguran terbuka Tahun 2022-2027 di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Apabila ditinjau dari golongan umur, jumlah penganggur usia 20-24 tahun merupakan jumlah penganggur terbesar diantara kelompok umur lainnya. Tahun 2022 jumlah penganggur terbuka pada usia 20-24 tahun diperkirakan sebanyak 4.604 orang. Namun diperkirakan akan mengalami penurunan hingga tahun 2027 menjadi 4.115 orang.

Penganggur golongan umur 20-24 tahun merupakan golongan umur yang baru saja menyelesaikan pendidikan di

tingkat perguruan tinggi (*fresh graduate*). Umumnya perusahaan memilih mempekerjakan karyawan yang sudah berpengalaman dibandingkan dengan para lulusan universitas/diploma yang dinilai masih kurang terampil. Namun, saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah membuat program yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu atau keahlian yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja melalui program Kampus Merdeka sehingga diharapkan perusahaan dapat merekrut angkatan kerja yang baru menyelesaikan pendidikannya.

Tabel 5.A.1

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027
(Orang)

| Golongan Umur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 – 19 | 2.261 | 1.975 | 1.629 | 1.805 | 1.743 | 1.691 |
| 20 – 24 | 4.604 | 4.413 | 4.038 | 4.243 | 4.186 | 4.115 |
| 25 – 29 | 3.279 | 3.064 | 2.801 | 2.865 | 2.801 | 2.764 |
| 30 – 34 | 720 | 658 | 622 | 1.028 | 1.003 | 968 |
| 35 – 39 | 765 | 664 | 533 | 829 | 798 | 762 |
| 40 – 44 | 490 | 388 | 81 | 475 | 471 | 461 |
| 45 – 49 | 544 | 453 | 253 | 404 | 393 | 385 |
| 50 – 54 | 404 | 321 | 236 | 484 | 473 | 464 |
| 55 – 59 | 200 | 176 | 117 | 271 | 267 | 259 |
| 60 – 64 | 201 | 172 | 147 | 283 | 277 | 269 |
| 65 + | 249 | 205 | 150 | 352 | 350 | 341 |
| Jumlah | 13.716 | 12.489 | 10.607 | 13.040 | 12.761 | 12.479 |

Sumber Data: Data Diolah

Apabila dilihat dari TPTnya diperkirakan pada tahun 2022 yang terbesar pada golongan umur 15-19 tahun yakni sebesar 14,83 persen yang mengalami penurunan hingga tahun 2027 mencapai 10,89 persen. Tingginya angka penganggur usia sekolah ini mengindikasikan bahwa upaya dalam menahan agar penduduk yang masih berusia sekolah ini masih harus ditingkatkan dan bukan menitikberatkan pada penambahan kesempatan kerja bagi mereka. Artinya target TPT sampai tahun 2027 pada golongan umur ini diperkirakan bisa tercapai apabila pemerintah secara serius membuat suatu kebijakan dan program untuk menahan usia sekolah masuk ke dalam kegiatan ekonomi melalui beasiswa, bantuan sarana dan prasana sekolah khususnya bagi siswa tidak mampu serta pendidikan informal melalui pelatihan-pelatihan yang bisa dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Hal ini karena dalam upaya pengurangan penganggur ini selain menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya di sisi lain harus juga ditekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja secara fisik maupun psikis termasuk tingkat kematangan dalam bekerja.

Sementara untuk golongan umur 55 tahun ke atas diperkirakan TPTnya terkecil yaitu sebesar 0,77 persen tahun 2022 dan meningkat hingga tahun 2027 menjadi 0,81 persen.

Tabel 5.A.2

Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (%)

| Golongan Umur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15 - 19 | 14,83 | 12,91 | 10,61 | 11,71 | 11,27 | 10,89 |
| 20 - 24 | 11,44 | 10,78 | 9,70 | 10,02 | 9,73 | 9,41 |
| 25 - 29 | 7,09 | 6,53 | 5,87 | 5,91 | 5,69 | 5,53 |
| 30 - 34 | 1,68 | 1,51 | 1,41 | 2,29 | 2,20 | 2,09 |
| 35 - 39 | 1,73 | 1,47 | 1,16 | 1,76 | 1,66 | 1,56 |
| 40 - 44 | 1,08 | 0,83 | 0,17 | 0,98 | 0,95 | 0,91 |
| 45 - 49 | 1,35 | 1,10 | 0,60 | 0,94 | 0,89 | 0,86 |
| 50 - 54 | 1,14 | 0,88 | 0,62 | 1,23 | 1,16 | 1,10 |
| 55 - 59 | 0,77 | 0,65 | 0,41 | 0,92 | 0,87 | 0,81 |
| 60 - 64 | 1,30 | 1,05 | 0,85 | 1,54 | 1,43 | 1,32 |
| 65 + | 1,59 | 1,25 | 0,87 | 1,95 | 1,85 | 1,72 |
| TPT | 3,74 | 3,32 | 2,75 | 3,30 | 3,15 | 3,01 |

Sumber Data: Data Diolah

Besarnya TPT golongan umur muda, mengindikasikan bahwa dalam dua tahun kedepan sebagian penganggur masih berada dalam kelompok usia muda. Tingginya TPT usia muda diperkirakan umumnya golongan umur tersebut baru lulus sekolah dan belum mempunyai keterampilan di dalam bekerja. Selain itu seperti tren yang sekarang terjadi golongan muda belum mempunyai tanggungjawab dalam keluarga sehingga cenderung memilih-milih pekerjaan.

B. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan, jumlah penganggur terbuka diperkirakan didominasi oleh yang berpendidikan SMTA umum. Tingginya penganggur terbuka dengan tingkat pendidikan SMTA Umum menunjukkan bahwa banyak penganggur yang telah menyelesaikan masa pendidikan 12 tahun. Namun, lulusan SMTA UMUM yang diharapkan melanjutnya pendidikannya ke jenjang lebih tinggi diperkirakan masih banyak yang aktif dalam kegiatan ekonom namun tidak tertampung di dunia kerja.

Jumlah penganggur di berbagai jenjang diharapkan akan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tahun 2022 penganggur dengan jenjang pendidikan SMTA Umum diperkirakan mencapai 4.418 orang dan mengalami penurunan hingga tahun 2027 menjadi 3.675 orang. Sedangkan penganggur jenjang pendidikan diploma diperkirakan merupakan penganggur dengan jumlah paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya, mencapai 933 orang pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan menjadi 966 orang tahun 2027. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.B.1 dan 5.B.2

Tabel 5.B.1

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maksimum SD | 1.660 | 1.548 | 1.420 | 1.999 | 1.935 | 1.895 |
| SMTP | 2.014 | 1.563 | 1.005 | 1.341 | 1.302 | 1.241 |
| SMTA Umum | 4.418 | 3.994 | 3.274 | 3.815 | 3.760 | 3.675 |
| SMTA Kejuruan | 2.937 | 2.765 | 2.523 | 2.855 | 2.778 | 2.707 |
| Diploma | 933 | 914 | 871 | 989 | 979 | 966 |
| Universitas | 1.755 | 1.705 | 1.514 | 2.041 | 2.006 | 1.997 |
| Jumlah | 13.716 | 12.489 | 10.607 | 13.040 | 12.761 | 12.479 |

Sumber Data: Data Diolah

Tabel 5.B.2

Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)

| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maksimum SD | 1,54 | 1,45 | 1,35 | 1,93 | 1,90 | 1,90 |
| SMTP | 3,48 | 2,66 | 1,69 | 2,23 | 2,14 | 2,02 |
| SMTA Umum | 4,90 | 4,23 | 3,32 | 3,70 | 3,50 | 3,28 |
| SMTA Kejuruan | 6,49 | 5,64 | 4,75 | 4,97 | 4,48 | 4,04 |
| Diploma | 7,43 | 6,98 | 6,39 | 6,97 | 6,65 | 6,32 |
| Universitas | 3,31 | 3,14 | 2,73 | 3,60 | 3,47 | 3,39 |
| TPT | 3,74 | 3,32 | 2,75 | 3,30 | 3,15 | 3,01 |

Sumber Data: Data Diolah

Masih tingginya perkiraan jumlah penganggur terbuka untuk tingkat pendidikan SMTA Umum dan SMTA Kejuruan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan mengoptimalkan BLK milik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian ini agar dapat bersaing di pasar kerja.

Semakin menurunnya perkiraan jumlah penganggur terbuka untuk lulusan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa lulusan pendidikan tinggi memang sangat diminati oleh pemberi kerja dikarenakan kualitas dan kompetensinya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini bisa dilihat dengan semakin menurunnya TPT untuk tingkat pendidikan diploma dan universitas. Pada tahun 2022 TPT untuk tingkat pendidikan diploma diperkirakan sebesar 7,43 persen dan hingga tahun 2027 turun menjadi sebesar 6,32 persen, namun untuk penganggur terbuka tingkat pendidikan universitas dimana pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,31 persen mengalami kenaikan menjadi 3,39 persen pada tahun 2027.

C. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Secara umum jumlah penganggur terbuka laki-laki dan perempuan diperkirakan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penganggur terbuka laki-laki sebanyak 8.624 orang dengan TPT 3,58 persen tahun 2022 dan mengalami penurunan hingga tahun 2027 menjadi 8.029 orang dengan TPT 2,99 persen.

Sedangkan penganggur terbuka perempuan diperkirakan mencapai 5.093 orang dengan TPT 4,05 persen

tahun 2022 hingga tahun 2027 mencapai 4.450 orang dengan TPT 3,04 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.C.1 dan 5.C.2.

Tabel 5.C.1

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Laki-laki | 8.624 | 7.682 | 6.308 | 5.564 | 5.307 | 5.029 |
| Perempuan | 5.093 | 4.807 | 4.299 | 4.476 | 4.454 | 4.450 |
| Jumlah | 13.716 | 12.489 | 10.607 | 13.040 | 12.761 | 12.479 |

Sumber Data: Data Diolah

Tabel 5.C.2

Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (%)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laki-laki | 3,58 | 3,12 | 2,50 | 3,33 | 3,16 | 2,99 |
| Perempuan | 4,05 | 3,71 | 3,22 | 3,25 | 3,14 | 3,04 |
| TPT | 3,74 | 3,32 | 2,75 | 3,30 | 3,15 | 3,01 |

Sumber Data: Data Diolah

Berdasarkan data tersebut, meskipun diperkirakan akan mengalami penurunan penganggur laki-laki dan perempuan, pemerintah daerah harus bisa merangkul dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder agar jumlah penganggur laki-laki dan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dapat terus menurun. Peran serta perempuan dalam dunia kerja harus terus ditingkatkan dengan membuka kesempatan kerja yang ramah terhadap perempuan. Begitu juga dengan kesempatan

kerja laki-laki karena laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab selain terhadap dirinya tapi sekaligus terhadap keluarganya.

D. Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota

Secara umum jumlah penganggur terbuka menurut Kabupaten/Kota diperkirakan mengalami penurunan kecuali Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022 diperkirakan Kabupaten Tana Tidung TPTnya tertinggi yakni mencapai 4,29 persen menurun menjadi 2,58 persen pada tahun 2027. Namun 149alua dilihat dari jumlahnya merupakan yang terendah. Kemudian disusul oleh Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Kota Tarakan. TPT paling rendah terdapat di daerah Kabupaten Malinau mencapai 2,18 persen tahun 2022 dan menurun hingga tahun 2027 menjadi 2,86 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.D.1 dan 5.D.2.

Tabel 5.D.1

Perkiraan Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 (Orang)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Malinau | 1.502 | 1.333 | 1.034 | 1.632 | 1.579 | 1.528 |
| Bulungan | 2.498 | 2.225 | 1.876 | 2.275 | 2.220 | 2.166 |
| Tana Tidung | 679 | 623 | 555 | 643 | 588 | 515 |
| Nunukan | 3.792 | 3.473 | 3.073 | 3.797 | 3.742 | 3.689 |
| Kota Tarakan | 5.246 | 4.835 | 4.069 | 4.693 | 4.632 | 4.582 |
| Jumlah | 13.716 | 12.489 | 10.607 | 13.040 | 12.761 | 12.479 |

Sumber Data: Data Diolah

Tingginya TPT di Kabupaten Tana Tidung diperkirakan masih rendahnya aktivitas perekonomian di daerah tersebut dikarenakan Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah pemekaran yang paling muda dibandingkan daerah lainnya sehingga kesempatan kerja yang ada masih cenderung terbatas.

Tabel 5.D.2

Perkiraan Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2022-2027 (%)

| Jenis Kelamin | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Malinau | 3,18 | 2,75 | 2,08 | 3,20 | 3,03 | 2,86 |
| Bulungan | 3,58 | 3,15 | 2,62 | 3,13 | 3,01 | 2,90 |
| Tana Tidung | 4,29 | 3,74 | 3,17 | 3,51 | 3,07 | 2,58 |
| Nunukan | 3,68 | 3,27 | 2,81 | 3,37 | 3,22 | 3,09 |
| Kota Tarakan | 4,01 | 3,61 | 2,97 | 3,34 | 3,23 | 3,12 |
| TPT | 3,74 | 3,32 | 2,75 | 3,30 | 3,15 | 3,01 |

Sumber : Data Diolah

BAB VI

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

A. Kebijakan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa pemecahan terhadap masalah ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait maka kebijakan umum yang dapat diterapkan secara luas dan mencakup seluruh lapisan baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta, mengacu kebijakan pusat serta Visi dan Misi Daerah.

Mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara adalah “*Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera*”.

Untuk mewujudkan Visi dan misi Kepala Daerah tersebut maka pembangunan perlu difokuskan pada:

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jamiman Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota

5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial
9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota
10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Selain itu prasyarat utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen untuk mengutamakan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan yang benar-benar kuat dari semua pihak mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat paling penting untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif. Perlu disadari bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan adalah penyaluran mekanisme pasar kerja, pelatihan, pembinaan

hubungan industrial, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan. Selain itu, mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran serta aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan.

Adapun kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengendalian Pertambahan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

Di dalam kebijakan umum selain dipengaruhi oleh kualitas penduduk adalah pengaturan kuantitas penduduk melalui program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas (KB). Melalui program ini tingkat kelahiran penduduk dapat dikendalikan. Pengendalian pertambahan

penduduk merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa, baik secara individu maupun institusi. Pengendalian penambahan penduduk sangat berdampak pada penambahan angkatan kerja di masa yang akan datang. Untuk itu pengendalian penambahan penduduk harus menjadi perhatian secara terus menerus. Pertambahan penduduk dikendalikan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan keluarga berkualitas melalui upaya peningkatan jumlah dan kualitas keluarga yang mengikuti program Keluarga Berkualitas.
- b. Pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- c. Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi.
- d. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera.
- e. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

2. Kebijakan Kesehatan

Kebijakan di bidang kesehatan merupakan faktor pendukung peningkatan sumber daya manusia. Unsur sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek dan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan berdampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat. Penajaman upaya ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan pendidikan dan kesehatan yang memadai akan mendukung daya saing sumberdaya manusia dan diharapkan pada gilirannya kehandalan SDM ini akan mendukung pencapaian kemandirian daerah.

Adapun kebijakan untuk mencapai hal tersebut antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- e. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
- f. Meningkatkan inovasi program pelayanan kesehatan di seluruh daerah terutama di daerah perbatasan dan terpencil
- g. Keluarga berkualitas serta pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga
- h. Meningkatnya kesadaran penerapan norma k3 pada perusahaan dan pekerja.
- i. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi pekerja dan keluarganya.

3. Kebijakan Investasi

Upaya kebijakan investasi melalui Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menerapkan teknologi pengembangan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan investasi tahun 2022-2027 diharapkan akan terus meningkat dengan dikembangkannya beberapa program:

- a. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
- b. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)

Adapun kebijakan untuk mencapai hal tersebut antara lain adalah:

- a. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.
- b. Meningkatkan efektivitas promosi investasi daerah.
- c. Memberikan pelayanan perizinan yang transparan tanpa pungutan.
- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi perizinan di daerah.

B. Kebijakan Pengendalian Tambahan Angkatan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara yang utama adalah kurangnya penyerapan terhadap angkatan kerja yang ada, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah angkatan kerja baru tetapi terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada sehingga menimbulkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal maupun informal khususnya usia muda akan memberikan kontribusi dalam merubah struktur penduduk kelompok berpendidikan rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Pengembangan tingkat pendidikan selain meningkatkan kualitas juga produktivitas.

Pembangunan pendidikan untuk mengatasi pengangguran dalam era reformasi dan globalisasi menuntut pada pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu menyerap perkembangan ilmu dan teknologi. Kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja dapat dilakukan melalui:

1. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau. Hal ini diharapkan angkatan kerja yang akan masuk ke pasar kerja dapat dikendalikan, karena mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pemberian beasiswa ke perguruan tinggi sehingga diharapkan akan terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja muda.
3. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang berkualitas melalui peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
4. Tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang kurikulumnya berorientasi pada dunia usaha dan dunia industri.
5. Meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan.

C. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan kondisi pendidikan dan pelatihan saat ini dan sumber daya lokal yang dimiliki serta pemahaman akan sumber daya lokal yang dimiliki, maka berikut diuraikan beberapa program pendidikan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja:

1. Menuntaskan program belajar 9 tahun dan upaya menuju program wajib belajar 12 tahun secara merata.
2. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, melalui program:
 - a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru
 - d. Peningkatan tata kelola pendidikan yang lebih efisien dan efektif
 - e. Peningkatan kualifikasi sekolah ke sekolah standar nasional
3. Standarisasi biaya pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
4. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, anak yatim yang berprestasi dan anak berprestasi (Kartu Indonesia Pintar).
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha.

D. Kebijakan Sektor

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Posisi tertinggi kedua penyumbang Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Lapangan usaha tersebut menyumbang sekitar 17,06 persen hingga 17,99 persen. Selain itu juga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan dapat menciptakan kesempatan mencapai 107.912 orang (30,57%) pada tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2027 mencapai 124.096 orang (30,88%). Tenaga kerja di sektor pertanian ini antara lain sebagai peternak, petani, penggarap, agro industri dan lain sebagainya.

Kebijakan sektor pertanian yang mungkin bisa dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan infrastruktur fisik pertanian seperti saluran irigasi, saluran drainase, dan jalan pertanian (farm road) dan lainnya.
- b. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian meliputi benih, bibit/induk, pupuk, obat-obatan/pestisida, dan pakan.
- c. Peningkatan pemanfaatan lahan pertanian
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian
- e. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai produksi pertanian.

- f. Penanganan hasil pertanian pasca panen, pengolahan hasil, standarisasi, pelayanan pengawasan mutu hasil, promosi dan pemasaran hasil secara lebih baik dan terpadu sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian.
- g. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha serta untuk mendukung pengembangan agroindustri.
- h. Pengawasan dan pengendalian pemeriksaan kualitas bahan asal hewan dan nabati.
- i. Penguatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- j. Menguatkan peran serta pemerintah dalam pengaturan, pembinaan dan penguatan modal masyarakat dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- k. Mempertahankan lahan pangan berkelanjutan dalam mencapai ketahanan pangan dan konservasi sumberdaya air.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Jika dilihat dari perkiraan proporsi Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027, sektor atau lapangan usaha pertambangan dan penggalian diperkirakan mencapai 25,59 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2027 diperkirakan menjadi 23,73 persen. Sektor pertambangan

dan penggalian diperkirakan menempati urutan terbesar dibandingkan sektor usaha lainnya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kebijakan bidang sektor pertambangan dan penggalian antara lain:

- a. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta pemberdayaan tenaga kerja di sekitar areal pertambangan dan penggalian.
- b. Pengembangan usaha penggalian yang bersifat padat karya dapat diperluas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi sumber daya energi.
- d. Mendorong upaya penyediaan energi secara lebih merata.
- e. Mendorong dan meningkatkan upaya ekspor jasa dan teknologi energi.
- f. Meningkatkan upaya komersialisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta peningkatan pemanfaatan energi setempat.
- g. Mengarahkan penggunaan energi di sektor transportasi agar lebih efisien, beragam, dan bersih.
- h. Menyertakan dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup mulai dari kegiatan eksploitasi sampai pemanfaatan terakhir.

3. Sektor Industri Pengolahan

Jika dilihat dari perkiraan proporsi Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2022-2027, proporsi sektor industri pengolahan diperkirakan mencapai 8,72 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan mengalami fluktuasi cenderung menurun hingga tahun 2027 menjadi 8,18 persen.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan sektor industri perlu diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri;
- b. Membangun industri di setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi unggulan masing – masing daerah.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kemitraan antara UKM di Provinsi Kalimantan Utara dengan pengusaha/badan usaha lainnya.
- d. Meningkatkan kemampuan perajin di sektor UKM, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- e. Menyediakan perencanaan tata ruang yang mampu menunjang investasi di bidang industri.
- f. Membangun jejaring (networking) kerja pembangunan perekonomian daerah.
- g. Menyediakan pinjaman lunak bagi UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan.
- h. Menerapkan teknologi tepat guna (TTG) dalam membangun UMKM.
- i. Membangun industri berdasarkan kategori penting dan mendesak dengan mengacu kepada kemampuan keuangan dan modal yang tersedia.
- j. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan yang mempunyai basic agribisnis di pedesaan.

- k. Inovasi pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi kegiatan agribisnis serta argo industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- l. Pemantapan dan pendalaman struktur industri yang dilakukan melalui penguatan struktur industri, peningkatan keterkaitan antara sektor industri dengan sektor yang lainnya, peningkatan kandungan lokal, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor industri terutama agroindustri, peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan peningkatan persebaran industri.
- m. Peningkatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga terwujud kekuatan bersama yang saling mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, profesionalisme dan peran serta seluruh pelaku di sektor industri.
- n. Membangun kemitraan yang diformulasikan sebagai kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar, yang disertai adanya pembinaan dan pendampingan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat, saling menghidupi serta saling menguntungkan.
- o. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi

industri yang disesuaikan dengan arah pengembangan industri rumah tangga dan pedesaan.

4. Sektor Listrik, Gas dan Air

Selama periode tahun 2022-2027, sektor listrik dan gas diperkirakan berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 0,07 persen dan diperkirakan mengalami kenaikan hingga tahun 2027 menjadi 0,08 persen. Namun demikian perkembangan sektor ini sangat terkait dengan sektor dan aspek lain seperti sektor industri, bangunan, perdagangan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu daya serap sektor ini terhadap tenaga kerja masih sangat potensial untuk dikembangkan. Peranan sektor ini menjadi sangat penting mengingat keterkaitan yang tinggi antara sektor ini dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Sub sektor listrik sangat dominan di sektor ini, dan sebagaimana diketahui bahwa listrik merupakan sumber energi yang diperlukan semua aktifitas. Pengadaan potensi kelistrikan merupakan sumber daya yang potensial di Provinsi Kalimantan Utara sejalan dengan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan dan Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI). Pada tahap pertama pembangunan PLTA, yaitu PLTA KAYAN I akan dikelola oleh PT. KAYAN Hydro Energy, dengan kapasitas 900 MW. Rencana Bisnis Pasokan Listrik 2018 – 2028.

Sehingga pekerja di sector ini perlu ditingkatkan dengan tetap mempertahankan prinsip efisiensi dan

produktivitas usaha. Kebutuhan tenaga kerja di sektor ini akan meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik, baik untuk permintaan akhir maupun industri dan pemerintahan.

Penyediaan air bersih akan menjadi sektor yang berkembang seiring dengan menurunnya kualitas dan volume air tanah, pengembangan teknologi dalam penciptaan air bersih akan membuat penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar. Konversi minyak tanah menjadi gas membuat sektor ini makin berkembang dan penyerapan lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kebijakan bidang sektor Listrik, Gas dan Air Bersih antara lain:

- a. Pengembangan listrik yang ramah lingkungan untuk mendukung kebutuhan kawasan industri, permukiman, pengembangan jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan kawasan industri, permukiman, dan kepentingan komersial.
- b. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.
- c. Pengembangan teknologi dalam penyediaan air bersih.
- d. Pengembangan prioritas pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan dan Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

5. Sektor Bangunan

Perkembangan sektor konstruksi tidak saja berdampak pada kehidupan ekonomi, namun juga berimbas positif kepada kehidupan sosial masyarakat. Kohesi sosial di masyarakat dan kemajuan ekonomi bisa

terbangun dengan berbagai hasil kerja para pelaku di industri konstruksi. Keberadaan berbagai macam hasil pekerja konstruksi, seperti pasar, sekolah, pusat bisnis, gedung pemeritahan, jembatan hingga sarana jalan raya akan menciptakan gerak perekonomian, sekaligus menopang kehidupan sosial budaya suatu daerah.

Sektor kontruksi diperkirakan akan berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebesar 12,96 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga tahun 2027 menjadi 13,51 persen. Sehubungan dengan itu maka kebijakan yang perlu dilakukan untuk sektor ini adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur yang bersifat padat karya, seperti jalan, pasar, irigasi, gedung perkantoran, pertokoan, sekolah dan sebagainya.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi serta pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya.
- c. Mempersiapkan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang jasa konstruksi untuk menopang besarnya bisnis jasa konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara.

6. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan akan berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebesar 11,62 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mengalami

peningkatan hingga tahun 2027 menjadi 12,33 persen. Kegiatan yang tercakup dalam sektor perdagangan tergolong sangat luas dan beragam, mulai dari perdagangan kecil seperti warung rokok dan warung makanan hingga perdagangan besar seperti keagenan dan distributor serta jasa pemeliharaan kendaraan.

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan berbagai barang dan jasa yang penyampaiannya adalah melalui aktivitas perdagangan, maka prospek pengembangan usaha perdagangan ini menjadi cerah. Kebijakan yang perlu ditempuh untuk mengembangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah:

- a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur serta sarana transportasi untuk meningkatkan lancarnya arus barang masuk dan keluar antar wilayah.
- b. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan.
- c. Mengembangkan UKM untuk makin berperan sebagai barang dan jasa.
- d. Mengembangkan UKM yang bergerak di bidang kerajinan/souvenir khas daerah sebagai pendukung potensi pariwisata yang dimiliki oleh setiap daerah.
- e. Membangun koperasi yang kuat dan tangguh.
- f. Memberikan dukungan subsidi ongkos angkut barang bagi daerah perbatasan.

7. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan akan berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,33 persen pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga tahun 2027 menjadi 6,43 persen. Untuk itu diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor angkutan agar berdampak pada perluasan dan penciptaan kesempatan kerja. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan di sektor angkutan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan transportasi darat, air dan udara yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di wilayah. Adanya penambahan rute penerbangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang menghubungkan antar wilayah serta meningkatkan sarana dan prasarana transportasi air/laut yang menghubungkan antar wilayah.
- b. Pengembangan transportasi antar pusat-pusat wilayah pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi.

- d. Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.
- e. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui: penataan sistem jaringan, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas alat kelengkapan jalan, penataan jaringan dan ijin trayek serta kerjasama antar lembaga pemerintah pusat dan daerah.
- f. Perluasan jangkauan pelayanan pos dan telekomunikasi hingga ke daerah terpencil
- g. Meningkatkan peran swasta/masyarakat sebagai mitra usaha di bidang pos dan telekomunikasi dalam iklim persaingan investasi yang kondusif.
- h. Peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang angkutan barang dan orang.
- i. Penyerapan tenaga kerja lokal dalam bidang jasa perhubungan
- j. Penyediaan jasa transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

8. Sektor Keuangan dan Asuransi

Peran serta sektor keuangan dan asuransi dalam mendukung sisi pembiayaan merupakan pilar yang menentukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas di sektor riil. Jadi kinerja sektor moneter sangat mempengaruhi kinerja sektor riil, untuk itu diperlukan peran serta sektor moneter yang lebih agresif lagi untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang mana akan mendorong perluasan dan penciptaan kesempatan

kerja. Hal ini diantaranya dapat dilaksanakan melalui peran perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Sektor keuangan dan asuransi diperkirakan akan menyerap tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4.676 orang pada tahun 2022 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2027 mencapai 5.420 orang. Walaupun kontribusi nilai tambah sektor dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian masih relatif kecil, namun keberadaannya sangat penting dan strategis, karena sektor keuangan dan perbankan merupakan urat nadi kegiatan perekonomian lainnya, karena melalui aktivitas sektor ini maka berbagai transaksi finansial dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja sektor ini antara lain dengan:

- a. Mengembangkan sistem perkreditan yang didukung oleh bantuan teknis dan fasilitasi yang meliputi pelatihan, penelitian dan penyediaan informasi.
- b. Pembinaan dan penyediaan sumber daya manusia kualifikasi ahli guna memenuhi kebutuhan bidang usaha asuransi secara berkelanjutan
- c. Pengembangan usaha pegadaian ke berbagai pelosok dengan menambah unit usaha dan kemudahan memberikan pinjaman.
- d. Usaha perbankan diarahkan untuk mampu membantu berkembangnya usaha mikro.
- e. Mengembangkan dan mengefektifkan persyaratan perijinan pendirian perusahaan jasa keuangan yang

mengharuskan mempekerjakan pegawai tetap guna mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih permanen.

9. Sektor Jasa

Hampir segala aspek dimulai dari kebutuhan sarana komunikasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, politik, dunia kerja dan sarana perkantoran, rumah tangga, kesehatan, hiburan, pertelevisian hingga kebutuhan aksesoris dan pernak-pernik kehidupan yang lain sangat banyak, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat dan kompleks tersebut mendorong permintaan terhadap jasa tertentu yang sangat beragam dan pada gilirannya menciptakan peluang besar dalam bisnis jasa, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, khususnya tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Jasa yang sangat bervariasi dan spesifik terus dibutuhkan oleh masyarakat secara luas dan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dunia secara global, yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Perkembangan yang dinamis memunculkan banyak peluang kerja di sektor jasa bagi para angkatan kerja. Peranan kegiatan layanan jasa kemasyarakatan dalam penyerapan tenaga kerja tergolong besar yang menduduki urutan pertama.

Mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka prospek pengembangan sektor ini menjadi cukup cerah. Untuk itu perlu dilakukan penyiapan sumberdaya manusia

yang kompeten di bidang jasa ini. Selain itu, perlu juga dilakukan pembinaan berupa peningkatan kapasitas dan kualitas bagi para pekerja di sektor jasa ini dalam rangka produktivitas.

E. Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja

Kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Keempat kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran dan setengah pengangguran.

Pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan kebijakan penempatan tenaga kerja dalam Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 ini adalah dengan cara menentukan target utama penempatan tenaga kerja berdasarkan jenis status pekerjaan dan lapangan usaha (sektor). Adapun ketiga jenis status pekerjaan yang menjadi target utama penempatan tenaga kerja pada tahun 2022-2027 adalah kesempatan kerja dengan status Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan, Berusaha Dengan Dibantu, dan Pekerja/Buruh/Karyawan. Kebijakan, strategi, dan program penempatan tenaga kerja yang perlu dilakukan adalah:

1. Kebijakan penciptaan pasar kerja yang luwes melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan
2. Konsolidasi program perluasan kesempatan kerja
3. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

4. Peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan
5. Peningkatan konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja
6. Tenaga kerja asing yang akan masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki keahlian khusus dan mentransformasikan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia.
7. Kebijakan pendukung lainnya
 - a. Pengembangan pusat-pusat informasi ketenagakerjaan;
 - b. Pengembangan kualitas dan sistem informasi pasar kerja, bursa kerja dan sistem perluasan kesempatan kerja;
 - c. Penyusunan Perencanaan tenaga kerja sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan program yang ramah ketenagakerjaan.

Salah satu yang dapat ditempuh dalam perluasan lapangan kerja adalah penyelenggaraan padat karya. Pelaksanaannya meliputi padat karya infrastruktur yang bertujuan untuk membuka aksesibilitas daerah terpencil sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan pembentukan kelompok usaha melalui perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK). Kelompok usaha yang dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Untuk memaksimalkan hasil padat karya maka diperlukan peran aktif kelompok masyarakat dalam memberikan informasi tentang kebutuhan padat karya baik infrastruktur maupun PKSPK. Agar padat karya tepat sasaran

maka perlu dilakukan penelitian, proposal dan pengecekan lokasi. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha maka diperlukan pendampingan pada setiap kelompok usaha sehingga tenaga pendamping harus selalu ada pada PKSPK.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi dan lebih tahan terhadap krisis. Namun usaha di sektor ini mayoritas masih banyak kendala yang dihadapi. Karena itu diperlukan pembekalan tentang kewirausahaan/manajemen usaha bagi mereka, perlu pemanduan dan bimbingan usaha dari pemerintah, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan usaha yang dikelola. Untuk meningkatkan usaha di sektor informal diperlukan peranan pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas keterampilan berwirausaha, memberikan peluang untuk dapat memperluas kerjasama dengan pihak-pihak/ lembaga masyarakat untuk mendampingin usaha mereka, fasilitas konsultasi usaha bagi pengusaha pemula, stimulant modal sebagai pengembangan usaha maupun bantuan alat kerja terhadap kelompok usaha produktif. Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan sektor informal agar dapat tumbuh dan berkembang, terarah dan terkoordinasi serta terantau dan terlindungi perlu dibentuk lembaga yang dapat ditangani pihak pemerintah dan swasta.

F. Kebijakan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan pengawasan norma ketenagakerjaan tetapi juga menyangkut penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk penyelesaian yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial ini yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi bila ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). Selain itu sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional perlu dibentuk Serikat Pekerja (SP) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat hubungan industrial yang paling utama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi jembatan utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial langkah terbaik adalah adanya dialog antara pekerja dan pengusaha dalam penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak (win - win solution). Untuk itu seharusnya pekerja memiliki kebebasan berpendapat yang disalurkan secara terarah dan pada jalurnya melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian upaya perlindungan tetap menitikberatkan pada upaya preventif sebelum terjadinya kasus – kasus yang harus diselesaikan secara hukum.

Kerjasama yang baik antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan ketenangan bekerja bagi pekerja karena yakin hak – haknya akan dijamin sesuai dengan kontribusinya. Pengusaha pun akan memetik keuntungan dengan peningkatan produktivitas dan terciptanya budaya kerja yang baik. Untuk itu dari keseluruhan perangkat hubungan industrial berupa adanya Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun Serikat Pekerja (SP) dan Tenaga Mediator maka yang terbaik adalah keberadaan perangkat hubungan industrial berupa Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit yang berfungsi baik akan meminimalisir peran pemerintah melalui Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit.

Tidak dapat dipungkiri bahwa walau telah diupayakan adanya adanya perangkat hubungan industrial yang memadai tetapi sangat dimungkinkan terjadi perselisihan hubungan industrial apalagi berbagai perangkat tersebut diatas dari jumlah masih jauh dari kebutuhan. Hal ini terutama agar perselisihan tersebut tidak perlu masuk dalam ranah hukum yang pada akhirnya cenderung merugikan kedua belah pihak baik dari segi biaya, waktu, tingkat kerepotan yang ditimbulkan, citra buruk, rusaknya hubungan baik hingga berbagai kerugian non materil lainnya. Untuk itu diperlukan banyak tenaga mediator yang kompeten dalam rangka memediasi perselisihan yang timbul.

Perlindungan tenaga kerja erat pula kaitannya dengan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja juga bagi keluarganya. Pekerja dan keluarganya yang hidup sejahtera inilah yang hakekatnya menjadi tujuan dari konstitusi. Negara

diwajibkan menyediakan pekerjaan yang (berpenghasilan) layak bagi tiap – tiap warga negaranya. Dengan demikian, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Perwujudan ini melalui jalur yang memang seharusnya, yaitu bukan dari serangkaian program subsidi dan bantuan namun di sisi lain mengesampingkan hak – hak pekerja yang telah bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada kenyataannya, tenaga kerja memang relative mempunyai kedudukan yang lemah sehingga tanggungjawab utama dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja ini berada di tangan pengusaha, selain tenaga kerja yang juga turut berperan aktif dalam pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini.

Adanya program jaminan sosial ini berkenaan dengan pemeliharaan kesejahteraan pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko–resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan mempunyai beberapa aspek, antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya untuk pemeliharaan kesejahteraan pekerja.
2. Melindungi pekerja dari resiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.
3. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

4. Memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.

G. Kebijakan Pengawasan

Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama mereka terkait dengan hal ini, melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum.

Layanan pengawasan ketenagakerjaan mempromosikan dan memastikan kepatuhan kepada perundang-undangan nasional, seperti dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi kerja dan aspek-aspek lain dari hubungan kerja. Layanan-layanan ini juga membantu meningkatkan keefektifan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat perusahaan, mencegah konflik dan mempromosikan kedamaian sosial.

Tujuan utama pengawasan ketenagakerjaan adalah termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi di tempat kerja dengan tujuan mencapai pekerjaan dan kondisi kerja yang layak;
- b. pengusaha dan pekerja mendapatkan informasi dan panduan mengenai bagaimana mematuhi persyaratan-persyaratan hukum;

- c. perusahaan mengadopsi Tindakan-tindakan untuk memastikan praktik dan lingkungan di tempat kerja tidak menempatkan pekerja mereka dalam risiko-risiko yang terkait dengan keamanan dan kesehatan; dan
- d. informasi umpan balik dan pembelajaran dari praktik-praktik yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan peraturan dalam memperbaiki lingkup perlindungan hukum, dengan mempertimbangkan risiko-risiko baru yang terkait dengan masalah sosial, fisik dan psikologis.

H. Kebijakan Lainnya

1. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri disamping mampu memecahkan persoalan pengangguran sekaligus dapat mendatangkan devisa bagi Negara. Untuk itu diperlukan penyaluran yang baik agar dapat meminimalisir permasalahan di Negara penempatan. Karena kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pengeluaran SPR (Surat Pengantar Rekrut), maka yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan fasilitasi sebelum pemberangkatan terutama pada proses pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Perlu ditingkatkan peran sebagai koordinator penyelesaian permasalahan, pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berupa pengawasan dokumen perijinan keberangkatan PMI dan sosialisasi di Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka penempatan PMI yang berkualitas. Dalam rangka pemberdayaan purna PMI perlu

ditingkatkan pemberian fasilitas berupa pembekalan agar menjadi wirausaha baru. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua purna PMI siap untuk mandiri.

2. Pemagangan Ke Luar Negeri

Magang ke luar negeri memberikan banyak peluang dalam pengurangan pengangguran. Ketika kembali ke daerah asal mereka membawa modal/uang yang cukup banyak sehingga akan memberikan efek samping domino bagi terbukanya lapangan usaha baru. Untuk efektifitas magang ke luar negeri diperlukan peranan pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan lembaga–lembaga di beberapa negara yang dapat memfasilitasi kegiatan magang tersebut. Disamping itu perlu adanya sosialisasi kepada kelompok masyarakat tentang persyaratan yang diperlukan seawal mungkin, missal dilakukan di sekolah menengah tingkat atas, sehingga bagi siswa yang berminat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dalam rangka pembinaan setelah selesai magang diperlukan pendataan, sehingga mereka yang tidak bisa masuk ke perusahaan dapat difasilitasi menjadi pelaku usaha baru.

3. Transmigrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian, yang dimaksud transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang di selenggarakan pemerintah. Animo masyarakat untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi,

bahkan ada beberapa yang melebihi kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Untuk menjamin terpenuhinya harapan transmigran berupa peningkatan kesejahteraan rakyat maka dapat ditempuh beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Perlu adanya perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik kepada transmigran oleh daerah pengirim.
- b. Perlu adanya jaminan yang lebih kongkrit tentang peningkatan kesejahteraan transmigran dengan penguatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar daerah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
- c. Melakukan peningkatan kualitas SDM warga transmigrasi untuk mewujudkan transmigrasi yang mandiri.
- d. Membangun sarana dan prasarana yang memadai di kawasan transmigrasi.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2027 merupakan dasar acuan rencana pembangunan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, perencanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan Jamsostek Ketenagakerjaan.

Dokumen ini dirancang untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana tenaga kerja ini dapat direvisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dan program yang ada serta perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Akhirnya, keberhasilan melaksanakan rencana tenaga kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh *stakeholders* (pihak terkait), sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaannya itu untuk pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual dapat terwujud.